

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WISATA DANAU LEBO  
KECAMATAN TALIWANG KAB. SUMBAWA BARAT**



**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2 pada  
Program Studi Ilmu Lingkungan

**Irwan Jaya  
L4K006014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**TESIS**

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WISATA DANAU LEBO  
KECAMATAN TALIWANG KAB. SUMBAWA BARAT**

**Disusun oleh**

**Irwan Jaya  
L4K006014**

Mengetahui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES**

**Dra. Sri Suryoko, M.Si**

**Mengetahui  
Ketua Program  
Magister Ilmu Lingkungan**

**Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES**

## ABSTRAK

Perkembangan ibukota Kabupaten Sumbawa Barat (Kota Taliwang) telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga pada wilayah-wilayah tertentu yang berdekatan dengan pusat kota yang secara tidak langsung juga mengalami perkembangan sebagai dampak terjadinya dinamika masyarakat. Salah satu wilayah yang mengalami dampak perkembangan tersebut adalah keberadaan Danau Lebo di Kecamatan Taliwang. Untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan di sekitar kawasan Danau Lebo, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memandang perlu dilakukan upaya pembangunan dan penataan kawasan agar dapat menambah nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan pada kawasan tersebut, dengan pembangunan sebagai kawasan wisata.

Dalam rangka menggali konsep pengelolaan Danau Lebo yang relevan sebagai kawasan wisata, perlu dilakukan penelitian di Kecamatan Seteluk dan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan analogi. Selain itu dalam menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan kawasan wisata dianalisis dengan menggunakan metode SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan kawasan tersebut belum melibatkan masyarakat secara intensif dalam setiap tahapan. Pemerintah menggunakan pendekatan perencanaan sinoptik komprehensif. Selain itu dari segi prakiraan dampak, selain memberikan dampak yang positif, pembangunan kawasan wisata Danau Lebo juga berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain dikhawatirkan hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat serta ancaman genangan air bagi persawahan yang berada di bagian utara danau akibat gali-urug danau di bagian selatan yang juga bisa mengakibatkan sedimentasi. Selain itu kegiatan masyarakat di Desa Serangin yang melakukan penambangan batu cadas untuk persediaan material pembangunan sarana dan prasarana wisata di kawasan Danau Lebo dengan cara mengambil dari bukit-bukit sekitar kawasan danau dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan suksesi terhadap ekosistem baik flora maupun fauna. Dampak lain adalah permasalahan sampah yang bisa menumpuk di sekitar danau akibat aktifitas yang dilakukan apabila tidak ada manajemen pengelolaan yang baik.

Secara umum persepsi masyarakat terhadap pembangunan kawasan danau terbagi dalam 3 kelompok, yaitu: kelompok yang setuju terdiri dari masyarakat yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuatu yang baik yang sudah melalui kajian dan perencanaan yang mendalam; kelompok yang tidak setuju yang didominasi oleh masyarakat yang memiliki pengalaman buruk terhadap pembangunan pada masa lalu; dan kelompok yang tidak peduli yang mayoritas adalah masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan akses terhadap kawasan danau baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan lingkungan yang relevan dengan kawasan wisata Danau Lebo adalah pengelolaan yang partisipatif dimana masyarakat disertakan dalam setiap tahapan kegiatan sehingga ada rasa memiliki yang bisa menjadi jaminan keberlanjutan pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan terhadap kawasan Danau Lebo, maka tipe pariwisata yang relevan dikembangkan adalah ekowisata, yaitu wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengkonversi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

***Kata Kunci: rencana pengembangan kawasan wisata Danau Lebo, dampak lingkungan, usulan rencana kelola***

## ABSTRACT

The capital of West Sumbawa Regency, Taliwang City, has been growing rapidly. The situation is not only occurred at the centre of the city, but also in the fringe areas as a result of community's dynamics. Lebo Lake, located at Taliwang District, is one among areas impacted by this development process. To prevent the lake area from environmental degradation, West Sumbawa Regencial government has been applying development and management efforts to enhance the area's strategic and significant values by building it up as a tourist area.

In an effort of finding Lebo Lake management concept related to tourism development, this research was done at Seteluk and Taliwang Districts, West Sumbawa Regency. This descriptive qualitative research type employed descriptive and analogy data analysis methods. Besides the potencies and problems of developing this tourism area was analyzed by using SWOT method.

The result of this research shows that the planning process has not been involving the local community's intensively in each stage. The government tends to use synoptic comprehensive planning. Apart from predicted to yield positive impacts, Lebo Lake tourism area development also has potencies of yielding negative impacts. It is predicted that part of the local communities will lost their source of living. Aside from sedimentation, the northern part of the lake is expected to be flooded with the lake water during the digging and filling process of the southern part of the lake. The activities of the Serangin villagers who mine lime stone from the hills around the lake for construction materials is expected to cause environmental degradation and ecosystem succession, whether flora or fauna. Moreover, it is predicted that there will be garbage piling problems around the lake if the garbage is not successfully managed.

Perception of the local community was divided into three categories, namely: First, those who agree based on their believe that the government has decided a good policy through comprehensive study and planning; Secondly, those who disagree because of their bad experience in the past; and Thirdly, those who do not care as the majority of them do not get any access to the lake area, both directly or indirectly.

It is recommended that planning management which is relevant to the development of Lebo Lake tourism area is a participative management in which the local community is involved in each development stage. Therefore there will be self-belonging feeling which guarantee its sustainability. To support the management of Lebo Lake, the most relevant tourism type is eco tourism, defined as a responsible natural tourism by conserving the environment while at the same time enhancing the local people's welfare.

**Keywords: development plan of Lebo Lake tourism area, environmental impacts, planned management.**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1    Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2    Permasalahan.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3    Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4    Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1    Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2    Landasan Teori.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.1    Pengelolaan Lingkungan .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.2    Lingkungan Sosial .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.3    Dampak.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.4    Dampak Lingkungan.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.5    Dampak Sosial .....</b>	<b>14</b>

2.2.6	Pembangunan Kawasan.....	16
2.2.7	Pariwisata dan Kawasan Wisata.....	18
2.2.8	Ruang Lingkup Pariwisata.....	18
2.2.9	Pembangunan Pariwisata dan Dampak Lingkungan	21
2.2.10	Pariwisata Berkelanjutan .....	24
2.2.11	Penelitian Lain Yang Sejenis.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Tipe Penelitian .....	32
3.2	Langkah Penelitian.....	33
3.3	Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.4	Sumber dan Jenis Data .....	34
3.5	Populasi Penelitian .....	35
3.6	Teknik Sampling.....	35
3.7	Penentuan Daerah Sampel .....	36
3.8	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.9	Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>		
4.1	Kecamatan Seteluk.....	41
4.1.1	Letak Geografis .....	41
4.1.2	Penduduk dan Tenaga Kerja .....	41
4.1.3	Sosial .....	43
4.1.4	Sarana Perhubungan.....	44
4.2	Kecamatan Taliwang .....	44
4.2.1	Letak Geografis .....	44
4.2.2	Penduduk dan Tenaga Kerja .....	45

4.2.3	Sosial .....	47
4.2.4	Jaringan Jalan .....	48
4.3	Deskripsi Danau Lebo.....	48
4.3.1	Luas dan Letak Danau Lebo .....	48
4.3.2	Iklim.....	50
4.3.3	Karakteristik Danau Lebo.....	51
4.3.4	Potensi Danau Lebo.....	51

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1	Kehidupan Sosial Masyarakat Sekitar Danau Lebo ....	54
5.1.1	Masyarakat Samawa .....	54
5.1.2	Sistem Mata Pencaharian .....	56
5.1.3	Sistem Kepercayaan .....	57
5.1.4	Sistem Gotong Royong.....	57
5.1.5	Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Danau	58
5.1.6	Mitos-Mitos dan Kearifan Lokal .....	61
5.1.6.1	Mitos <i>Dea Bide</i> .....	61
5.1.6.2	Mitos <i>Kaki Aca</i> .....	61
5.1.7	Sistem Kekeluargaan.....	63
5.2	Konsep Perencanaan Danau Lebo Kecamatan Taliwang Oleh	
	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat .....	64
5.2.1	Prinsip Dasar Pembangunan Kawasan Danau Lebo	64
5.2.2	Sarana Pengembangan Kepariwisataaan .....	65

5.2.3	Rencana Kerja Pembangunan Kawasan	
Danau Lebo	72	
5.2.4	Tahap Pelaksanaan Oleh Konsultan .....	80
5.2.5	Penugasan Tenaga Ahli.....	83
5.2.6	Struktur Organisasi Konsultan.....	86
5.3	Rencana Penataan Kawasan Dan Sarana Serta	
Prasarana Yang		
	Akan Dibangun.....	88
5.3.1	Rencana Hubungan Diagram Antar Zoning .....	88
5.3.2	Rencana Pola dan Tata Bangunan .....	88
5.3.2.1	Pola Bangunan .....	88
5.3.2.2	Tata Bangunan.....	89
5.3.2.3	Konstruksi Bangunan .....	89
5.3.3	Jenis Fasilitas Bangunan Yang Direncanakan .	89
5.3.4	Rencana Sirkulasi Kawasan .....	91
5.3.5	Ruang Terbuka Hijau .....	92
5.3.6	Rencana Utilitas.....	92
5.4	Analisis Proses Perencanaan .....	93
5.4.1	Identifikasi Masalah .....	93
5.4.2	Formulasi Tujuan.....	95
5.4.3	Analisis Kondisi .....	96
5.4.4	Alternatif Kebijakan .....	97
5.4.5	Pilihan Kebijakan.....	98
5.4	Prakiraan Dampak Sosial Pembangunan Kawasan	
Danau Lebo		
	Sebagai Kawasan Wisata .....	99

	<b>5.4.1 Tahap Prakonstruksi.....</b>	<b>99</b>
	<b>5.4.2 Tahap Konstruksi.....</b>	<b>100</b>
	<b>5.4.3 Tahap Operasional .....</b>	<b>101</b>
	<b>5.4.3.1 Dampak Sosial Ekonomi.....</b>	<b>101</b>
	<b>5.4.3.2 Dampak Sosial Budaya .....</b>	<b>103</b>
<b>5.5</b>	<b>Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Danau</b>	
<b>Lebo</b>	<b>107</b>	
<b>5.6</b>	<b>Analisis Rencana Pembangunan Kawasan Danau</b>	
<b>Lebo</b>	<b>113</b>	
	<b>5.6.1 Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan</b>	
<b>Danau Lebo</b>	<b>113</b>	
	<b>5.6.2 Analisis Metode Penentuan Kegiatan, Metode</b>	
<b>Survai,</b>		
	<b>Metode Analisis Dan Metode Perencanaan .....</b>	<b>116</b>
	<b>5.6.3 Analisis Hubungan Antar Zoning.....</b>	<b>118</b>
	<b>5.6.4 Analisis Potensi dan Permasalahan</b>	
<b>Pembangunan</b>		
	<b>Kawasan Danau Lebo Sebagai Kawasan</b>	
<b>Wisata</b>	<b>120</b>	
<b>5.7</b>	<b>Usulan Pengelolaan Lingkungan .....</b>	<b>122</b>
	<b>5.7.1 Pengelolaan Sampah .....</b>	<b>122</b>
	<b>5.7.2 Pengurangan Ketergantungan Air Untuk</b>	
<b>Konsumsi</b>		
	<b>Dari Danau .....</b>	<b>124</b>
	<b>5.7.3 Pembangunan Yang Ramah Lingkungan.....</b>	<b>125</b>
	<b>5.7.4 Pemanfaatan Ruang Kawasan .....</b>	<b>126</b>

5.7.5	Penanganan Sedimentasi .....	128
5.8	Usulan Konsep Pengelolaan Lingkungan Sosial .....	130
5.8.1	Prinsip Perencanaan .....	131
5.8.2	Prosedur	Perencanaan
134		
5.8.3	Implementasi	
136		
5.8.4	Pengendalian	
138		
5.8.5	Pengawasan	
139		
5.8.6	Evaluasi.....	
140		
5.9	Usulan Kegiatan Wisata Di Kawasan Danau Lebo	
140		
5.9.1	Agrowisata	
141		
5.9.2	Jelajah	Desa
145		
5.9.3	<i>Tracking</i>	Dan Wisata Buru
146		
5.9.4	<i>Homestay</i>	
146		
5.9.5	Budidaya	Ikan Di Danau
148		
5.9.6	Kesenian Tradisional/Pariwisata Budaya.....	148

**BAB VI PENUTUP**

**6.1 Kesimpulan ..... 150**

**6.2 Saran..... 152**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

1. Nara Sumber Penggalian Informasi .....	36
2. Luas Lahan Kawasan Danau Lebo.....	49
3. Dampak Negatif Pariwisata.....	104

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Warga yang sedang memetik <i>Tonyong</i> di Danau Lebo .....	5
2. Ikan hasil tangkapan langsung dijual di tepi danau .....	5
3. Sawah warga yang memanfaatkan pengairan dari Danau Lebo .....	5
4. Bagian danau yang dimanfaatkan untuk tempat pemancingan .....	5
5. Pendekatan Bidang Kepariwisataan.....	10
6. Langkah Penelitian Pembangunan Kawasan Danau Lebo.....	33
7. Lokasi Penelitian.....	40
8. Danau Lebo Yang Ditutupi Teratai dan Eceng Gondok .....	50
9. Pengembangan Kawasan Lindung .....	68
10. Pengembangan Kawasan Budidaya .....	69
11. Persebaran Obyek Wisata .....	71
12. Daerah Rawan Bencana .....	74
13. Rencana Pengembangan Kawasan.....	75
14. Wilayah Potensi Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan .....	77
15. Pendekatan Metodologi Pembangunan Kawasan Danau Lebo.....	80
16. Struktur Organisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kawasan Danau Lebo .....	87
17. Hubungan Antar Zona.....	119

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara .....	152
2. Dokumentasi Hasil Penelitian .....	153
3. Rencana Pembangunan Sarana & Prasarana.....	158
4. Animasi 3 Dimensi Kawasan Terbangun.....	163

# BAB I

## PENDAHULUAN

**Pada bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan tesis yang mencakup pembangunan lingkungan dalam Renstrada Provinsi NTB, perencanaan terhadap Kawasan Danau Lebo, pemanfaatan Danau Lebo oleh masyarakat saat ini, serta kegagalan pengelolaan danau di beberapa tempat. Selain itu juga diuraikan tentang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian.**

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber, penunjang hidup bagi rakyat, bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan serta peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Oleh karena itu pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Ideologi pembangunan sektor lingkungan diekspresikan dalam pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan

kepentingan generasi yang akan datang. Konsep ini menempatkan pembangunan dalam prespektif jangka panjang dan menuntut adanya solidaritas antar generasi. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem. Dengan memelihara fungsi ekosistem maka keberkelanjutan sumber daya alam akan tetap terjaga.

Hadi (2005) menyebutkan bahwa ada empat prinsip dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi yang meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan manusia;
2. Memelihara integritas ekologi;
3. Keadilan sosial; dan
4. Kesempatan menentukan nasib sendiri.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pembangunan Lingkungan Dalam RENSTRADA Provinsi NTB**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2006 memuat kebijakan pembangunan terkait dengan kebijakan APBD maupun APBN yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai Rencana Strategis Daerah (RENSRADA) Provinsi NTB Tahun 2003 – 2008. Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah diawali dengan kondisi umum yang menguraikan kemajuan pembangunan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan. Berdasarkan tantangan dan masalah tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan mengacu pada agenda pembangunan Tahun 2006.

Sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi NTB bidang sosial dan lingkungan hidup Tahun 2006 adalah:

1. Terpulihnya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, tercegahnya kerusakan yang lebih parah dan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik.
2. Perlu dilaksanakan upaya-upaya yang mengarah pada pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan bagi sumber daya alam yang masih dalam keadaan baik melalui pelibatan masyarakat serta peningkatan kapasitas dan peran aparatur dalam pengawasan.

Sehubungan dengan itu, prioritas diletakkan pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam, termasuk jasa lingkungan secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, serta sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu, prioritas juga diberikan pada upaya-upaya :

1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yang rusak agar dapat berfungsi kembali dalam mendukung sistem penyanggah kehidupan, dan dapat memproduksi kembali untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
3. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, serta akuntabilitas termasuk dalam upaya penegakkan hukum, penegakkan HAM adat dan lokal, perlindungan lingkungan global;
4. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah dan/atau mengendalikan pencemaran lingkungan hidup;
5. Peningkatan kualitas serta akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

#### ***Perencanaan Terhadap Kawasan Danau Lebo***

Perkembangan ibukota Kabupaten Sumbawa Barat (Kota Taliwang) telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi pada wilayah-wilayah tertentu yang berdekatan dengan pusat kota secara tidak langsung juga mengalami

perkembangan sebagai akibat dari dampak terjadinya dinamika masyarakat. Salah satu wilayah yang mengalami akibat dampak perkembangan tersebut adalah keberadaan Danau Lebo di Kecamatan Taliwang. Dari segi sosial ekonomi maupun bentuk fisiknya, Danau Lebo yang berada di Kecamatan Taliwang menunjukkan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perkembangan suatu wilayah yang diakibatkan oleh terjadinya dinamika masyarakat, pada satu sisi dapat mengakibatkan perkembangan yang bersifat positif, tetapi pada sisi lain juga dapat mengakibatkan pengaruh yang bersifat negatif (pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kawasan dan karakter lingkungan). Untuk itu diperlukan adanya suatu aturan pembangunan kawasan reservasi di sekitar Danau Lebo Kecamatan Taliwang yang nantinya akan dijadikan suatu pedoman dan acuan guna mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan di sekitar kawasan tersebut.

Untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan serta penurunan kualitas yang semakin parah di sekitar kawasan Danau Lebo, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memandang perlu dilakukan suatu upaya penataan kawasan reservasi agar dapat menambah nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan pada kawasan tersebut. Sedangkan upaya reservasi yang diperlukan adalah dalam bentuk pemberdayaan dan pengendalian pertumbuhan kawasan dengan meningkatkan kondisi fisik dan non fisik atau dengan mengembangkan potensi yang dimiliki dari segi sosio kultural, sosio ekonomi, dan segi fisik alam lingkungan sehingga dapat memberikan dukungan peningkatan kualitas lingkungan kawasan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas perekonomian masyarakat di sekitarnya. Dalam rangka perencanaan penataan kawasan reservasi Danau Lebo tersebut, maka diperlukan juga langkah identifikasi pemanfaatan lahan di sekitar danau tersebut dengan menata dan merancang *landscape* pada kawasan tersebut yang nantinya merupakan suatu bentuk perencanaan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

### ***Pemanfaatan Danau Lebo Oleh Masyarakat Saat ini***

Hampir setengah dari danau ini dipenuhi oleh tanaman sejenis eceng gondok dan Teratai. Keberadaan tanaman ini menjadi *feeding ground* dan *nursey ground* yang sangat baik bagi spesies air tawar yang ada di tempat ini. Di sepanjang tepian danau ini juga dipenuhi oleh lumpur yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya spesies yang lain, yaitu Belut. Keberadaan spesies-spesies tadi yang didominasi oleh jenis-jenis ikan air tawar, menjadikan masyarakat sekitarnya yang tidak mempunyai lahan menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan-ikan tersebut. Selain itu dari tanaman eceng gondok yang tumbuh di sebagian danau ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan. Dari tumbuhan teratai, buahnya oleh masyarakat sekitar juga dimanfaatkan untuk tambahan nilai ekonomis keluarga dengan menjual buah teratai tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah air dari danau ini oleh masyarakat setempat secara tradisional digunakan untuk sarana irigasi untuk sawah-sawah disekitar danau.



Gambar 1.1  
Warga yang sedang memetik *Tonyong*  
di Danau Lebo



Gambar 1.2  
Ikan hasil tangkapan  
langsung dijual di tepi danau



Gambar 1.3  
Sawah warga yang memanfaatkan  
pengairan dari Danau Lebo



Gambar 1.4  
Bagian danau yang dimanfaatkan  
untuk usaha pemancingan warga

### ***Kegagalan Pengelolaan Danau di Beberapa Tempat***

Beberapa kegiatan pengelolaan danau yang semula ditujukan untuk kawasan pariwisata antara lain adalah pengelolaan terhadap Danau Tondano ([www.tomoutou.net](http://www.tomoutou.net)). Pengelolaan yang dilakukan terhadap danau ini justru mengakibatkan menurunnya kualitas air danau yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah pengelolaan terhadap Danau Toba yang tidak menghiraukan aspek lingkungan. Pemerintah cenderung memiliki orientasi jangka pendek dan pragmatis. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan hanya memikirkan kepentingan pemilik modal. Sementara di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap Danau Toba dan masyarakat di sekitarnya sangat minim. Akibatnya masyarakat dan ekosistem Danau Toba sangat dirugikan. Kerugian yang diderita masyarakat bukan hanya kerugian material, tetapi juga kerugian sosial. Misalnya dengan adanya kematian ikan mas dalam jumlah besar, yang baru pertama terjadi dalam sejarah Danau Toba. Hal ini tentu membuat masyarakat sangat terpukul. Terlepas dari apa faktor penyebabnya, tetapi yang pasti masyarakat telah merugi.

Analogi lain yang dapat dilihat adalah pengelolaan terhadap Danau Maninjau yang oleh Indra Noferi dikatakan sebagai kegagalan pengelolaan

([www.geocities.org](http://www.geocities.org)). Bentuk nyata pencemaran Danau Maninjau sebagai akibat dari aktivitas manusia (terutama penduduk di sekitarnya) adalah:

1. pencemaran danau oleh pupuk dan pestisida (dampak kegiatan pertanian)
2. pencemaran danau oleh sisa pakan ikan (dampak kegiatan perikanan)
3. pencemaran danau oleh sampah padat dan cair (dampak aktivitas penduduk)
4. penurunan muka air danau (akibat pengambilan air yang melebihi daya dukung danau)
5. beberapa sungai berhenti mengalirkan air – mati (akibat aktivitas perusakan *catchment area*)
6. penurunan kualitas pemandangan di sekitar danau yang merupakan sebuah obyek wisata (dampak penggunaan lahan di kawasan lindung setempat).

Pegelolaan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dari sumber daya alam menyebabkan kerugian masyarakat. Dampak sosial ekonomi pencemaran yang dirasakan masyarakat meliputi dampak terhadap mata pencaharian, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan sosial di masyarakat. Dampak terhadap mata pencaharian yakni terganggunya aktivitas usaha masyarakat di danau yang selanjutnya mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan dalam mata pencahariannya tersebut. Perubahan pada mata pencaharian terjadi dalam beberapa bentuk meliputi masyarakat yang bertahan pada mata pencaharian semula, kembali menggeluti usaha pertanian, menggeluti lapangan usaha baru dan merantau.

Hal-hal tersebut di atas terjadi karena tidak adanya keberpihakan para pengambil keputusan terhadap lingkungan, sehingga aspek ini menjadi terabaikan, dan pada akhirnya akan berpulang kepada penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari keberadaan danau-danau tersebut.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul suatu permasalahan bahwa kegiatan pembangunan suatu kawasan mengandung

konsekuensi terjadinya perubahan-perubahan terhadap lingkungan kawasan yang dibangun diantaranya adalah lingkungan sosial. Untuk itu diperlukan suatu rencana pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Atas dasar hal tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan kawasan Danau Lebo serta dampak lingkungan sosial apa yang mungkin ditimbulkan dengan adanya pembangunan kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kawasan wisata?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangunan kawasan tersebut?
3. Bagaimana pengelolaan lingkungan yang relevan yang bisa diimplementasikan terhadap kawasan tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis proses perencanaan pembangunan kawasan Danau Lebo dan memperkirakan dampak lingkungan sosial yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kawasan wisata;
2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan tersebut, sehingga dapat ditelaah kemungkinan-kemungkinan perubahan mendasar yang akan terjadi dari adanya rencana pembangunan baik perubahan yang bersifat positif maupun negatif;
3. Usulan kebijakan pengelolaan lingkungan Danau Lebo Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Memberikan kajian prakiraan dampak terhadap lingkungan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan kawasan, sehingga dapat mengambil

kebijakan yang dianggap perlu guna memaksimalkan manfaat dan mengeliminasi dampak negatif yang mungkin terjadi, dan dalam perencanaannya dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, serta memberikan usulan pengelolaan yang relevan dengan kondisi Danau Lebo.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang dampak lingkungan pembangunan kawasan guna mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalam perencanaan dan pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan.

c. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori, pengertian pengelolaan lingkungan, lingkungan sosial, dampak, dampak lingkungan, dampak sosial, pembangunan kawasan, pariwisata dan kawasan wisata, ruang lingkup pariwisata, pembangunan pariwisata dan dampak lingkungan, pariwisata berkelanjutan, serta beberapa penelitian lain yang sejenis sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan terhadap Danau Lebo.

#### **2.1 Kerangka Teori**

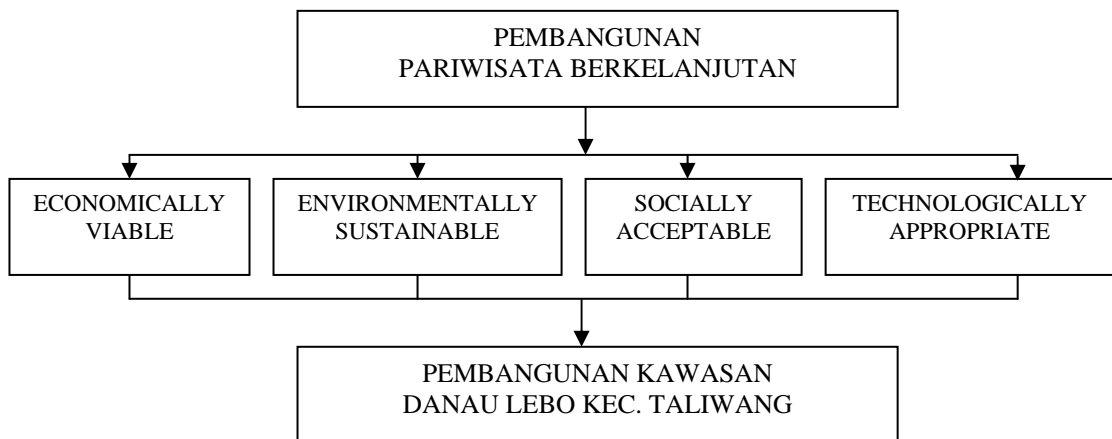
Selama empat dasawarsa pembangunan nasional, kebijakan kepariwisataan telah mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, pariwisata dipandang sebagai kegiatan pembangunan yang berbasiskan kebudayaan, kemudian sebagai salah satu andalan sektor ekonomi terutama bagi peningkatan penerimaan devisa (Ardawidjaja, 2007). Terakhir, sejak tahun 1999 sampai sekarang pariwisata dikembalikan pada konsep semula sebagai program pembangunan sosial budaya. Perubahan kebijakan tersebut telah membawa implikasi luas, baik pada kegiatan kepariwisataan itu sendiri, maupun bagi pengelolaan lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai sumber daya yang menjadi andalan utama dalam kegiatan pariwisata.

Apa yang penyebabnya? Perubahan kebijakan pariwisata tersebut telah membawa dampak luas baik pada kegiatan kepariwisataan itu sendiri, maupun pemanfaatan lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai sumber daya pariwisata. Beberapa hal ketidaksesuaian ada dalam kebijakan pariwisata kita. Misalnya, hingga tahun '90-an, kebijakan pariwisata sangat bersifat sentralistik, ekonomi sentris dan eksploitatif dalam penerapannya.

Untuk itu, pengembangan pariwisata perlu melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu, bersifat interdisipliner, dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Dalam era otonomi daerah, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menggariskan bahwa basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut, tentunya harus dikelola melalui peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu dengan memperhatikan aspek *good governance*, desentralisasi, SDM dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata (*community-based tourism development*).

Berikut ini dapat dilihat gambaran pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kawasan terkait dengan pengembangan kepariwisataan.



Gambar 2.1 Pendekatan Bidang Kepariwisataan (Dokumen Pembangunan Kawasan Danau Lebo, 2006)

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan diantaranya adalah:

(1) meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; (2) meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat dan seimbang; (3) meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuhkembangkan kemampuan dunia usaha; (4) memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; (5) menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Demikian pula dampak positif pembangunan terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit, tersedianya air bersih, terkendalinya banjir, dan lain-lain; sedangkan dampak negatif akibat pembangunan terhadap lingkungan, yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan, yang secara langsung akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan biologis. Selain itu perubahan perilaku masyarakat sekitar pembangunan yang cenderung konsumtif juga merupakan dampak negatif lain dari pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang matang dan mendalam terkait dengan kegiatan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan.

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan kawasan sebagai kawasan wisata adalah gangguan ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial. Hal lain yang menjadi dampak pembangunan kawasan dalam berbagai skala adalah perubahan fungsi lahan/kawasan yang dibangun, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan juga masalah sampah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan banyak diartikan sebagai upaya sadar dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks lingkungan, pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Soemarwoto (1985) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Sementara Omara-Ojungu dalam Setiawan (2005) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama dimana solusi harus diambil berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.

Kedua rumusan diatas tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan sosial mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama tentang bagaimana memelihara atau memanfaatkan lingkungan.

Setiawan dalam Makalahnya Konsep, Instrumen dan Strategi Pengelolaan Lingkungan (2005) mengemukakan ada beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Ekologis

Dapat didefinisikan sebagai pengalokasian dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis, terutama hubungan-hubungan antar berbagai komponen dalam satu sistem lingkungan fisik dan biologis.

2. Pendekatan Ekonomis

Pendekatan ekonomis didasarkan atas pemikiran tentang kelangkaan sumber daya dan lingkungan sehingga menuntut para pengguna sumber daya dan lingkungan untuk melakukan pilihan-pilihan yang seksama dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal.

3. Pendekatan Teknologis

Pendekatan ini menekankan pada upaya-upaya teknologis yang memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dengan hasil maksimal.

4. Pendekatan Sosio-Kultural

Pendekatan ini menekankan pada pentingnya memahami aspek-aspek sosial dan kultur masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan. Pandangan hidup, tata cara hidup, serta prilaku masyarakat tertentu akan sangat menentukan bentuk-bentuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya, sehingga pendekatan ekonomis dan teknologis semata tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan yang ada.

## 5. Pendekatan Sosio-Politis

Didasarkan atas pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan dalam pengelolaan lingkungan yang masing-masing mempunyai persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Pendekatan ini menyadari pluralisme sistem sosial-politik sebagai komponen utama lingkungan serta implikasinya bagi proses-proses perubahan dan pengelolaan lingkungan.

### 2.2.2 Lingkungan Sosial

Dalam artikel Masyarakat : Struktur Sosial pada situs [www.geocities.com](http://www.geocities.com), lingkungan sosial didefinisikan sebagai suatu bagian dari suatu lingkungan hidup yang terdiri atas hubungan individu dan kelompok dan pola-pola organisasi serta segala aspek yang ada dalam masyarakat yang lebih luas di mana lingkungan sosial tersebut merupakan bagian daripadanya. Lingkungan sosial tersebut dapat terwujud sebagai kesatuan-kesatuan sosial atau kelompok-kelompok sosial, tetapi dapat juga terwujud sebagai situasi-situasi sosial yang merupakan sebagian dari dan berada dalam ruang lingkup suatu kesatuan atau kelompok sosial. Kesatuan-kesatuan sosial dan kelompok-kelompok sosial tersebut masing-masing mempunyai aturan-aturan yang berbeda satu dengan lainnya, di mana manusia yang terlibat atau berada di dalamnya harus mentaati aturan-aturan tersebut dalam berbagai hubungan-hubungan sosial yang dilakukannya menurut masing-masing kelompok dan kesatuan sosial.

### 2.2.3 Dampak

Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor Kep-299/11/Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dampak-dampak yang akan muncul baik berupa limbah/polusi maupun dalam bentuk lainnya mencakup: a) Sumber dampak; b) Jenis dampak dan ukurannya; serta c) Sifat dan tolok ukur dampak.

#### **2.2.4 Dampak Lingkungan**

Hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup, biasanya disebut lingkungan. Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan pada hakikatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara sadar atau kurang sadar. Ada suatu kecenderungan besar untuk mengadakan perbedaan antara lingkungan fisik, biologis dan sosial (Soemantoro 2004).

Pembagian lingkungan menjadi 3 kelompok dasar tersebut dimaksudkan untuk memudahkan di dalam penjelasan tentang lingkungan itu sendiri. Pertama adalah lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain. Kedua lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, seperti binatang-binatang dari yang besar samai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketiga adalah lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenalnya. Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan; agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu.

Dalam usahanya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan dimaksud, manusia melakukan pemanfaatan-pemanfaatan lingkungan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Dampak lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

#### **2.2.5 Dampak Sosial**

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang timbul akibat suatu kegiatan pembangunan maupun penerapan

suatu kebijaksanaan dan program (Hadi, 2005). Terdapat dua macam dampak sosial. Pertama yang disebut sebagai dampak standard yakni dampak yang relatif mudah diperkirakan dengan mendasarkan informasi dan aktifitas proyek mulai dari pra konstruksi, konstruksi maupun operasi. Dampak ini mudah diukur dan dikuantitatifkan. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan "*percerved impact*" atau dampak persepsi atau oleh ahli studi dampak sosial menyebut sebagai "*special impact*". Dampak ini terjadi karena sikap dan persepsi masyarakat terhadap proyek yang berhubungan dengan resiko yang mungkin ditimbulkan oleh proyek. Dampak ini sukar diukur dan sifatnya kualitatif. Timbulnya dampak yang demikian karena dua hal. Pertama karena karakteristik dari proyek dan yang kedua adalah karakteristik masyarakat.

Hadi (2005) mengemukakan bahwa dampak sosial muncul ketika terdapat aktivitas: proyek, program atau kebijaksanaan yang akan ditetapkan pada suatu masyarakat. Bentuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu system (masyarakat). Pengaruh ini bisa positif, bisa pula negatif. Hal ini hanya dapat diuji dari nilai, norma, aspirasi dan kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini menurut Armour dalam Hadi (2005) meliputi aspek-aspek:

1. Cara hidup (*way of life*) termasuk di dalamnya bagaimana manusia dan masyarakat itu hidup, bekerja, bermain dan berinteraksi satu dengan yang lain. Cara hidup ini disebut sebagai "*day to day activities*".
2. Budaya termasuk di dalamnya sistem nilai, norma dan kepercayaan. Contohnya, dengan adanya suatu aktivitas proyek atau industri, irama kerja penduduk menjadi lebih "*grid*", sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk turut dalam kegiatan-kegiatan kampung seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya.
3. Komunitas meliputi struktur penduduk, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, estetika, sarana dan prasarana yang diakui sebagai "*public facilities*" oleh masyarakat yang bersangkutan. Seringkali kehadiran proyek yang menimbulkan dampak perpindahan penduduk menimbulkan rengganya kohesi sosial. Mereka harus pindah ketempat lain yang tidak selalu sama dengan

tetangga sebelumnya. Proyek-proyek baru juga seringkali harus mengurus fasilitas umum seperti mesjid, balai desa, sekolah atau kuburan.

Dampak sosial dapat merupakan akibat tidak langsung baik dari lingkungan alam seperti kontaminasi air tanah dan polusi udara, serta dari sisi ekonomis seperti menurunnya harga tanah dan bangunan dan kenaikan pajak. Dapat juga sebagai akibat langsung dari aktivitas konstruksi dan operasi dari proyek seperti bau, debu, kebisingan serta menurunnya pendapatan, kehilangan keterikatan dengan teman dan tetangga. Dampak yang demikian dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### **2.2.6 Pembangunan Kawasan**

Kawasan dalam tulisan ini adalah istilah yang digunakan untuk memaknai secara umum suatu tembereng hamparan dataran bumi. Membangun kawasan pada dasarnya bertujuan menciptakan atau meningkatkan dayaguna kawasan secara berkelanjutan. Menciptakan dayaguna diadakan di kawasan alami yang belum pernah didayagunakan; contoh, mengembangkan danau alami untuk usaha perikanan niagawi (*commercial fishery*). Meningkatkan dayaguna dijalankan di kawasan yang sudah didayagunakan namun dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat; contoh, memperbaiki prasarana kawasan permukiman (Notohadikusumo, 2005)

Konsep pendayagunaan kawasan selalu berpijak pada tiga anggapan (*perception*) dasar, yaitu (1) kawasan merupakan perwujudan sumberdaya (*asset*), (2) prospek jangka panjang ke masa depan, dan (3) keterlanjutan manfaat. Anggapan pertama mengkonotasikan makna lahan dan dengan demikian mengimplikasikan bahwa pengaturan penggunaan kawasan harus menurut pembagian (*distribution*) harkat lahan berupa kemampuan dan kesesuaiannya. Anggapan kedua memberikan kepada perencanaan pembangunan kawasan suatu gagasan kebijakan strategis yang holistik berciri terpadu, antisipatif, adaptif, lentur, dan optimisasi. Anggapan ketiga memberikan isyarat kepentingan pendampingan secara sinergistik upaya produksi dengan upaya konservasi yang menjadi hakikat keterlanjutan. Upaya produksi mengarah kepada penjaminan

memperoleh keuntungan dari harkat instrumental kawasan. Upaya konservasi mengarah kepada penjaminan memperoleh keselamatan dan keamanan penghidupan dari harkat hakiki (*intrinsic*) kawasan. Harkat instrumental adalah penilaian atas dasar kegunaan asli atau buatan bagi kebutuhan manusia langsung; contoh, keadaan tanah untuk pertanian. Harkat hakiki adalah penilaian menurut apa adanya sendiri, lepas dari kegunaan langsung bagi manusia; contoh, pemandangan bentanglahan (*landscape*).

Tujuan pembangunan kawasan bermacam-macam, bergantung pada kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan kebijakan strategis ketataprajaan (*governance*). Tujuan masing-masing menggunakan kriteria harkat diaknostik sendiri-sendiri. Tujuan pembangunan secara garis besar dapat dijabarkan menjadi empat aspek: (1) ketermukiman (*habitability*) kawasan bagi pemukiman masyarakat manusia secara layak, (2) produktivitas barang, bahan dan atau jasa bagi memenuhi kebutuhan manusia, (3) kapasitas menghasilkan pendapatan (*income producing capacity*) bagi semua penduduk kawasan bersangkutan, dan (4) keadaan biofisik, sosial, budaya, demografi, dan ekonomi yang membuka peluang bagi penerapan pranata (*institution*) pemanfaatan kawasan bersangkutan dengan wawasan konservasi dan pemerataan. Kefahaman tentang kebijakan pembangunan kawasan dan keterampilan menerapkan pirantinya perlu sekali dikuasai oleh para birokrat dengan dukungan teknisi yang mengurus secara mahir tataguna lahan atau yang berkaitan dengan legalitas hak gunausaha lahan. Agar wawasan konservasi habitat usaha, produktivitas sistem usaha, dan pemerataan prospek usaha dapat diwujudkan, penanganan tataguna dan hakgunausaha lahan perlu berlangsung terpadu dengan parameter harkat ganda. Pemahaman kebijakan pembangunan dan kemahiran penerapan pirantinya memerlukan suatu nalar yang dapat menilai sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. Untuk mengembangkan nalar seperti ini diperlukan pegangan etika yang merupakan sistem asas-asas moral.

### **2.2.7 Pariwisata dan Kawasan Wisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya

tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan kawasan wisata adalah kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan-batasan tertentu. Di dalam kawasan wisata dibangun objek dan daya tarik wisata serta prasarana dan sarana pariwisata. Kawasan wisata tidak perlu diartikan sebagai suatu kawasan yang bersifat khusus dalam arti eksklusif, apalagi bersifat tertutup. Kawasan serupa itu harus tetap merupakan kawasan yang sifatnya terbuka, yang tujuannya adalah mengembangkan suatu kawasan sebagai tujuan wisata. Kawasan wisata ini dapat berupa kawasan wisata alam, buatan maupun kawasan wisata minat khusus.

### **2.2.8 Ruang Lingkup Pariwisata**

Sesuai dengan Undang-undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

#### **a. Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari:**

1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
3. Jasa Pramuwisata;
4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
5. Jasa Impresariat;
6. Jasa Konsultan Pariwisata;
7. Jasa Informasi Pariwisata.

#### **b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dikelompokkan dalam:**

1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
3. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.

#### **c. Usaha Sarana Pariwisata yang dikelompokkan dalam:**

1. Penyediaan Akomodasi;
2. Penyediaan Makanan dan Minuman;
3. Penyediaan Angkutan Wisata;
4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
5. Penyediaan Kawasan Pariwisata.

Sesuai ketentuan, batasan pengertian dari masing-masing bidang usaha:

**a. Usaha Jasa Pariwisata:**

1. Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
2. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
3. Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
4. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi satu pertemuan sekelompok orang (misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
5. Jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
6. Jasa konsultasi pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dan penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui serta disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
7. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

**b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata:**

1. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah

ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;

2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
3. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai minat khusus.

**c. Usaha Sarana Pariwisata:**

1. Penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan;
2. Penyediaan makanan dan minuman adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri;
3. Penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata;
4. Penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing;
5. Penyediaan kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Sejumlah butir penting yang mencerminkan prinsip pariwisata berkelanjutan muncul pada beberapa produk hukum antara lain UU No. 9/1990 dan GBHN 1999. Walaupun paradigma pembangunan berkelanjutan belum menjadi wacana publik, nilai-nilainya dalam UU No. 9/1990 sudah ditemukan di

beberapa pasal secara parsial. Sebut saja, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, berbasis budaya dan integrasi sosial, bottom-up dan ekoturisme.

UU No. 9/1990 di samping menyiratkan penyelenggaraan pariwisata yang memperhatikan kelestarian, keseimbangan, keterpaduan ekologi dan keberlanjutan, juga telah menempatkan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan.

GBHN 1999 tampak makin memberi arah keberlanjutan yang jelas dalam pariwisata, seperti menempatkan pariwisata berpijak pada kebudayaan tradisional, sebagai wahana persahabatan antarbangsa, serta juga mendorong ekonomi kerakyatan. GBHN tersebut juga mencerminkan bahwa pengembangan pariwisata perlu melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu, bersifat interdisipliner, dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Dalam era otonomi daerah, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 2000 menggariskan bahwa basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut, tentunya harus dikelola melalui peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu dengan memperhatikan aspek good governance, desentralisasi, SDM dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata (community-based tourism development).

### **2.2.9 Pembangunan Pariwisata dan Dampak Lingkungan**

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kesejahteraan di segala bidang dan proses mengakibatkan perubahan lingkungan. Pembangunan yang dapat menjadi proses dan dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya (Bintoro dalam Sidarta 2002). Proses perubahannya menyangkut peningkatan daya guna sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi. Interaksi ketiga faktor ini dalam proses perkembangannya tercermin pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan

penduduk yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, lapangan kerja, taraf hidup, ekologi dan tata lingkungan.

Pariwisata sebagai salah satu jenis industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, serta menstimulasikan faktor-faktor produktivitas lainnya (Pandit dalam Sidarta 2002).

Selain perubahan-perubahan yang relatif mudah diketahui tersebut, ada juga perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan ini lebih sulit untuk diketahui karena tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat atau karena memang abstrak. Perubahan ini adalah perubahan pada aspek sosial ekonomi kehidupan masyarakat yang ada, yang tinggal di daerah atau kawasan wisata tertentu. Meskipun perubahan tersebut lebih abstrak sifatnya, tidak berarti bahwa perubahan tersebut tidak penting. Sebaliknya, perubahan inilah yang seringkali menjadi ukuran apakah pembangunan yang menimbulkan perubahan atau dampak tersebut pantas disebut sebagai pembangunan yang berhasil atau tidak. Pembangunan suatu kawasan wisata baru dapat dipandang betul-betul berhasil apabila pembangunan tersebut memang akhirnya membuat kualitas kehidupan masyarakat, yakni aspek sosial ekonomi kehidupan mereka yang tinggal di kawasan wisata tersebut atau disekitarnya meningkat.

Menurut Rizal (2000), dalam pengembangan pariwisata ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Faktor ekonomi mencakup:
  - a. Tingkat pertumbuhan yang positif dari *disposable income*;
  - b. Tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto yang dapat diukur dari berbagai aktivitas ekonomi dan pendapatan riil;
  - c. Perkembangan teknologi dan industri sehingga lebih banyak waktu pekerja yang digunakan untuk rekreasi dan menganggur;
  - d. Biaya transportasi yang relatif murah;
  - e. Tersedianya perbaikan dan kemajuan infrastruktur, sehingga tersedia berbagai fasilitas yang dapat menjangkau wisata;

- f. Dalam jangka panjang konsekuensi pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi perkembangan kepariwisataan.
2. Faktor sosial terdiri dari:
    - a. Peningkatan urbanisasi dan industrialisasi akan lebih meningkatkan rekreasi;
    - b. Peningkatan permintaan akan pemanfaatan waktu senggang melalui iklan;
    - c. Kenaikan bahan bakar mempengaruhi jumlah wisatawan untuk berekreasi.
  3. Faktor kebijaksanaan meliputi:
    - a. Mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja;
    - b. Mengembangkan dan menghidupkan daerah tertentu untuk pariwisata.

Menurut Soekadjito (1997) beberapa dampak sosial pembangunan pariwisata diantaranya:

1. Kontras antara kekayaan di kawasan kantong (*enclave*) wisata dengan keadaan diluarnya, larangan bagi penduduk untuk ikut menggunakan fasilitas alam yang seharusnya bersifat umum, dengan mudah menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa rendah diri terhadap masyarakat.
2. Adanya golongan-golongan, yaitu golongan mampu yang meniru tingkah laku mereka yang tidak cocok dengan kebudayaan masyarakat setempat. Ini adalah akibat dampak tiru meniru misalnya mereka dapat meniru kebiasaan wisatawan di *enclave* menjadi kelompok elit di dalam masyarakat dan menambah kesenjangan antar golongan.

Selain dampak tersebut di atas, pembangunan kawasan sebagai kawasan wisata akan membutuhkan investasi, yang dengan sendirinya mendorong tumbuhnya perekonomian dan diikuti pula oleh mobilitas penduduk. Akibatnya daerah kawasan wisata akan merupakan daerah penerima migran, dan merupakan beban daerah yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan menekan persediaan sumber daya alam. Selain itu dari aspek fisik dan biologi lingkungan, pembangunan kawasan wisata berpotensi terjadinya suksesi terhadap ekosistem pada kawasan yang dibangun. Pada pembangunan dengan skala besar, suksesi ini bisa terjadi secara primer, dimana perubahan terhadap ekosistem terjadi secara menyeluruh dan tiba-tiba. Adanya kunjungan dan musim wisatawan menimbulkan

keadaan jenuh, kemacetan, meningkatkan tingkat kebisingan, sampah yang lebih lanjut mengakibatkan rusaknya obyek yang seharusnya ingin dilihat dan dinikmati, serta pencemaran udara yang akan menimbulkan degradasi lingkungan.

#### **2.2.10 Pariwisata Berkelanjutan**

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai ‘resep’ pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

##### **1. Partisipasi**

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan

dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

## 2. Keikutsertaan Para Pelaku/*Stakeholder Involvement*

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

## 3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

## 4. Penggunaan Sumber daya yang berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

## 5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya

atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

#### 6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

#### 7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

#### 8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

#### 9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational* dan *profesional*. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

#### 10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lanscape*, *sense of place*, dan

identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

### **2.2.11 Ekowisata**

*The International Ecotourism Society (TIES)* mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengonversi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Damanik dan Weber, 2006). Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni: pertama, ekowisata sebagai produk; kedua, ekowisata sebagai pasar; ketiga ekowisata sebagai pendekatan pembangunan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pembangunan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

Di sini kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata.

### **2.2.11 Penelitian Lain Yang Sejenis**

Penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan dengan lokasi yang berbeda, diantaranya adalah:

#### ***1. Aspek Strategis Pengelolaan Danau Tondano Secara Terpadu oleh Veronica A. Kumurur (2002).***

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan danau terjadi penurunan kualitas air danau yang juga dikonsumsi oleh masyarakat yang disebabkan karena kegiatan pemupukan di persawahan yang berlebihan dimana aliran air dari kawasan persawahan tersebut memang diarahkan untuk menjadi salah satu input air danau, perikanan, dan limbah rumah tangga antara lain deterjen dan kotoran hewan dan manusia yang dilakukan oleh

masyarakat setempat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan konsentrasi bahan organik yang masuk ke danau yang telah menurunkan kualitas air Danau Tondano. Keadaan ini pada akhirnya berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat dan pemanfaatan terhadap danau itu sendiri.

## ***2. Quo Vadis Pengelolaan Danau Toba oleh Oscar Siagian (2006).***

Dari penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa dengan adanya pembangunan terhadap kawasan Danau Toba, keberadaan Danau Toba sudah sangat memprihatinkan. Arti dan fungsi Danau Toba sudah mengalami degradasi. Hal ini terbukti dari beberapa ciri fisik Danau Toba yang sudah berubah. Beban Danau Toba semakin besar.

Danau Toba telah dijadikan sebagai objek bagi pemuasan nafsu keserakahan manusia. Fakta-fakta yang ditemukan mengenai persoalan Danau Toba sesungguhnya bermula dari adanya upaya pengeksploitasian tanpa batas terhadap sumber daya yang ada, baik itu air, lahan maupun hutan di sekitarnya. Hal ini kemudian diperparah dengan datangnya gelombang pembangunan yang sering kurang menghiraukan aspek kelestarian lingkungan.

Selama ini, sebenarnya berbagai program telah dicoba dibuat untuk melestarikan ekosistem Danau Toba. Bahkan organisasi/lembaga pun sudah banyak berdiri dengan berlabelkan “cinta Danau Toba”. Tetapi kenyataannya, kerusakan atau degradasi ekosistem Danau Toba masih terus terjadi. Salah satu contohnya adalah program penanaman sejuta pohon tetapi nyatanya hingga kini, banyak lahan di sekitar Danau Toba yang sudah kritis. Kemudian, adanya pagelaran Pesta Danau Toba setiap tahunnya, yang pada awalnya untuk menggalakkan pariwisata Danau Toba dengan mengandalkan budaya lokal. Ternyata sudah berubah menjadi ajang hura-hura. Kemudian, program pengembangan ikan, yang ternyata kurang memperhatikan karakteristik Danau Toba. Penanaman eceng gondok yang ternyata lebih menjadi beban baru bagi ekosistem Danau Toba.

Bahkan satu kebijakan pemerintah yang kelihatannya sangat fatal adalah dengan memberi ijin untuk pengoperasian berbagai industri di sekitar Danau Toba. Kehadiran industri ini lebih banyak mendatangkan kerugian dari pada

keuntungan bagi masyarakat dan ekosistem Danau Toba. Padahal industri-industri tersebut kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada kelestarian ekosistem Danau Toba.

Pemerintah kelihatannya cenderung memiliki orientasi jangka pendek dan sangat pramatis. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan banyak hanya memikirkan kepentingan pemilik modal. Sialnya, perhatian pemerintah terhadap Danau Toba dan masyarakat di sekitarnya sangat minim. Akibatnya masyarakat dan ekosistem Danau Toba sangat dirugikan. Kerugian yang diderita masyarakat bukan hanya kerugian material, tetapi juga kerugian sosial. Misalnya dengan adanya kematian ikan mas dalam jumlah besar, yang baru pertama terjadi dalam sejarah Danau Toba. Hal ini tentu membuat masyarakat sangat terpukul. Terlepas dari apa faktor penyebabnya, tetapi yang pasti masyarakat telah merugi.

Kerugian lain adalah bahwa dengan kebijakan pengelolaan Danau Toba yang kurang memperhatikan budaya lokal, telah menjadikan masyarakat di sekitar Danau Toba mulai terpengaruh dan mulai meninggalkan kearifan lokal. Kerugian sosial telah terjadi. Disinilah kita melihat bahwa tidak adanya grand design dari pemerintah tentang pengelolaan Danau Toba. Bahkan masyarakat juga kurang dilibatkan di dalamnya. Kini, Danau Toba sudah diambang kepunahan. Salah satu bukti nyata adalah kematian ratusan ton ikan mas yang dipelihara dalam Keranda Jala Apung (KJA) di perairan Danau Toba. Kematian ikan mas tersebut menjadi dasar pijakan bagi orang-orang yang peduli kepada kelestarian Danau Toba untuk mengatakan bahwa ekosistem Danau Toba sekarang ini sedang krisis. Sejarah Danau Toba adalah sejarah “penderitaan”. Riwayat Danau Toba adalah riwayat yang dipenuhi dengan berbagai permasalahan.

### ***3. Dampak Sosial Ekonomi dari Pencemaran Danau Maninjau (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam) oleh Indra Noferi***

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Danau Maninjau selama ini belum memperhatikan aspek keberlanjutan dari sumber daya alam. Pencemaran ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat pemanfaatnya dan penurunan aktivitas perkenomian serta memperberat kehidupan masyarakat.

Dampak sosial ekonomi pencemaran yang dirasakan masyarakat meliputi dampak terhadap mata pencaharian, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan sosial di masyarakat. Dampak terhadap mata pencaharian yakni terganggunya aktivitas usaha masyarakat di danau yang selanjutnya mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan dalam mata pencahariannya tersebut. Perubahan pada mata pencaharian terjadi dalam beberapa bentuk meliputi masyarakat yang bertahan pada mata pencaharian semula, kembali menggeluti usaha pertanian, menggeluti lapangan usaha baru dan merantau. Dalam perkembangannya juga terdapat penambahan jenis usaha yang digeluti masyarakat dari sebelum terjadinya pencemaran. Disamping itu berbagai perubahan diatas menuntut adanya pembelajaran keterampilan baru di masyarakat.

Pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding sebelumnya. Penurunan ini menyebabkan terjadinya perubahan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kepada kebutuhan pokok saja. Selanjutnya terjadi penambahan penduduk miskin baru akibat penurunan tingkat penghasilan ini. Disamping itu juga terjadi pergeseran pada sumber penghasilan utama masyarakat dimana sumber penghasilan sampingan mulai bergeser menjadi penghasilan utama. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat produksi dari sumber penghasilan utama tersebut, yang dipengaruhi oleh perubahan intensitas kegiatan usaha. Penurunan pendapatan keluarga juga disebabkan menurunnya kontribusi anggota keluarga dalam membantu penghasilan keluarga sebab mereka juga kehilangan penghasilan.

Penyerapan tenaga kerja juga mengalami perubahan, hal ini terlihat dari curahan tenaga kerja produktif yang mengalami peningkatan, sementara kesempatan kerja untuk menampung angkatan kerja ini mengalami penurunan bahkan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah pengangguran yang kentara. Selain itu juga terjadi peningkatan arus urbanisasi yakni peningkatan jumlah perantau karena alasan ekonomi. Disamping itu penyerapan tenaga kerja saat ini disebabkan oleh

berkembangnya usaha-usaha baru yang digeluti masyarakat, namun hanya sedikit tenaga kerja yang mampu diserap.

Pengaruh pencemaran terhadap kesehatan masyarakat terlihat pada terganggunya ketersediaan air bersih terutama bagi masyarakat yang bermukim dipinggir danau, walaupun dapat dikurangi dengan adanya PAM Desa. Selain itu pencemaran menimbulkan gangguan berupa gatal-gatal dan bau. Sementara itu sanitasi lingkungan masyarakat hampir tidak berubah dengan kebiasaan membuang limbah ke danau. Pola konsumsi dan asupan gizi masyarakat hampir tidak mengalami perubahan, sebab yang terjadi hanya penurunan kualitas bahan konsumsi karena penurunanan pendapatan. Namun fasilitas kesehatan yang tersedia masih belum ditunjang oleh ketersediaan tenaga medis yang memadai.

#### ***4. Dampak Industri Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Jayapura oleh Onnie Mentang Lumintang (1996)***

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijaksanaan pemerintah ternyata belum cukup untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Jayapura. Walaupun pada saat itu Pemerintah Daerah mampu mengumpulkan pendapatan dari kegiatan wisatawan, sebenarnya prestasi itu pada dasarnya belum merupakan prestasi yang optimum, mengingat objek wisata di daerah Jayapura saat ini belum tertata dengan baik, di samping sifat usahanya masih seasonal. Akibatnya adalah tujuan mengumpulkan devisa sebanyak mungkin belum mampu terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian pula kegiatan industri pariwisata telah menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dampak sosial berupa meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan menambah lapangan kerja. Sebaliknya, ada dampak negatif yang terjadi, seperti sengketa tanah sehubungan dengan pengembangan objek wisata dan menimbulkan demonstration effect. Karena itu, dalam penelitian ini antara lain direkomendasikan agar pemerintah dalam menangani pengembangan industri pariwisata hendaknya dilakukan secara terpadu dan sungguh-sungguh sehingga akhirnya pengembangan kepariwisataan dapat berjalan dengan optimal.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metodologi penelitian yang terkait dengan penyusunan tesis ini. Beberapa aspek tersebut meliputi tipe penelitian, langkah penelitian, sumber dan jenis data, populasi penelitian, teknik sampling, penentuan daerah sample, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

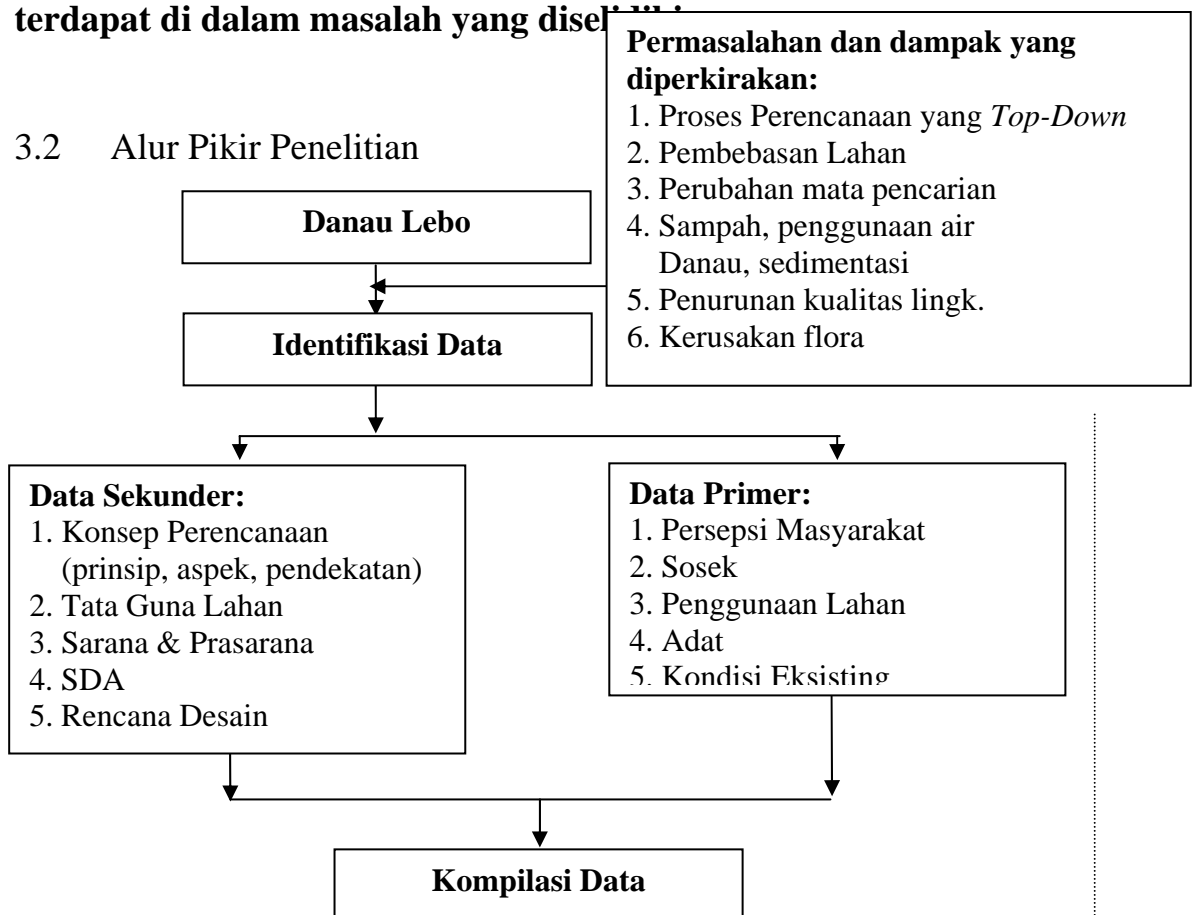
### 3.1 Tipe Penelitian

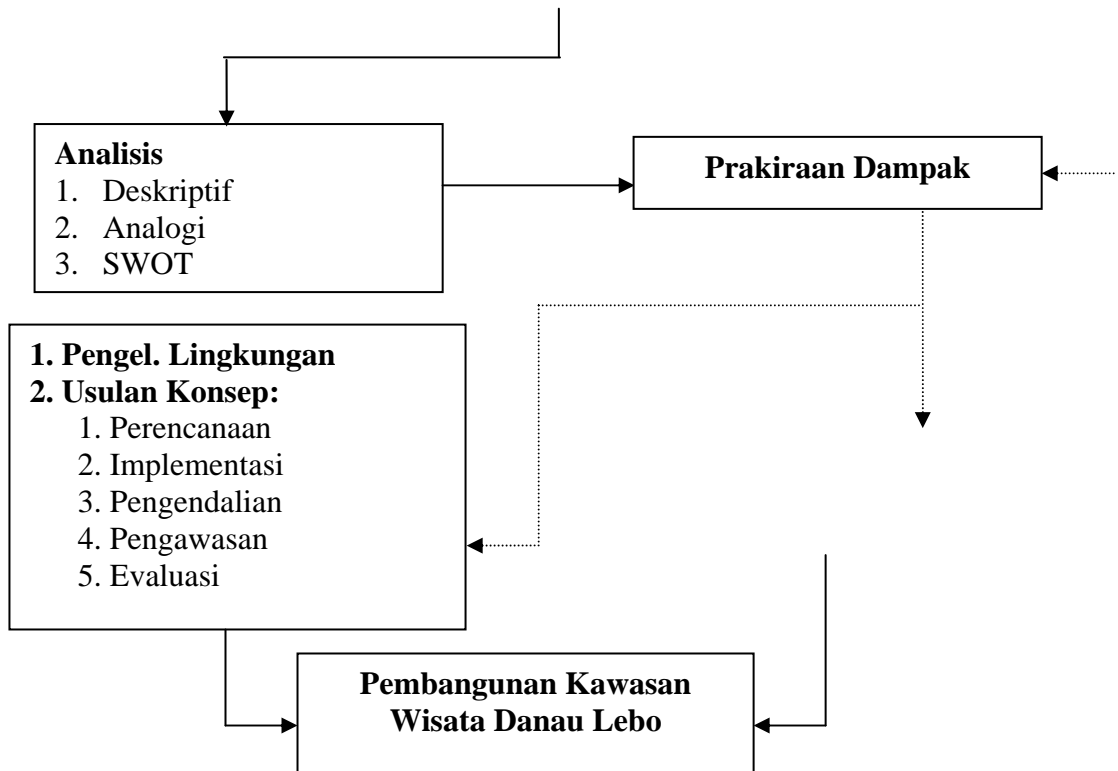
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas situasi dan kejadiannya. Karena itu pada tahap ini metode deskriptif ini tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.

Pada tahap berikutnya metode ini menurut Nawawi (1983) harus diberi bobot yang lebih tinggi, karena sulit untuk dibantah bahwa hasil penelitian yang sekedar mendeskripsikan fakta-fakta tidak banyak artinya. Untuk itu pemikiran di dalam metode ini perlu dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang akurat terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Dengan kata lain metode

ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itu penelitian ini dapat diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain. Dengan kata lain secara singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.

### 3.2 Alur Pikir Penelitian





Gambar 3.1 Alur Pikir Penelitian

### 3.3 Ruang Lingkup Penelitian

**Ruang lingkup penelitian ini adalah:**

- 1 Persepsi masyarakat tentang rencana pembangunan kawasan danau;**
- 2 Keadaan sosial ekonomi masyarakat;**
- 3 Pola pembangunan dan pemanfaatan danau;**
- 4 Adat istiadat dan nilai serta norma yang berkaitan dengan pemanfaatan danau;**
- 5 Sarana dan prasarana yang akan dibangun.**

Selain itu juga dikaji dan dianalisis tentang konsep pembangunan danau, batas-batas wilayah administratif, keadaan topografi, keadaan penduduk, keadaan fisik dan biologis danau,

**tata guna lahan serta dokumen mengenai kebijakan pembangunan.**

### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif. Jenis data ini diambil dari sumber data primer dan data sekunder. Menurut Wibisono, (2003) data kualitatif adalah data yang berbentuk keterangan-keterangan atau kategori yang mengandung makna kualitas dan bukan berbentuk bilangan yang tidak dapat dilakukan perhitungan dengan alat bantu statistik atau matematika. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan yang dapat dilakukan perhitungan dengan alat bantu statistik atau matematika.

**Sedangkan sumber data terdiri dari data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari para informan yang terpilih untuk diwawancarai dan hasil-hasil penelitian di lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari dinas atau instansi yang ada kaitannya dengan penelitian, seperti Dinas PU dan Pertamanan, Bappeda, Kantor Catatan Sipil, dan Badan Pusat Statistik. Data sekunder ini juga diperoleh dari kajian-kajian literatur. yang berkaitan dengan penelitian ini.**

### 3.5 Populasi Penelitian

**Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan erat dengan masalah yang ditelaah. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang cirri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Efendi, 1989). Ini berarti populasi merupakan kumpulan individu/objek penelitian yang memiliki kualitas-**

kualitas serta cirri-ciri yang telah ditetapkan Berdasarkan kualitas dan cirri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu/obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakter.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang mengetahui keberadaan dan pemanfaatan Danau Lebo yang bertempat tinggal di 4 desa yaitu Desa Mura yang terdiri dari 711 KK, Desa Sampir yang terdiri dari 980 KK, Desa Rempe yang terdiri dari 598 KK dan Desa Meraran yang terdiri dari 462 KK.

### 3.6 Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *Purposive Sample*. Teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penetapan ini didasarkan atas informasi yang mendahului (*previous knowledge*) tentang keadaan populasi. Penelitian hanya mengambil beberapa daerah atau kelompok kunci (*key areas, key groups or key clusters*).

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek sampling sebagai nara sumber adalah mereka yang selama ini memanfaatkan Danau Lebo sebagai sumber mata pencarian utama maupun sampingan. Untuk mendapatkan keseimbangan informasi serta persepsi, maka dipilih juga nara sumber yang tidak memanfaatkan Danau Lebo sebagai sumber penghidupan.

Adapun jumlah nara sumber tidak dibatasi namun melihat perkembangan informasi yang didapat oleh peneliti dari wawancara yang dilakukan. Adapun jumlah narasumber yang diwawancari seperti tercantum dalam table di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Nara Sumber Penggalan Informasi**

No	Lokasi	Nara Sumber			
		Tokoh Formal	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Biasa	Jumlah
<b>I</b>	<b>DESA</b>				
	Mura	1	3	5	9
	Sampir	1	3	5	9
	Rempe	1	3	12	16
	Meraran	1	3	15	19
<b>II</b>	<b>INSTANSI</b>				
	Camat Seteluk				1
	Sekcam Taliwang				1
	Bappeda				1
	Dinas PU & Pertamanan				1
	Dinas Pariwisata				2
<b>III</b>	<b>KONSULTAN</b>				
	PT.				1

	<b>Grahasindo Cipta Pratama</b>				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

### 3.7 Penentuan Daerah Sampel

**Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk. Secara purposive sampling, dari masing-masing kecamatan diambil dua desa yaitu Desa Mura dan Desa Sampir untuk Kecamatan Taliwang, serta Desa Rempe dan Desa Meraran untuk Kecamatan Seteluk. Keempat desa tersebut diambil sebagai sample atas dasar pertimbangan sebagai berikut; Desa Mura tidak ada penduduknya yang memanfaatkan Danau Lebo sebagai sumber penghidupan ataupun untuk mencari tambahan penghasilan; Desa Sampir sebagian kecil penduduknya memanfaatkan Danau Lebo sebagai sumber penghidupan ataupun untuk mencari tambahan penghasilan; Desa Rempe sebagian penduduknya memanfaatkan Danau Lebo sebagai sumber penghidupan ataupun untuk mencari tambahan penghasilan; dan Desa Meraran dipilih karena sebagian besar penduduknya memanfaatkan Danau Lebo sebagai sumber penghidupan ataupun untuk mencari tambahan penghasilan.**

**Alasan lain pemilihan keempat desa tersebut sebagai sample karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Danau Lebo, sehingga pembangunan kawasan ini akan sangat berpengaruh terhadap mereka, kecuali Desa Mura lokasinya jauh dari danau dipilih dengan pertimbangan untuk dijadikan sebagai pembanding terhadap respon yang diberikan dan mengetahui**

**dampak terhadap kawasan lain yang tidak mempunyai akses langsung ke Danau Lebo.**

### 3.8 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

**Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan/informasi untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang ditetapkan. Karena wawancara adalah proses tanya jawab langsung, maka informasi atau data yang diperoleh sangat tepat dan akurat untuk memberikan gambaran pada status obyek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat biasa yang selama ini mengetahui keberadaan dan pemanfaatan Danau Lebo. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan alat bantu berupa alat perekam dan alat tulis menulis.**

#### 2. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

**Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang dianggap mengetahui tentang kondisi masyarakat setempat. Selain itu wawancara mendalam ini dilakukan juga terhadap kalangan birokrasi yang mempunyai kaitan langsung dengan**

proses perencanaan pembangunan kawasan Danau Lebo.

### **3. Observasi**

Pengumpulan data dengan teknik observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan melihat langsung tanpa ada bantuan alat standar lain untuk keperluan penelitian. Dengan cara pengamatan langsung ini dapat dicatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya pada saat kejadian/prilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, data/keadaan yang langsung mengenai perilaku yang ditipikal dari obyek segera dapat dicatat tanpa menggantungkan data dari ingatan seseorang. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan data, jika pengamatan tersebut memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis.**
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan penelitian yang telah direncanakan.**
- c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.**

d. Pengamatan dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.

#### 4. Dokumenter/Pengumpulan Data Sekunder

Metode dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa benda-benda tertulis seperti majalah, dokumen, literatur, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya serta dokumentasi-dokumentasi visual lainnya. Penerapan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pelengkap tentang objek yang sedang diteliti.

Dalam melakukan wawancara biasa maupun wawancara mendalam, peneliti telah menetapkan beberapa nara sumber yang dipilih karena mereka dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui keadaan masyarakatnya dan juga dari tokoh formal karena mereka mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan maupun sebagai pemberi saran dalam pembangunan kawasan Danau Lebo. Untuk masyarakat biasa terutama untuk Desa Meraran, Sampir dan Rempe sebagian besar dari mereka diwawancarai pada saat mereka istirahat dari mencari ikan di tepi danau secara berkelompok maupun sendiri-sendiri dan beberapa orang di rumah yang bersangkutan. Tetapi untuk Desa Mura dilakukan di rumah masing-masing narasumber.

Dalam menggali informasi dari para nara sumber, digunakan *interview guide* sebagai panduan bagi pertanyaan-

**pertanyaan untuk wawancara yang diajukan kepada mereka terkait dengan pembangunan Kawasan Danau Lebo.**

### 3.8 Teknik Analisis Data

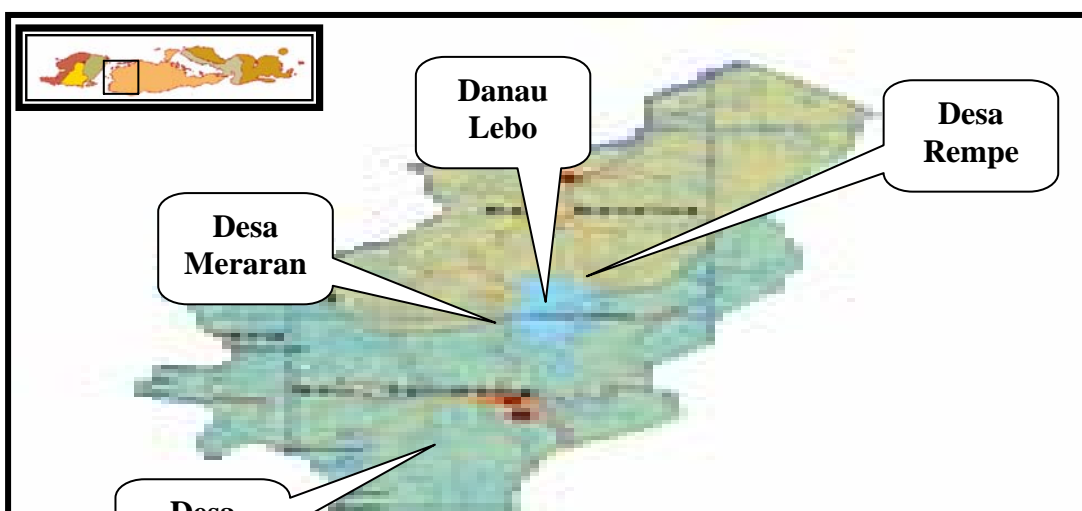
Data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber kemudian dianalisa secara kualitatif dengan mempertimbangkan pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak yang berkompetensi dengan masalah penelitian. Sedangkan teknik analisa yang lain yang digunakan yaitu analogi. Analogi merupakan upaya pencarian solusi dengan mengkaji masalah situasi yang serupa. Menggunakan metode analogi dalam menyelesaikan masalah merupakan dasar *synectics*. Proses *synectics* dimaksudkan untuk memberikan perspektif baru mengenai satu persoalan.

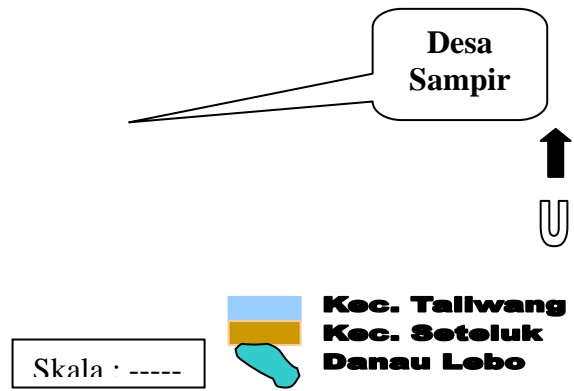
## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Seteluk dan Taliwang yang mencakup letak geografis, penduduk dan tenaga kerja, social, sarana perhubungan dan jaringan jalan. Selain itu diuraikan pula deskripsi Danau Lebo dari aspek luas dan letak, iklim, karakteristik maupun potensi yang bias dimanfaatkan dan dikembangkan di Danau Lebo.

Secara administratif kedudukan Danau Lebo terletak pada sebagian wilayah Desa Meraran di Kecamatan Seteluk dan Desa Sampir Kecamatan Taliwang. Sedangkan lokasi pembangunan kawasan tersebut terletak di tepi danau yang  $\pm 70 \%$  berada di wilayah Kecamatan Taliwang dan  $\pm 30 \%$  masuk dalam wilayah Kecamatan Seteluk. Selain itu, dalam hal pemanfaatan danau juga didominasi oleh masyarakat dari Kecamatan Taliwang dan Seteluk sehingga dalam pembangunan Kawasan Danau Lebo akan sangat berdampak terhadap masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Oleh karena kondisi dan batas wilayah administratif tersebut, maka fokus lokasi penelitian di prioritaskan pada dua kecamatan di atas.





**Gambar 4.1 Lokasi Penelitian**

#### 4.1 Kecamatan Seteluk

##### 3.2.1 Letak Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, disebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas 1.849,02 km<sup>2</sup> terbagi atas 5 kecamatan, 37 desa dan 131 dusun/lingkungan, Seteluk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, disamping 4 kecamatan lainnya. Kecamatan ini memiliki luas wilayah seluas 240,32 km<sup>2</sup>, dengan wilayah desa yang terluas adalah desa Mantar (25,32 %). Sementara itu jarak ibu kota kecamatan ke masing-masing desa cukup berdekatan yaitu berkisar antara 0,5 km hingga 12 km. Desa terjauh dari ibu kota kecamatan adalah desa Poto Tano.

Di kecamatan Seteluk pemanfaatan lahan sebagai sumber kehidupan penduduk seluas 24.032 ha berupa tanah sawah dan tanah kering. Topografi sebagian besar wilayahnya berbentuk bukit-gunung atau 45 % dari seluruh wilayah, kemudian 35 % datar berombak dan sisanya sebesar 20 % berombak bergunung. Dengan kondisi yang demikian maka dijumpai gunung Soak Sampar dengan ketinggian mencapai 750 m di atas permukaan laut, diikuti gunung Lamusung Mantar (550 m), gunung Lemar (375 m) dan gunung Selantang (250 m).

Wilayah Kecamatan Seteluk memiliki iklim tropis dengan curah hujan sebesar 1.971 mm dengan hari hujan sebanyak 109 hari. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Januari sampai

dengan Maret dengan rata-rata curah hujan 372 mm dan hari hujan 16 hari.

#### 4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk seringkali menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan di tanah air seperti jumlah yang besar, perkembangannya yang pesat, dan penyebarannya yang tidak merata. Jumlah penduduk yang besar memang dapat merupakan modal besar dalam pembangunan, akan tetapi bila tidak diiringi dengan keterampilan yang memadai maka justru akan merupakan beban berat bagi pemerintah, karena penduduk yang besar menuntut tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Dalam kaitannya dengan jumlah penduduk, pada tahun 2005 di kecamatan Seteluk tercatat sebanyak 24.653 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dikaitkan dengan luas wilayah seluas 240.32 km<sup>2</sup> maka setiap km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 103 jiwa. Kepadatan ini bergerak naik 7 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bila dilihat dari segi penyebarannya, maka untuk masing-masing desa di kecamatan Seteluk relatif merata, walaupun masih terlihat kesenjangan antara desa Seteluk Atas, Senayan dan Mantar disatu pihak dengan desa-desa seperti Meraran, Air Suning, Rempe dan UPT Tambak Sari dilain pihak. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kecamatan Seteluk yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, maka nampak jumlah perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Gambaran

ini akan lebih jelas bila diperhatikan *sex ratio* penduduk sebesar 94. Angka ini memberi makna bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 94 orang penduduk laki-laki.

Penduduk kecamatan Seteluk tergolong penduduk muda, karena proporsi penduduk usia anak-anak masih tinggi yaitu lebih dari 40 % sehingga mengakibatkan beban tanggungan anak terhadap penduduk usia produktif menjadi besar yaitu mencapai 85. Ini berarti ada sebanyak 85 anak yang menjadi beban tanggungan setiap 100 penduduk produktif.

Pada tahun 2005 kecamatan Seteluk dihuni oleh 7.007 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat masih sangat tergantung pada bidang pertanian, diikuti perikanan dan pegawai negeri. Sedangkan bidang perdagangan, industri, kehutanan dan lebih-lebih peternakan dan pengangkutan masih relatif kecil. Besarnya jumlah penduduk yang bergerak di bidang pertanian maupun perikanan tidak terlepas dari kondisi wilayah dan tingkat pendidikan penduduk yang sebagian besar hanya mencapai pendidikan dasar saja seperti SD yang mencapai 47 % dan SLTP 13 %, sedangkan sisanya berpendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.

#### 4.1.3 Sosial

Keberhasilan pembangunan bidang mental dan spiritual tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana dimaksud misalnya sarana

pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, bahkan sarana olah raga dan sarana lainnya.

Sarana pendidikan yang tersedia di kecamatan Seteluk, hingga tahun 2005 masih samapi tingkatan SLTA, yaitu SD sebanyak 24 buah, SLTP sebanyak 5 buah dan SLTA 1 buah. Untuk sarana kesehatan seperti Puskesmas tercatat 1 buah, Puskesmas Pembantu 6 buah dan tempat praktek dokter 2 buah. Disamping itu terdapat 27 posyandu, sebagian besar diantaranya memiliki status madya sedangkan yang berstatus mandiri tidak ada.

Keberadaan sarana pendidikan dan sarana kesehatan dilengkapi pula dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Di kecamatan Seteluk pada tahun 2004 terdapat sebanyak 221 orang guru yang terdiri dari 166 guru SD dan 55 orang guru SLTP. Dari angka ini berarti pada tiap SD terdapat rata-rata 7 orang tenaga pendidik sedangkan tiap SLTP ditunjang oleh rata-rata 11 orang guru (SLTA di kecamatan Seteluk dibangun pada akhir tahun 2005).

Dilihat dari jumlah murid di kecamatan Seteluk berdasarkan data sampai dengan tahun 2004 terdapat sebanyak 2.884 orang untuk tingkat SD dan 956 orang pada tingkat SLTP. Bisa dibandingkan dengan jumlah tenaga guru pada masing-masing tingkatan sekolah akan diperoleh ratio murid terhadap guru sebesar 17 untuk SD dan 11 untuk SLTP.

Untuk sarana kesehatan terdapat 26 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 orang dokter, 16 orang mantri

kesehatan/perawat dan 8 orang bidan. Sementara itu mitra kerja bidan yang sudah terlatih seperti dukun bayi dijumpai sebanyak 18 orang. Dalam partisipasi penduduk terhadap KB, di kecamatan Seteluk terlihat cukup besar, ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah PUS yang telah mengikuti KB aktif sekitar 71,39 %, dengan alat kontrasepsi yang biasa dipakai berupa suntikan, implan, pil, IUD dan lainnya.

Dalam kaitannya dengan sarana peribadatan, mengingat mayoritas penduduk beragama islam (96,90 %) maka fasilitas yang ada utamanya berupa mesjid dan langgar. Sarana lain yang tidak kalah pentingnya adalah sarana olah raga. Sarana ini berupa lapangan sepak bola 15 buah, lapangan bola volly 11 buah dan bulu tangkis 8 buah serta tenis meja 17 buah.

#### 4.1.4 Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan merupakan sarana yang cukup penting dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu wilayah. Ketersediaan sarana di Kecamatan Seteluk relatif terbatas. Terbatasnya sarana ini terlihat dari minimnya jenis jalan dengan panjang yang relatif pendek.

Panjang jalan di kecamatan Seteluk tercatat sepanjang 108,90 km. Dari panjang tersebut hanya 41 km atau 37,80 % merupakan jalan yang diaspal, sedangkan sebagian besar yang lainnya berupa jalan diperkeras dan jalan kerikil. Kondisi di atas dapat dianggap sebagai penyebab minimnya jumlah sarana angkutan jalan bermotor yang berupa bus dan truk. Sementara

sarana angkutan tidak bermotor terdapat dalam jumlah yang cukup banyak.

Selain sarana berupa jaringan jalan, sarana yang juga cukup berperan dalam sektor perhubungan adalah sarana komunikasi. Untuk sarana komunikasi, radio merupakan yang terbanyak dimiliki masyarakat di kecamatan Seteluk diikuti televisi. Sedangkan sarana lainnya yang relatif modern seperti telepon tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas. Besarnya rasio radio terhadap penduduk tercatat 35 dan televisi 32. angka ini menunjukkan bahwa untuk satu buah radio didengarkan oleh 35 orang penduduk dan satu buah televisi ditonton oleh 32 orang.

## 4.2 Kecamatan Taliwang

### 4.2.1 Letak Geografis

Salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat adalah kecamatan Taliwang, merupakan ibukota Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke ibu desa dalam wilayah kecamatan relatif dekat, ini dapat dilihat dari jarak ditempuh untuk mencapai desa terjauh hanya mencapai 13 km yaitu ke desa Lalar Liang.

Kecamatan Taliwang hanya terdiri dari 11 desa dan memiliki luas 516,83 km<sup>2</sup>. Dari luas tersebut 36,67 % merupakan wilayah Desa Menala, 11,87 % Desa Sampir, dan 10,78 % adalah wilayah Desa Kalimantong, selebihnya adalah wilayah desa-desa seperti Desa Dalam, Bugis, Labuhan Lalar, Mura, Kuang, Lalar

**Liang, Labuhan Kertasari dan Seloto dengan luas berkisar di bawah 10 %.**

**Wilayah kecamatan Taliwang berbatasan dengan beberapa kecamatan lain diantaranya sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Seteluk dan Kecamatan Brang Rea, di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Batulantek Kabupaten Sumbawa, serta sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas.**

**Dilihat dari luas penggunaan tanah, tanah kering memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan tanah sawah. Ini dapat dilihat dari besarnya persentase yang mencapai 94,2 %. Dari tanah seluas 68,703 ha tersebut sebagian besar merupakan hutan negara dan sisanya adalah tambak, tegal, ladang, pekarangan, kebun dan lainnya. Kondisi tanah yang demikian tidak terlepas dari kondisi hari hujan dan besarnya curah hujan yang terjadi di kecamatan Taliwang. Walaupun hari hujan terjadi hampir sepanjang tahun, tetapi hari hujannya hanya sebanyak 95 hari dari 360 hari yang ada. Dengan hari hujan tersebut, maka curah hujan selama tahun 2005 sebesar 2.156 mm dengan rata-rata 179 mm per bulan.**

#### **4.2.2 Penduduk dan Tenaga Kerja**

**Menurut konsep Sensus penduduk tahun 2000 , yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6**

bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 tahun tetapi bertuan untuk menetap. Berdasarkan konsep tersebut, jumlah penduduk di Kecamatan Taliwang tahun 2005 tercatat sebanyak 38.624 jiwa, yang terdiri dari 19.544 laki – laki dan 19.080 perempuan. Jika dirinci per desa, maka jumlah terbanyak terdapat di desa Dalam, diikuti desa Menala dan desa Kuang, yaitu masing – masing sebanyak 8.248 jiwa, 6.140 jiwa dan 5.901 jiwa, sedangkan yang paling sedikit yaitu desa Lalar Liang dengan jumlah penduduk sebesar 1.218 jiwa yang terdiri dari 557 laki – laki dan 661 perempuan.

Memperhatikan masalah penduduk menurut jenis kelamin maka dapat diketahui angka sex ratio di Kecamatan Taliwang yaitu sebesar 120. Ini artinya untuk 100 orang wanita terdapat 102 orang laki – laki. Dengan kata lain, tahun 2005 pada sebagian besar desa di Kecamatan Taliwang jumlah penduduk wanita relatif lebih sedikit dibandingkan penduduk pria. Hanya desa Bugis yang mempunyai penduduk wanita lebih banyak dari penduduk pria.

Dikaitkan dengan luas wilayah seluas 516,83 km<sup>2</sup>, maka tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Taliwang untuk tahun 2005, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 75 jiwa km<sup>2</sup>. Angka tersebut menggambarkan bahwa penduduk di Kecamatan Taliwang masih relatif jarang.

Jarangnya jumlah penduduk di Kecamatan Taliwang akan lebih nampak bila diperhatikan pada masing-masing desa, karena dari 11 Desa yang ada hanya 4 Desa yang kepadatan

penduduknya diatas 100 jiwa per km<sup>2</sup>, yaitu Desa Kuang, Dalam, Bugis dan Labuan Lalar. Sementara Desa-Desa lainnya memiliki kepadatan di bawah 100 jiwa per km<sup>2</sup>. Bila ditelusuri lebih lanjut, terlihat perbedaan. Desa Menala di satu sisi memiliki kepadatan hanya 32 jiwa per km<sup>2</sup>, disisi lain Desa Kuang kepadatannya mencapai 238 jiwa per km<sup>2</sup>. Padatnya penduduk di desa Kuang adalah merupakan sesuatu yang wajar, mengingat desa ini merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Taliwang disamping karena luas wilayahnya merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan desa- desa yang lainnya. Sedangkan desa Menala merupakan desa yang memiliki luas terbesar di kecamatan Taliwang yaitu mmencapai 36,67 % dari seluruh luas kecamatan.

Banyaknya jumlah penduduk dan beragamnya potensi baik alam maupun modal yang tersedia akan dapat memberi warna terhadap keragaman jenis lapangan pekerjaan yang digeluti warga masyarakat. Di kecamatan Taliwang, lapangan pekerjaan yang paling dominan digeluti masyarakat adalah pertanian dalam arti sempit, diikuti lainnya, kemudian pegawai negeri, perdagangan, dan industri. Sedangkan yang paling sedikit adalah angkutan dan kehutanan.

#### 4.2.3 Sosial

Mengiringi derap langkah pembangunan dalam milenium ketiga ini kebutuhan pendidikan bukan semata merupakan milik segelintir orang, akan tetapi sudah merupakan kebutuhan bagi

**hampir setiap manusia. Adanya gambaran kearah itu setidaknya mulai terlihat di wilayah kecamatan Taliwang, yaitu nampak dari makin menurunnya jumlah penduduk yang tidak sekolah. Lebih lanjut hal ini dapat mencerminkan bahwa pendidikan bagi sebagian besar masyarakat sudah mengarah menjadi kebutuhan dasar sebagaimana halnya kebutuhan akan makan dan perumahan.**

**Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut tersedia-tidaknya sarana dan prasarana pendidikan merupakan syarat utama. Sarana pendidikan yang berupa sekolah dan juga guru dalam kualitas dan kuantitas yang memadai menjadi penting artinya. Jumlah sekolah di kecamatan Taliwang tahun 2004 tercatat sebanyak 32 SD, 5 SLTP dan 3 SLTA. Sedangkan tenaga pengajar tercatat sebanyak 252 orang untuk SD, 81 orang untuk SLTP, dan 46 orang untuk tingkat SLTA. Dalam jumlah tersebut terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap.**

**Dengan adanya kemajuan dalam bidang pendidikan menyebabkan bidang kesehatan juga menjadi penting. Hal ini karena tingkat pendidikan masih dianggap memiliki korelasi positif dengan tingkat kesehatan. Namun demikian sarana kesehatan yang tersedia di kecamatan Taliwang masih dirasa kurang, karena di wilayah ini hanya terdapat 1 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu, bahkan ada 1 desa yang belum memiliki sarana kesehatan yang berupa puskesmas. Walaupun demikian tenaga kesehatan seperti paramedis dan dukun bersalin sudah hampir tersedia secara merata pada tiap-tiap desa.**

Sarana lain yang secara tidak langsung juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan adalah tersedianya lapangan olah raga. Jumlah lapangan olah raga di kecamatan Taliwang 61 buah yang terdiri dari lapangan sepak bola 7 buah, lapangan volly 20 buah, lapangan bulu tangkis 17 buah, lapangan basket 4 buah, dan lapangan sepak takraw 13 buah.

Tersedianya fasilitas kesehatan masyarakat di kecamatan Taliwang juga tidak terlepas dari kondisi pemukiman. Pemukiman yang dimaksud adalah jenis rumah yang ditempati oleh sebagian besar masyarakat yang pada tahun 2004 berupa rumah kayu dan tentu saja telah memenuhi syarat sebagai rumah yang layak huni. Jenis perumahan yang ditempati dari tahun ke tahun terlihat mengalami pergeseran mulai dari rumah tanah sampai rumah permanen. Adanya pergeseran tersebut dapat memberi petunjuk bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.

#### 4.2.4 Jaringan Jalan

Kondisi jalan yang ada di kecamatan Taliwang adalah sepanjang 122,5 km dengan porsi terbesar berupa jalan aspal, diikuti dengan panjang jalan dari tanah sepanjang 30,5 km dan jalan yang diperkeras 25 km. Dengan kondisi tersebut pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor cukup pesat.

### 4.3 Deskripsi Danau Lebo

#### 4.3.1 Luas dan Letak Danau Lebo

Danau Lebo merupakan salah satu danau yang tersebar di seluruh Indonesia, yang potensi penyediaan airnya masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Air Danau Lebo berasal dari sungai Suning, sungai Seran, dan luapan banjir dari sungai Brang Rea, dengan luas daerah tangkapan total sebesar 86 km<sup>2</sup> dari arah Seteluk Utara.

Danau Lebo terletak di dua wilayah kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk. Kecamatan Taliwang berada pada ketinggian ± 15 m dari permukaan laut dan Kecamatan Seteluk berada pada ketinggian ± 50 m dari permukaan laut. Adapun luas keseluruhan Danau Lebo yang masuk ke dalam dua wilayah kecamatan tersebut adalah; 70 % berada di wilayah Kecamatan Taliwang sedangkan sisanya sekitar 30 % berada di wilayah Kecamatan Seteluk (Bappeda Tk.II Sumbawa, 1999)

Danau Lebo sesungguhnya merupakan daerah tangkapan air (*Water Catchment Area*) bagi kawasan perbukitan sekitarnya. Sekitar 70 % luas kawasan berada di wilayah Kecamatan Taliwang, luas arealnya adalah 842,5 Ha. Luas ini belum termasuk luas pinggir danau tersebut. Sementara itu, Danau Lebo memiliki kedalaman air hingga ± 10 m (Bappeda Tk.II Sumbawa, 1999). Secara keseluruhan, luas total lahan kawasan Danau Lebo adalah 2.136,915 Ha, sebagaimana rincian yang tercantum dalam table berikut..

**Tabel 4.1**  
**Luas Lahan Kawasan Danau Lebo**

No	Penggunaan Lahan Kawasan	Luas	Luas Total
----	--------------------------	------	------------

		(Ha)	(Ha)
<b>I</b>	<b>Danau Lebo</b>		
<b>1</b>	<b>Badan Air</b>	<b>1.045,900</b>	<b>1.045,900</b>
<b>II</b>	<b>Darat Sekitar Danau Lebo</b>		
<b>1</b>	<b>Sawah</b>	<b>367,500</b>	
<b>2</b>	<b>Kebun Campuran</b>	<b>39,510</b>	
<b>3</b>	<b>Pemukiman Penduduk</b>	<b>25,480</b>	
<b>4</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat (Sepanjang Jalan Raya Taliwang)</b>	<b>46,790</b>	
<b>5</b>	<b>Kawasan Perbukitan</b>	<b>611,735</b>	
			<b>1.091,015</b>
	<b>Luas Total Kawasan Danau</b>		<b>2.136,915</b>

*Sumber : Bappeda Kab. Dati II Sumbawa (1999)*

Dari luas areal tersebut, ternyata pemanfaatan potensi kawasan Danau Lebo ini adalah untuk beberapa sektor baik bagi produksi sektor primer, maupun sektor lainnya belum optimal. Menilik kawasan Danau Lebo ini maka yang terlihat saat ini adalah hampir keseluruhan permukaan airnya ditumbuhi oleh tanaman eceng gondok dan teratai, sehingga untuk beberapa sektor primer yang seharusnya dapat dikembangkan dari potensi yang ada seperti sektor perikanan dan sektor pariwisata belum dapat termanfaatkan secara maksimal.



**Gambar 4.2**  
**Danau Lebo yang Ditutupi Teratai dan Eceng Gondok**

#### 4.3.2 Iklim

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, daerah ini termasuk daerah beriklim tropis. Musim kemarau lebih panjang dari musim hujan, namun sangat menyenangkan karena udara kering dan banyak matahari bersinar. Iklim wilayah daerah Kabupaten Sumbawa Barat menurut klasifikasi Semidt dan Ferguson terdiri dari 3 tipe, yaitu Tipe C, Tipe D, dan Tipe E. Untuk iklim kawasan Danau Lebo dikategorikan pada Tipe D (Nilai  $Q = 80\% - 100\%$ , rata-rata curah hujan pada kisaran 1.826 mm – 1.934 mm per tahun).

Curah hujan kawasan Danau Taliwang mulai turun pada bulan Oktober hingga Mei, dengan curah hujannya hanya 60 – 70 mm per hari. Suhu rata-rata bervariasi antara 22,33°C sampai dengan 26,61°C, tekanan 1.009,0 hingga 1.012,0 MBS. Tekanan

udara maksimum terjadi pada bulan Juli – September sedangkan tekanan udara minimum terjadi pada bulan November – Januari.

Pada saat awal musim hujan, pegunungan dan ladang di sekitar danau menjadi hijau segar. Para petani menyiapkan persemaian untuk pertanaman padi musim hujan. Pada saat itu permainan rakyat “Kerapan Kerbau” (Sumbawa: Barapan Kebo) dilangsungkan dimana-mana sebagai ungkapan kegembiraan menyambut musim tanam.

#### 4.3.3 Karakteristik Danau Lebo

Kawasan Danau Lebo merupakan habitat yang baik bagi burung-burung air dan tersedia lokasi bertelur dan bersarang pada bukit-bukit di sekitarnya, yaitu bukit Cerme, Sepang, Penyiong, Barabatu dan Bukit Liu serta Jorok Bengkal. Berbagai macam jenis flora sebagai vegetasi asli type hutan tropis terdapat dalam komplek hutan danau ini. Jenis-jenis tersebut antara lain: lita (*Alstonia scholaris*), berora (*Klenhovia hosvita*), ketimus (*Proium javanicum*) dan bungur (*Lagerstoemia indica*), jenis tumbuhan air yang menutup perairan danau berupa teratai dan eceng gondok, bahkan dirasa telah mengalami *blooming* dan mengganggu jenis-jenis lain.

Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, kawasan hutan sekitar danau menyimpan berbagai jenis fauna, utamanya satwa-satwa penghuni habitat air tawar, satwa-satwa tersebut meliputi jenis burung antara lain: bangau hitam (*Liconia episcopus*), itik liar (*Cairima scutulata*), dan kundul putih (*Egreta*

*egretta*) serta burung pelikan (*Pelicanedae*). Jenis burung terakhir ini merupakan jenis burung migran, yang berasal dari Australia. Babi hutan, kera abu-abu dan ayam hutan juga terdapat pada daerah perbukitan sekitar danau, berbagai jenis reptil seperti ular sanca/sawah, bulus/kura-kura dan biawak menempati lokasi bagian selatan Danau Lebo.

#### 4.3.4 Potensi Danau Lebo

Danau Lebo mempunyai potensi yang cukup banyak selain sebagai kawasan konservasi antara lain, yaitu:

1. Sebagai cadangan air untuk pengairan di Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Sebagai aset wisata danau dengan pemandangan yang cukup bagus;
3. Sebagai sarana budidaya perikanan.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan ini untuk sementara diperkirakan dapat menghambat rencana pengelolaan dan pemanfaatan Danau Lebo sebagai salah satu sumber air dikawasan tersebut antara lain :

1. Berkembangnya tumbuhan pengganggu (gulma air dan teratai);
2. Terjadinya sedimentasi dan erosi pada tepian danau sehingga terjadi pendangkalan dasar danau;
3. Terjadi banjir akibat hal tersebut diatas sehingga meluap ke jalan raya;
4. Pembuangan limbah dan pencemaran kualitas air;

5. Penurunan produksi ikan;
6. Luasnya lahan yang perlu ditangani;

Dari permasalahan tersebut di atas, beberapa langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, antara lain:

1. Pembersihan permukaan danau pada tempat-tempat yang akan dijadikan tempat pariwisata;
2. Pembuatan plengsengan/talud pencegah lonsor;
3. Secara berkala dinas terkait memantau kondisi danau dan melakukan penanggulangan.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan antara lain tentang kehidupan sosial masyarakat sekitar Danau Lebo, konsep perencanaan Danau Lebo oleh Pemkab Sumbawa Barat, rencana penataan kawasan dan sarana serta prasarana yang akan dibangun, prakiraan dampak sosial pembangunan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata, persepsi masyarakat terhadap pembangunan tersebut, usulan pengelolaan lingkungan dan alternative kegiatan wisata di kawasan Danau Lebo. Di samping itu diuraikan juga tentang analisis terhadap konsep perencanaan tersebut.

Sejumlah butir penting yang mencerminkan prinsip pariwisata berkelanjutan muncul pada beberapa produk hukum

antara lain UU No. 9/1990 tentang Kepariwisata dan GBHN 1999. Walaupun paradigma pembangunan berkelanjutan belum menjadi wacana publik, nilai-nilainya dalam UU No. 9/1990 sudah ditemukan di beberapa pasal secara parsial. Sebut saja, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, berbasis budaya dan integrasi sosial, *bottom-up* dan ekoturisme.

UU No. 9/1990 tentang Kepariwisata di samping menyiratkan penyelenggaraan pariwisata yang memperhatikan kelestarian, keseimbangan, keterpaduan ekologi dan keberlanjutan, juga telah menempatkan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan. GBHN 1999 tampak makin memberi arah keberlanjutan yang jelas dalam pariwisata, seperti menempatkan pariwisata berpijak pada kebudayaan tradisional, sebagai wahana persahabatan antarbangsa, serta juga mendorong ekonomi kerakyatan.

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka dalam pembangunan Kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang perlu diperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan eksistensi lingkungan yang ada baik dari aspek fisik, biologi maupun sosial sehingga dalam perkembangannya ke depan pembangunan kawasan ini dapat memberikan makna positif sesuai dengan hakekat pembangunan yaitu menuju pada perubahan yang lebih baik. Untuk itu sebagai langkah awal dalam kegiatan pembangunan kawasan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi lingkungan terutama karakteristik lingkungan sosial

dalam hal ini adalah masyarakat dan dampak-dampak dari pembangunan yang dilakukan dengan melakukan studi-studi yang diperlukan, agar di dapat suatu model pembangunan yang sesuai dengan yang diinginkan yang menurut Hadi (2005) bahwa salah satu konsep tentang studi dampak sosial bertolak dari pemikiran bahwa masyarakat itu dipandang sebagai suatu bagian dari ekosistem. Perubahan dari salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem yang lain.

Selain itu perlu diketahui konsep kebijakan perencanaan dari pemerintah yang dipadukan dengan kondisi masyarakat serta eksisting alam secara fisik sehingga didapat suatu model perencanaan yang menggabungkan antara aspek teknis dan model pemberdayaan masyarakat.

## 5.1 Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar Danau Lebo

### 5.1.1 Masyarakat Samawa

Satu hal yang penting dicatat dari masyarakat sekitar Danau Lebo adalah sikapnya yang terbuka dan mudah menerima perubahan dari alam pikiran modern tanpa meninggalkan nilai-nilai lama.

Perubahan-perubahan itu tidak hanya menyangkut perubahan sistem sosial, tetapi juga menyangkut perubahan sistem pemerintahan, perubahan sistem pendidikan, perubahan nilai, pergeseran status dalam kehidupan masyarakat, munculnya kelompok-kelompok baru dalam masyarakat dan lain sebagainya. Sistem sosial budaya dari masyarakat sekitar Danau Lebo saat ini

sangat dipengaruhi oleh sistem budaya Bugis-Makasar dengan kerajaan Goa (Makasar-Tallo), sistem birokrasi pemerintah kolonial Belanda, pengaruh politik dan sosial dari penduduk Jepang (Raba, 2003).

Selain itu, seperti masyarakat Samawa pada umumnya, masyarakat sekitar Danau Lebo adalah masyarakat yang memandang bahwa harga diri dan kehormatan adalah masalah yang prinsip dalam kehidupan manusia. Mereka yang telah kehilangan harga diri dan kehormatannya, telah disifatkan sebagai “bangkai hidup” yang tidak ada harganya lagi. Hal ini terungkap dalam prinsip masyarakat tersebut yang disebut “*ila*”, atau “*siri*” pada masyarakat Bugis-Makasar. Tentunya, karena ratusan tahun budaya makasar bersatu dan lebur dengan budaya masyarakat setempat. Apalagi selama kurun tersebut telah terjadi percampuran darah antara manusia Bugis-Makasar dengan Tau Samawa.

Namun yang lebih penting lagi dari masyarakat sekitar Danau Lebo adalah adanya sikap santun dan hormat terhadap sesamanya melalui prinsip kesetaraan yang hakiki. Masyarakat setempat memperlakukan sesama manusianya melalui tiga prinsip utama, yaitu: *Saling Beri, Saling Pedir dan Saling Satingi*. Hal ini melahirkan sikap yang santun dalam berfikir, santun dalam berbicara, dan santun dalam berbuat.

Dari semua itu melahirkan masyarakat yang cepat menerima nilai-nilai perubahan yang umumnya berupa alam

**pikir pembaruan, baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan.**

**Dengan bermodalkan pada perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan, maka dapat dibayangkan betapa kadar kesadaran masyarakat terhadap kemajuan telah jauh memadai. Dalam soal kesehatan dan kebersihan misalnya, masyarakat sekitar Danau Lebo tidak perlu lagi harus bergelut dengan masalah-masalah mendasar seperti yang dihadapi tempat-tempat lain. Sehingga persoalan-persoalan seperti gizi, protein dan bahkan juga program KB tidak terlalu sulit diperkenalkan kepada masyarakat. Demikian pula dalam bidang pemukiman dan perumahan, masyarakat sekitar Danau Lebo sudah maju.**

**Indikator kemajuan masyarakat sebagai terwujud dari sikap terbuka dan mudah menerima hal-hal yang baru serta keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dapat diperiksa dengan mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang dikenal dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) masyarakat dibandingkan dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Dalam indeks ini tergabung tiga aspek sekaligus, masing-masing angka kematian bayi (AKB), angka harapan hidup pada usia satu tahun, dan angka bebas buta huruf pada usia di atas 10 tahun.**

### **5.1.2 Jenis Mata Pencaharian**

Pada masyarakat tradisional sekitar Danau Lebo dikenal beberapa sistem mata pencaharian, yaitu penangkap ikan tradisional, bertani, berburu (*nganyang*) dan meramu. Tidak ada istilah khusus untuk meramu ini. Untuk pergi *nganyang*, diperlukan sejumlah peralatan seperti *tear* (tombak), *poke* (tombok bermata kail), *jaring*, *lamar* atau *lonong* (bentangan tali yang digantung pada tempat tertentu seperti jerat), dan anjing pemburu (*asu*). Binatang utama yang diburu adalah rusa baik untuk keperluan sendiri maupun sebagai suatu mata pencaharian.

Untuk kegiatan *meramu*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan makanan seperti *gadung*, *serampin* (sari batang enau), pucuk rotan (*bungkang*), kemiri, daun pakis, jamur-jamuran, umbi-umbian dan sejenis mentimun kecil.

Dalam menangkap ikan, masyarakat sekitar Danau Lebo menangkap ikan di danau tersebut dengan menggunakan alat pancing, jala dan juga alat yang disebut *kodong* yang dipasang di mulut *rangkap* yaitu tempat memelihara ikan secara kecil-kecilan ataupun di atas *tiu*, yaitu bagian danau yang dalam. Cara-cara lain untuk menangkap dan mencari ikan adalah dengan *nima*, yaitu menguras habis air di tempat-tempat yang diperkirakan banyak ikannya. *Nyulu*, yaitu mencari ikan dengan membawa suluh atau lampu petromax. Membuat *belat* yaitu alat yang dibuat dari *kre* yang dipasang ditempat penangkapan ikan. *Bagang*, yaitu bangunan yang dibuat khusus untuk menangkap ikan di danau yang dibawahnya ada jarring. Disamping itu dengan alat

lain tetapi dibagian danau yang dangkal yaitu seperti *ngama* (mencari ikan dengan menggunakan tangan), *nyorok*, *mana* (menggunakan panah) dan sebagainya.

Kegiatan berladang juga dilakukan oleh masyarakat sekitar danau pada bukit-bukit yang ada disekitarnya atau oleh masyarakat setempat disebut *merau*.

Beberapa masyarakat yang memiliki hewan ternak seperti kerbau, sapi, kuda maupun kambing, dalam memelihara ternaknya bisaanya hanya melepas ternaknya ke padang penggembalaan atau yang disebut dengan istilah *lar*.

### 5.1.3 Sistem Kepercayaan

Masyarakat sekitar Danau Lebo seluruhnya adalah penganut agama Islam. Namun beberapa kalangan dalam kehidupan sehari-hari mereka percaya bahwa pohon-pohon besar atau batu-batu besar atau tempat-tempat yang angker ada *baengna* (ada yang punya). Kalau melewati tempat tersebut tidak boleh ribut, dan harus sopan. Kalau tidak bisa *disapa* atau ditegur oleh mahluk halus tersebut, dan jatuh sakit. Mahluk-mahluk halus tersebut ada yang mereka namakan *kono* (mahluk halus yang suka berkeliaran siang hari ditempat sepi), *baki* (mahluk halus di hutan), *setan belata* (hantu jahat), *leak* (manusia yang menyerupai mahluk halus), *jin* (menurutnya ada yang kafir dan ada yang islam).

Sistem kepercayaan masyarakat sekitar Danau Lebo juga percaya pada adanya guna-guna (*black magic*) untuk menundukkan lawan. Penggunaannya banyak dijumpai pada kerapan kerbau (*barapan kebo*) atau pacuan kuda (*maen jaran*) dan juga dilepas pada orang yang mencari ikan di danau agar tidak mendapatkan hasil tangkapan (*salemer*). Dikenal dua jenis *black magic*; yaitu *sihir* yang konon dilepas seperti angin, dan *bura* yang dilepas ditempat-tempat yang diperkirakan akan dilalui oleh lawan. Di tempat-tempat perhelatan seperti acara resepsi perkawinan juga olahraga hal ini juga dilakukan. Karena itu, setiap ada perhelatan atau kegiatan tertentu, selalu ada pendamping, yaitu *sandro* (dukun) yang bertugas mengawasi agar segala sesuatu bisa berjalan lancar.

Ada orang-orang yang sakti berupa kekebalan masih sangat dipercaya oleh masyarakat sekitar Danau Lebo. Demikian pula dengan adanya benda-benda pusaka seperti keris dan golok yang punya kesaktian. Hal ini mereka yakini karena orang-orang atau benda tersebut ada disekitar mereka atau bahkan mereka sendiri yang memilikinya.

#### 5.1.4 Sistem Gotong Royong

Masyarakat sekitar Danau Lebo mengenal tiga sistem gotong royong, yaitu: *saling tulung* (saling tolong menolong), *basiru* (saling tolong menolong untuk pekerjaan yang ditujukan hasilnya untuk seseorang), dan ketiga adalah *nulung* (membantu).

**Baik *saling tulung*, *basiru* maupun *nulung*, bisaanya tidak hanya dalam bentuk material tapi juga tenaga. *Saling tulung* bisa diartikan sebagai pemberian pertolongan yang akan dibalas pada kesempatan lain.**

***Basiru* lebih pada pengertian pengajak beramai-ramai mengerjakan sesuatu pekerjaan yang nantinya juga akan beramai-ramai mengerjakan pekerjaan dari yang lainnya. *Nulung*, lebih dikhususkan pada adanya imbalan berupa jasa atau materi.**

#### **5.1.5 Ketergantungan Masyarakat Terhadap Kawasan Danau**

Di samping bertani dan berladang, masyarakat sekitar danau juga secara turun-temurun mencari ikan di Danau Lebo. Mereka pun menggunakan alat-alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan seperti pancing, jala, jaring, kodong, rangkap, maupun bagang. Masyarakat juga sering berburu di bukit sekitar danau. Daging buruan menjadi makanan tambahan atau dijual. Jenis hewan buruan yang terdapat di sana adalah rusa, kijang, dan pelanduk. Karena sebagian besar masyarakat setempat adalah muslim, babi tidak mereka buru. Babi hanya di buru oleh masyarakat desa lain yaitu Desa Kokar Lian yang merupakan transmigran asal Bali. Selain itu masyarakat juga masih gemar dengan kegiatan berladang dengan memanfaatkan beberapa bukit yang ada di kawasan Danau Lebo

Namun, dengan adanya rencana pembangunan terhadap kawasan Danau Lebo dikhawatirka lahan untuk berladang dan berburu kian sempit. Hadirnya sarana dan prasarana serta perubahan pola kepemilikan terhadap lahan dan wilayah tangkapan ikan membuat penduduk tidak suka lagi berladang, dan menyebabkan mereka sulit untuk mengklaim wilayah kelola mereka yang sudah turun-temurun mereka manfaatkan.

Masyarakat sekitar danau sampai saat ini sebagian besar tidak mengenal adanya surat kepemilikan lahan atau pengakuan dari negara. Di dalam

masyarakat, suatu kepemilikan lahan hanya ditandai dengan adanya pengakuan dari warga lain tanpa bukti-bukti formal yang seharusnya mereka miliki. Lokasi bekas ladang yang produktif dan dijadikan kebun dipelihara dengan baik. Sedangkan apabila bekas ladang tersebut tidak dikelola atau dijadikan kebun atau dibiarkan menjadi hutan, maka semua orang boleh memanfaatkan lokasi tersebut secara bersama. Saat ini pola-pola kepemilikan tradisional itu masih bias dijumpai tetapi di beberapa lokasi masyarakat mulai melupakan pola-pola kepemilikan tradisional tersebut. Masyarakat juga mengklaim tentang siapa yang pertama kali membuka untuk berladang atau berkebun, agar lahannya bisa dijual ke pemerintah.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa bagi masyarakat sekitarnya Danau Lebo mempunyai fungsi ekonomi yang sangat tinggi. Salah satu fungsi terpenting adalah perikanan baik budidaya maupun perikanan tangkap. Danau Lebo juga mempunyai fungsi dari segi tata air (mencegah banjir dan kekeringan) dan dalam kaitannya dalam penyediaan air untuk irigasi. Dengan demikian danau ini mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan. Pembangunan danau ini sebagai kawasan wisata akan memicu ekonomi masyarakat yang tinggal di sekelilingnya. Akan tetapi pemanfaatannya untuk kegiatan wisata ini harus dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan terkendali, karena jika danau ini rusak otomatis orang-orang tidak akan tertarik lagi untuk mengunjunginya untuk berwisata.

Bagi masyarakat setempat, Kawasan Danau Lebo menjadi sumber penghidupan. Danau sudah pasti menjadi sumber air, sumber makanan, sumber mata pencaharian, irigasi, dan perikanan. Danau Lebo bahkan juga amat vital untuk menunjang kegiatan pertanian tradisional warga yang irigasinya sangat tergantung pada suplai air dari danau ini.

Dari penelitian yang dilakukan, saat ini terdapat sekitar 2.500 orang yang terdaftar sebagai anggota Kelompok Nelayan Perikanan Darat dan mendapatkan Kartu Biru. Dari jumlah tersebut 935 orang adalah yang benar-benar bermata pencarian sebagai nelayan di Danau Lebo dan dari jumlah tersebut sekitar 250 orang yang setiap hari mengais rejeki di danau ini.

Apabila kawasan ini dibangun seperti rencana Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu sekitar 10 Ha, maka luas daerah tangkapan mereka akan menjadi berkurang yang akan berimplikasi pada tingkat pendapatan mereka.

Sumberdaya hayati yang diperoleh masyarakat dari kawasan danau dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: **(a) produktif**, yaitu yang diperjual belikan di pasar, dan **(b) konsumtif**, yaitu yang dikonsumsi sendiri atau tidak dijual.

Dilihat dari mata pencahariannya, hampir seluruh masyarakat Desa Meraran dan Rempe bergantung hidupnya dari hasil danau. Sebagian besar masyarakat bergantung hidup secara langsung melalui pekerjaan mencari ikan. Namun ada juga yang bergantung secara tidak langsung, antara lain menjadi perantara antara pencari ikan dengan juragan pembeli ikan-ikan tersebut.

Kepala keluarga yang pekerjaan pokoknya bertani sawah tanpa bekerja sampingan mencari ikan, biasanya orang yang karena umur dan/atau kesehatannya tidak memungkinkan. Atau bisa juga karena dari hasil bertani sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka

Di sekitar Desa Meraran dan Rempe terdapat hamparan sawah, tetapi nampak tidak terawat dengan baik seperti umumnya sawah yang ada di Jawa atau Bali. Dua Belas nara sumber yang diwawancarai semuanya menyatakan bahwa mereka hanya turun ke sawah saat menyiapkan lahan sampai menanam bibit, kemudian kembali lagi pada saat padi siap panen. Waktu di antara musim tanam dan musim panen digunakan untuk mencari ikan di danau, terutama terutama mujair dan nila serta belut. Jika sesekali menengok sawahnya, mereka hanya melihat air dan jarang sekali melakukan kegiatan merumput. Untuk Desa Meraran dan Rempe, mayoritas padi yang dihasilkan dari sawah hanya mencukupi untuk dikonsumsi sendiri. Sementara masyarakat di Desa Sampir selain untuk dikonsumsi sendiri, padi tersebut juga dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain.

Lahan-lahan kering yang ada di pinggir kampung hanya ditumbuhi oleh semak belukar atau pohon-pohon besar yang beberapa diantaranya adalah pohon asam dan randu yang sudah tua.

Selain hal-hal di atas, fungsi lain dari Danau Lebo adalah sebagai daerah tangkapan air. Pembangunan yang akan dilakukang terhadap sarana dan prasarananya terutama pembangunan fasilitas akses masuk dan pedestrian yang akan melakukan gali urug akan membuat daerah tangkapan air ini menjadi sempit. Apalagi saat ini di beberapa titik telah terjadi akresi yang disebabkan oleh sedimentasi dan akresi.

Untuk saat ini akses untuk memanfaatkan Danau Lebo baik dari segi transportasi maupun pemanfaatannya sangat mudah. Secara umum tidak ada aturan formal yang mengatur tentang pemanfaatan tersebut. Dengan adanya pembangunan kawasan ini, sebagian masyarakat mengkhawatirkan akses-akses yang mudah ini tidak bisa mereka peroleh lagi.

## **5.1.6 Mitos-Mitos dan Kearifan Lokal**

### **5.1.6.1 *Dea Bide***

Dalam masyarakat sekitar Danau Lebo terdapat suatu mitos tentang *Dea Bide* yang menjadi penguasa di perairan setempat. Menurut cerita, *Dea Bide* akan murka apabila waktu istirahatnya pada siang hari diganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan di kawasan perairan. Kemurkaan tersebut dapat berupa bencana yang didapat oleh orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu, pada waktu-waktu dulu masyarakat tidak mau mencari ikan di Danau Lebo pada waktu tengah hari (sekitar pukul 12.30 s/d 14.00). Namun setelah diamati lebih jauh ternyata pada waktu-waktu tersebut adalah waktu bagi ikan-ikan yang ada untuk berlindung/berteduh secara berkelompok dari panas matahari. Sehingga apabila waktu tersebut dimanfaatkan untuk mencari ikan justru akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dan ini dikhawatirkan akan mengurangi populasi ikan tersebut sebagai sumber pendapatan secara cepat.

Seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, mitos ini sekarang hanya tinggal cerita yang memang secara rasional tidak bisa untuk dibuktikan. Dengan kondisi seperti ini, sangat sulit untuk mengangkat kembali mitos ini sebagai bentuk kearifan lokal yang bisa menunjang keberlanjutan lingkungan.

### 5.1.6.2 *Kaki Aca*

Mitos ini berkembang terutama pada masyarakat nelayan di Kampung Sampir. Konon pada zaman dulu kala, berangkatlah sekelompok nelayan ke Danau Lebo untuk menangkap ikan yang dipimpin oleh Kaki Aca. Kebetulan hari itu adalah hari Jum'at dan mereka lupa bahwa hari Jum'at adalah hari yang penting bagi umat Islam. Mereka begitu asyik mencari dan menangkap ikan dan tampaknya mereka sangat gembira dengan hasil tangkapannya.

Tiba-tiba terdengar beduk dan suara azan yang menggema. Salah seorang dari mereka yang bernama Icak begitu mendengar suara azan tersebut langsung mengajak teman-temannya yang lain untuk berhenti mencari ikan dan melaksanakan kewajibannya terhadap pencipta. Akan tetapi Kaki Aca tidak mau pulang dan meminta teman-temannya untuk pulang lebih dulu dengan alasan tidak akan meninggalkan danau mumpung hasil tangkapan sangat berlimpah.

Setelah teman-temannya pulang, tinggallah Kaki Aca sendiri di tengah danau sambil terus mencari dan menangkap ikan. Begitu teman-temannya lenyap dari pandangan Kaki Aca, tiba-tiba muncul sosok wanita cantik di tengah danau. Kaki Aca mendayung sampannya mendekati wanita tersebut. Setelah Kaki Aca mendekat, wanita tersebut berkata, "Hai Aca, mengapa engkau tidak pulang untuk shalat Jum'at? Sebagai umat Islam seharusnya engkau melaksanakan shalat Jum'at, kamu harus bersyukur pada sang Khaliq atas karunia ini. Kaki Aca tak menggubris himbauan itu, akan tetapi dia justru ingin memeluk wanita cantik tersebut.

Tiba-tiba wanita itu menghilang dari pandangan Kaki Aca. Seketika itu sampan Kaki Aca diputas oleh pusaran air yang sangat deras. Kaki Aca berteriak minta tolong namun tidak ada yang dapat menolongnya. Kaki Aca mendapat kutukan dari Allah dan dia menghilang bersama sampannya. Konon menurut penduduk di Desa Sampir Kaki Aca lenyap tak tahu rimbanya dan menjadi penunggu Danau Lebo sampai saat ini. Sampai saat ini, hari Jum'at dijadikan pantangan oleh penduduk Desa Sampir untuk mencari ikan.

Dari mitos tersebut diatas bila dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan bisa terlihat bahwa pantangan ini bisa dikategorikan sebagai suatu kearifan lokal yang membatasi penangkapan ikan yang berlebihan sehingga walaupun cuma dalam hitungan hari, ikan-ikan tersebut mungkin dapat berkembang biak guna kelestariannya. Bila hari produktif masyarakat mencari ikan adalah 7 hari dalam seminggu, maka dengan adanya kearifan lokal ini hari produktifnya menjadi 6 hari ditambah lagi pada jam-jam tertentu yang mengharuskan mereka istirahat (mitos *Dea Bide*).

Namun seiring dengan menyempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan tuntutan ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk memenuhi keperluan mereka, mitos-mitos ini sekarang hanyalah tinggal cerita yang tidak berarti bagi masyarakat yang mementingkan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

#### **5.1.7 Sistem Kekeluargaan**

Umumnya di daerah Sumbawa, hubungan kekeluargaan dapat terjadi melalui perkawinan. Perkawinan antara si A dengan si B menjadikan seluruh sanak famili keluarga si A memiliki hubungan kekeluargaan dengan sanak famili si B, sekalipun diantara kedua sanak famili tersebut tidak ada hubungan darah sama sekali. Karena itu, sering kali masyarakat satu desa berada dalam satu sistem kekeluargaan.

Kepedulian sosial di antara orang-orang yang terhimpun dalam sistem kekeluargaan di daerah pedesaan Sumbawa umumnya cukup kuat. Sistem kekeluargaan seperti itu juga nampak sangat kuat di Desa Meraran, Rempe, Sampir dan Mura. Mengapa masyarakat di desa-desa tersebut terutama Meraran dan Rempe tidak memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan lahan kering yang ada di sekitar kampung mereka untuk menanam pisang, singkong, atau jagung? Jawabannya adalah karena banyak ternak seperti kerbau, sapi dan kambing yang berkeliaran memakan tanaman mereka. Sebetulnya di desa-desa tersebut ada aturan yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa, kerbau ataupun ternak lain yang merusak tanaman orang di kebun dapat ditebas (dilukai) dengan parang untuk membuat pemiliknya jera. Namun aturan itu tidak berjalan karena adanya

hubungan kekeluargaan sebagai kendala. Akhirnya orang yang memiliki tanamanlah yang harus memagari kebun dan sawah mereka.

**Dalam suatu masyarakat, selalu ada orang rajin dan orang malas. Pada umumnya orang yang rajin akan berhasil dan hidupnya sejahtera, sebaliknya orang malas cenderung menjadi miskin. Sistem kekeluargaan yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi membuat orang yang rajin tidak dapat menjadi sejahtera karena harus turut menghidupi orang yang malas. Akhirnya semuanya menjadi apatis dan malas. Fenomena seperti ini nampak menjadi salah satu latar belakang kehidupan sosial masyarakat di desa-desa lokasi penelitian terutama yang sangat menonjol di Desa Rempe.**

## 5.2 Konsep Perencanaan Danau Lebo Kecamatan Taliwang Oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

### 5.2.1 Prinsip Dasar Pembangunan Kawasan Danau Lebo

**Pengertian pekerjaan pembangunan kawasan Danau Lebo adalah sebagai berikut:**

#### ➤ **Pembangunan Kawasan**

**Merupakan suatu bentuk konsolidasi secara ruang yang terkait dengan kondisi saat ini maupun yang akan datang di bidang penggunaan lahan dan penataan infrastruktur kawasan tersebut.**

#### ➤ **Kawasan Danau**

**Merupakan kawasan reservasi atau daerah cadangan danau. Mengacu pada pengertian umum di atas, maka yang dimaksud dengan pembangunan kawasan Danau Lebo adalah**

**pembangunan dan penataan daerah reservasi atau cadangan di kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang.**

**Sebelum dilakukan kegiatan pembangunan terhadap Danau Lebo di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, maka terdapat beberapa prinsip dasar pembangunan kawasan sebagai berikut:**

**1. Keserasian dan Pelestarian**

**Pembangunan dan reservasi kawasan danau harus dapat melindungi kelestarian lingkungan dan mencegah merosotnya kualitas biot maupun flora yang menjadi cirri khas keberadaan kawasan tersebut.**

**2. Pembangunan Terpadu**

**Perencanaan pembangunan akan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dari segi sosial, ekonomi, budaya, kepariwisataan, optimalisasi daya dukung lingkungan dan sumber dayanya.**

**3. Berdaya Guna**

**Dapat mewujudkan kualitas lingkungan kawasan yang sesuai dengan potensi dan fungsinya.**

**4. Serasi, Selaras dan Seimbang**

**Dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur serta pola pemanfaatan ruang.**

**5. Berkelanjutan**

**Dapat menjamin terwujudnya kelestarian daya dukung sumber dayanya dengan memperhatikan kepentingan masa depan.**

### 5.2.2 Sarana Pengembangan Kepariwisata

Mengacu pada dokumen pembangunan kawasan danau, dapat diartikan juga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkeinginan meningkatkan kegiatan kepariwisataan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan cara menarik minat wisatawan. Karenanya dalam penyusunan pembangunan kawasan Danau Lebo juga bertujuan untuk menyediakan sarana wisata sebagai bagian sub sektor jasa dan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan segi industri jasa, selain dapat memberikan perluasan kesempatan kerja, juga dapat sebagai sumber penghasilan devisa non pertambangan dan sasaran diversifikasi komoditi ekspor untuk pemasukan devisa. Dengan adanya pengembangan kepariwisataan daerah yang terarah maka dapat memberikan iklim dan rangsangan lebih besar bagi usaha peningkatan kegiatan kepariwisataan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat perlu didukung dengan langkah-langkah konkrit dalam pengembangan kawasan-kawasan berpotensi yang belum tersentuh penanganan secara terpadu seperti dikawasan Danau Lebo.

**Hal-hal yang mendapat perhatian dalam pembangunan kawasan Danau Lebo sebagai sarana pengembangan kepariwisataan adalah sebagai berikut:**

- 1. Kejelasan batasan wilayah pembangunan kawasan Danau Lebo;**
- 2. Pengidentifikasian potensi kepariwisataan;**
- 3. Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur;**
- 4. Detail analisa tapak untuk mendapatkan konsep rencana penataan ruang dan tata guna lahan bagi kegiatan kepariwisataan (termasuk fasilitas penunjangnya);**
- 5. Rencana pengembangan kawasan Danau Lebo yang berkesinambungan (bertahap).**

**Agar pembangunan kawasan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut:**

**1. Aspek Strategis**

**Meliputi kebijakan dasar penentuan fungsi, pengembangan kegiatan dan perencanaan tata ruang kawasan yang merupakan penjabaran atau pengisian dari rencana-rencana pembangunan nasional dan daerah dalam jangka panjang.**

**2. Aspek Teknis**

**Kebijakan yang ditujukan untuk menyeraskan dan mengoptimalkan pola tata ruang kawasan, pemberian fasilitas dan utilitas secara tepat, mendayagunakan pola transportasi**

dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menjaga kelestariannya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

### **3. Aspek Hukum**

Kebijaksanaan dasar perencanaan yang harus mempertimbangkan aspek hukum dan perundangan serta administrasi agar rencana penataan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kinerja institusi yang ada di daerah dan sesuai dengan pembiayaan pembangunan.

### **4. Aspek Keterpaduan**

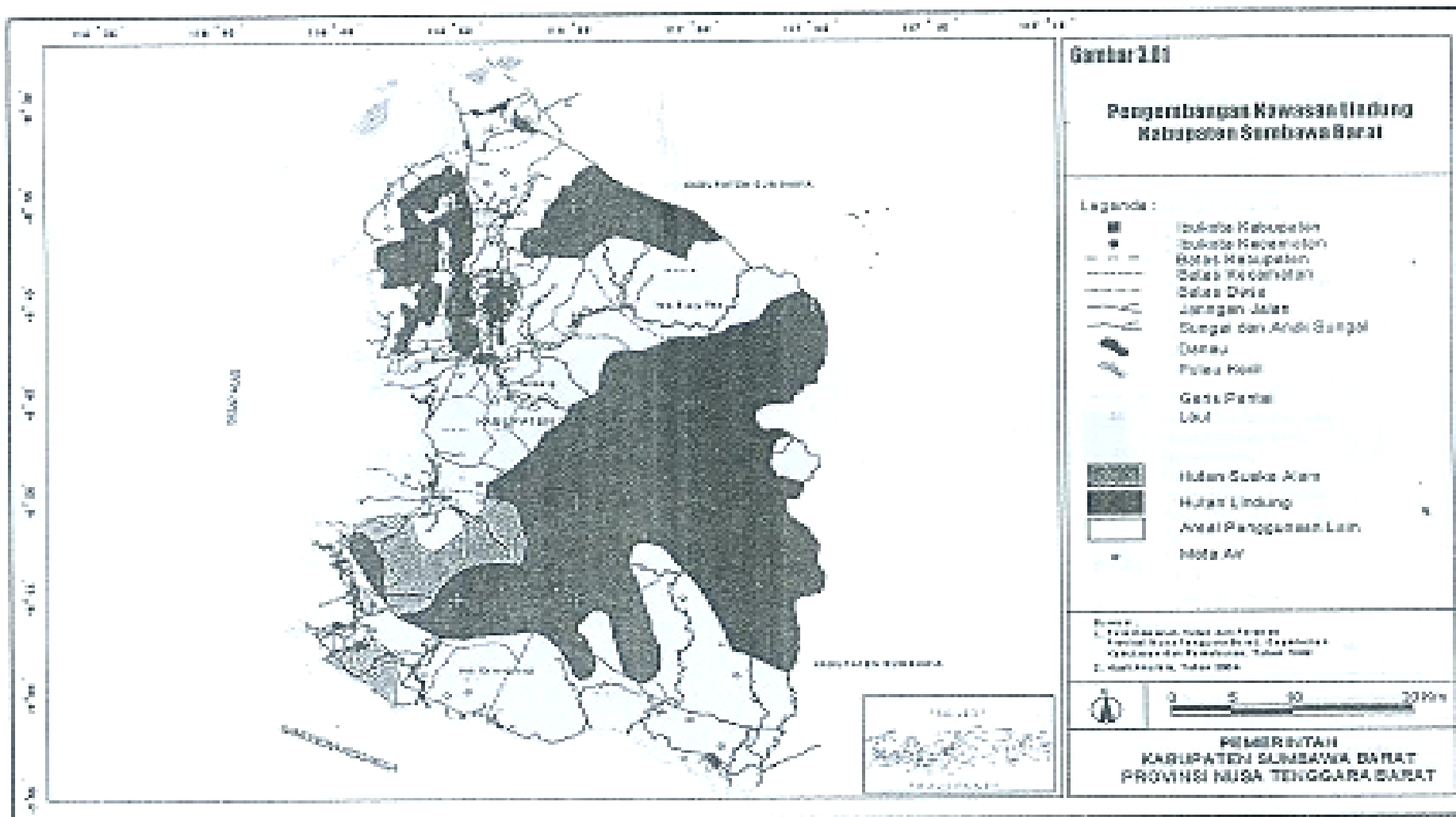
Rumusan kebijaksanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ketataruangan dan sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan wilayah. Kaidah-kaidah tersebut akan mempertimbangkan azas manfaat, pemerataan, keseimbangan, pertumbuhan serta kelestarian sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan maupun hubungan kawasan yang satu dengan kawasan sekitarnya.

### **5. Aspek Efisiensi Alokasi/Distribusi Kegiatan**

Dirumuskan berdasarkan keterpaduan dan keselarasan dengan distribusi alokasi investasi pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu juga perlu dipertimbangkan pada kemampuan tumbuh dan berkembangnya kawasan serta fungsi dan peranan kawasan itu sendiri.

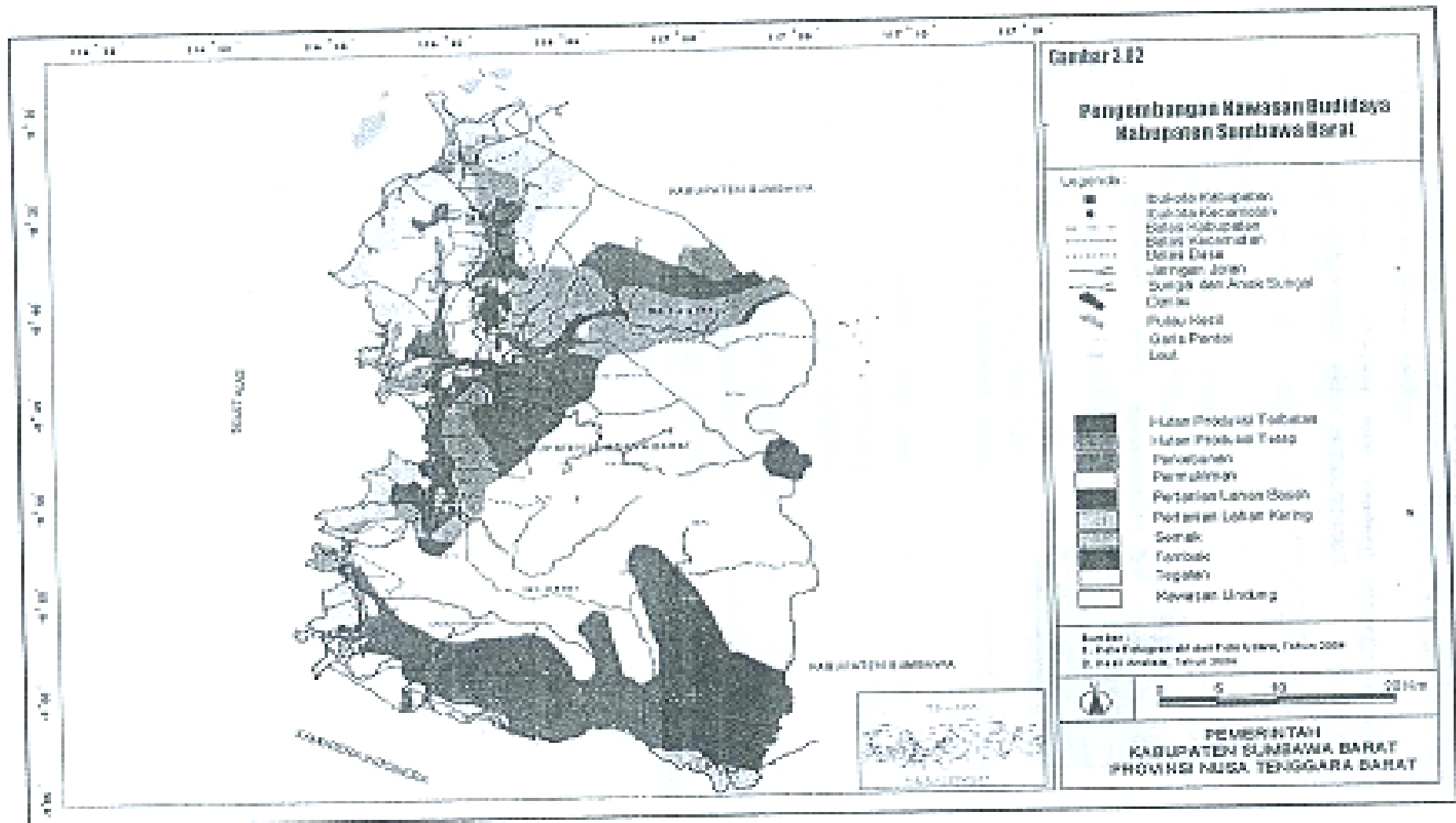
Guna mendukung implementasi aspek-aspek penataan kawasan seperti tersebut di atas, perlu dibedakan daerah-daerah yang termasuk kawasan lindung atau kawasan budidaya.

**Gambar berikut menjelaskan tentang keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Sumbawa Barat.**



(Sumber Bappeda Kab. Sumbawa Barat)

**Gambar 5.1**  
**Pengembangan Kawasan Lindung**



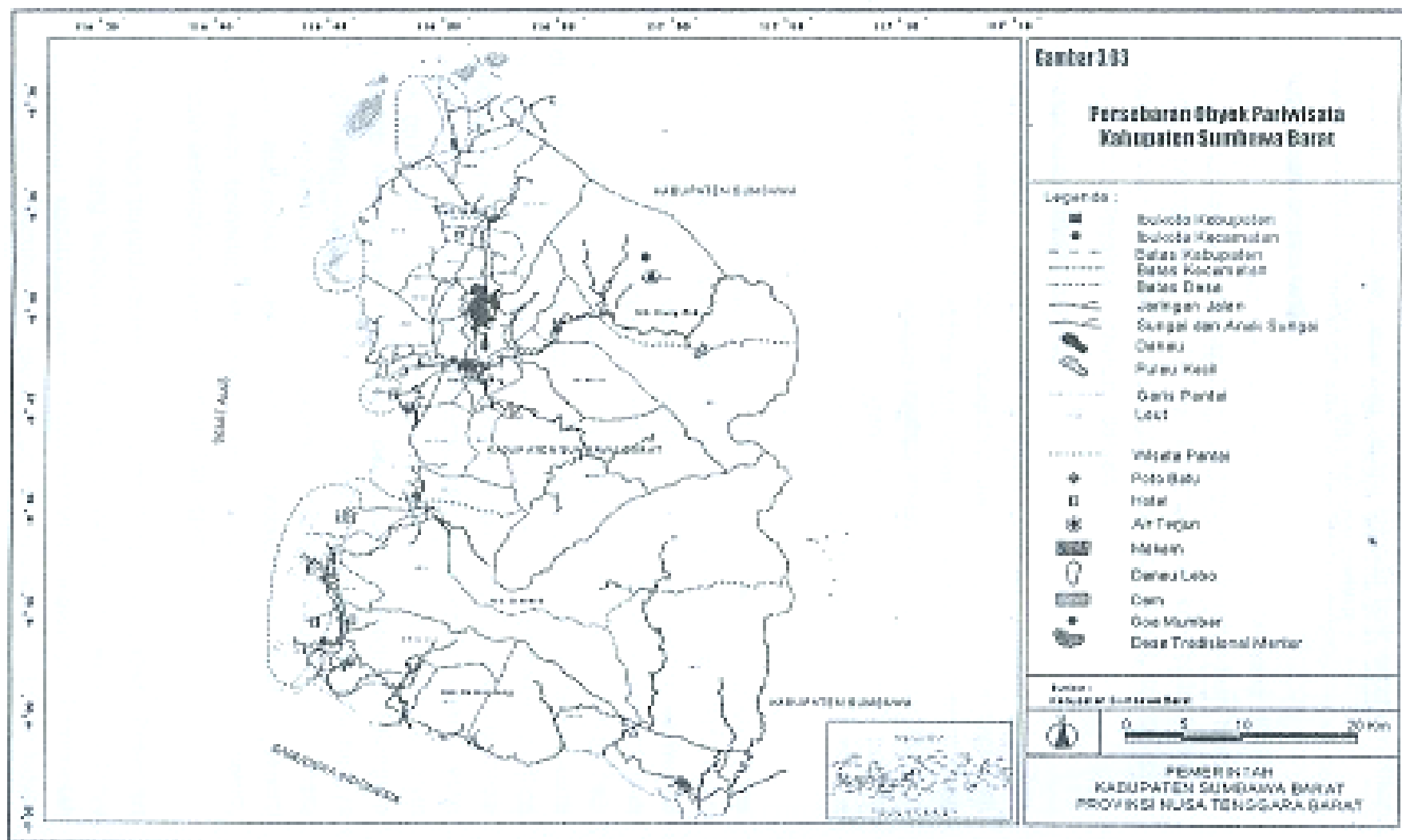
*(Sumber Bappeda Kab. Sumbawa Barat)*

**Gambar 5.2**  
**Pengembangan Kawasan Budidaya**

Sedangkan berkaitan dengan pengembangan kawasan sebagai obyek kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan antar wilayah, baik regional maupun nasional disamping keterkaitan antar sektor pembangunan;
2. Pengembangan pariwisata terintegrasi yang berlandaskan pada asas keterkaitan di atas;
3. Pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk sehingga diperlukan usaha pengentasan kelompok miskin dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
4. Pengembangan pariwisata yang tidak lepas dari usaha untuk memperkuat sumber dana pemerintah melalui penerimaan devisa;
5. Pengembangan pariwisata yang mensyaratkan pengelolaan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraannya perlu didasari dengan prinsip-prinsip kemandirian atau desentralisasi.

Adapun obyek persebaran pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat yang nantinya diharapkan dapat menunjang pengembangan kawasan Danau Lebo sebagai obyek kepariwisataan adalah sebagaimana gambar berikut.



*(Sumber Bappeda Kab. Sumbawa Barat)*

**Gambar 5.3**  
**Persebaran Obyek Wisata**

Pembangunan terhadap kawasan Danau Lebo merupakan pembangunan secara terpadu baik secara vertical maupun horizontal, dengan pengertian sebagai berikut:

**1. Perencanaan Penataan Vertikal**

Pembangunan kawasan Danau Lebo dilakukan untuk meletakkan landasan bagi integrasi dan keterpaduan berbagai tingkat perencanaan, mulai dari integrasi dan keterpaduan antara perencanaan pariwisata pada tingkat komunitas, lokal, sampai pada tingkat perwilayahan pariwisata daerah.

**2. Perencanaan Penataan Horizontal**

Pembangunan kawasan Danau Lebo dilakukan untuk meletakkan dasar integrasi dan keterpaduan pembangunan pada tingkat lintas sektoral dan lintas kawasan yang menempatkan prinsip perwilayahan sebagai *organizing concept* perumusan kebijaksanaan pembangunan pariwisata dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya (antara lain: sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya) yang tersedia.

**5.2.3 Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Danau Lebo**

Untuk mencapai sasaran pekerjaan secara tepat, maka dibuat rencana kerja yang tepat dengan mempertimbangkan skema pelaksanaan pekerjaan, landasan teoritis dan karakter sosial budaya masyarakat sekitar serta landasan teori yang akan digunakan dalam menyusun rencana kerjanya.

Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

### **1. Pengaturan Alur Kegiatan**

Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat diketahui tahapan-tahapan/langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh konsultan selama masa penugasannya.

### **2. Pengendalian, Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan**

Untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan secara tepat, maka diperlukan pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pekerjaan.

### **3. Penjadwalan Kegiatan**

Penjadwalan kegiatan sangat diperlukan, agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

#### **1. Metode Penentuan Kegiatan**

Metode penentuan kegiatan pembangunan Kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

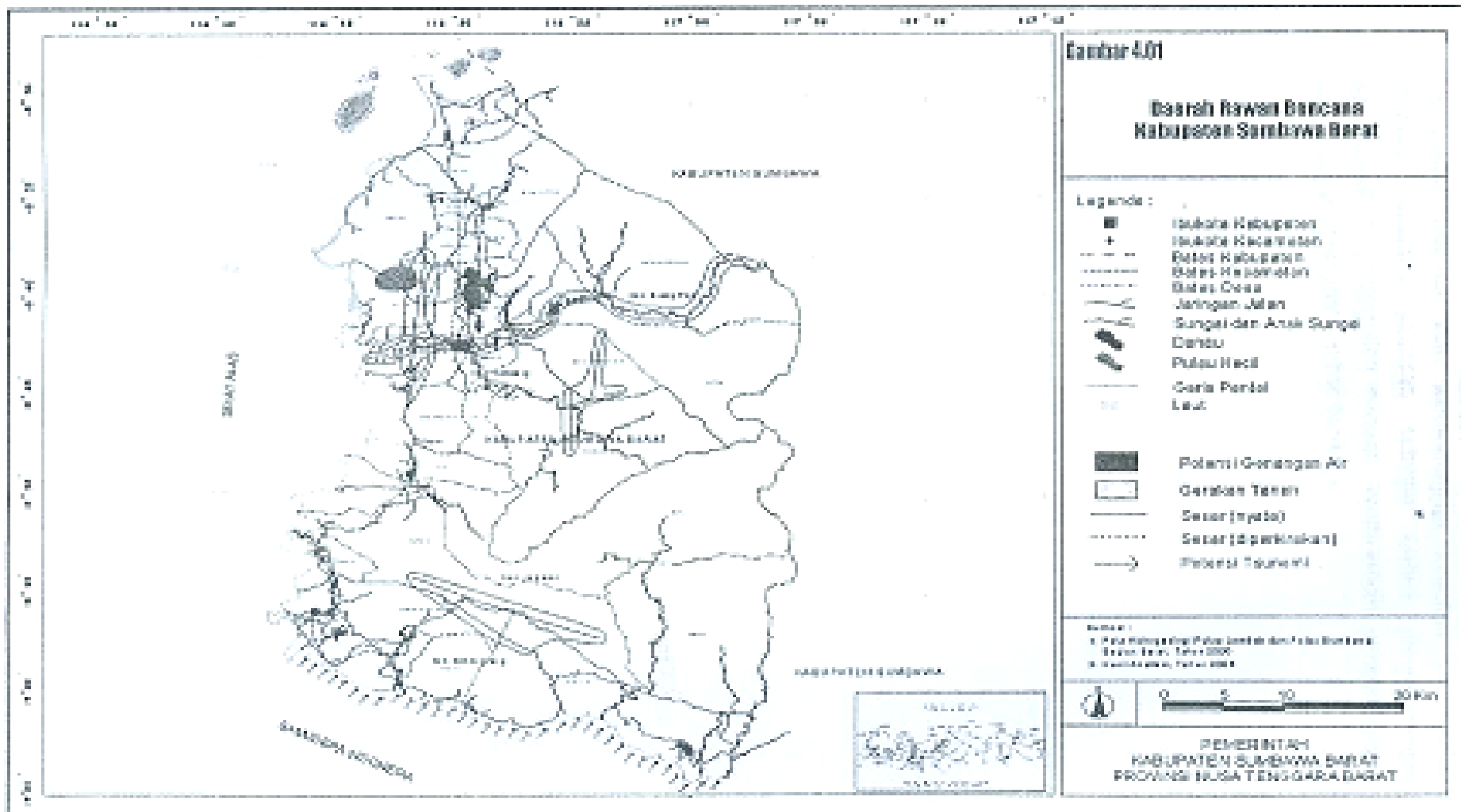
**1. Kawasan yang dimaksud merupakan satu kesatuan bidang infrastruktur kawasan pembangunan yang dapat memunculkan potensi andalan untuk cepat berkembang, artinya:**

**a. Dapat terbentuk sebagai suatu kawasan pembangunan yang teraglomerasi oleh faktor sosial, ekonomi maupun kultur yang saling mendukung.**

**b. Mempunyai potensi khusus yang dapat diandalkan untuk mengembangkan kawasan pembangunan secara keseluruhan.**

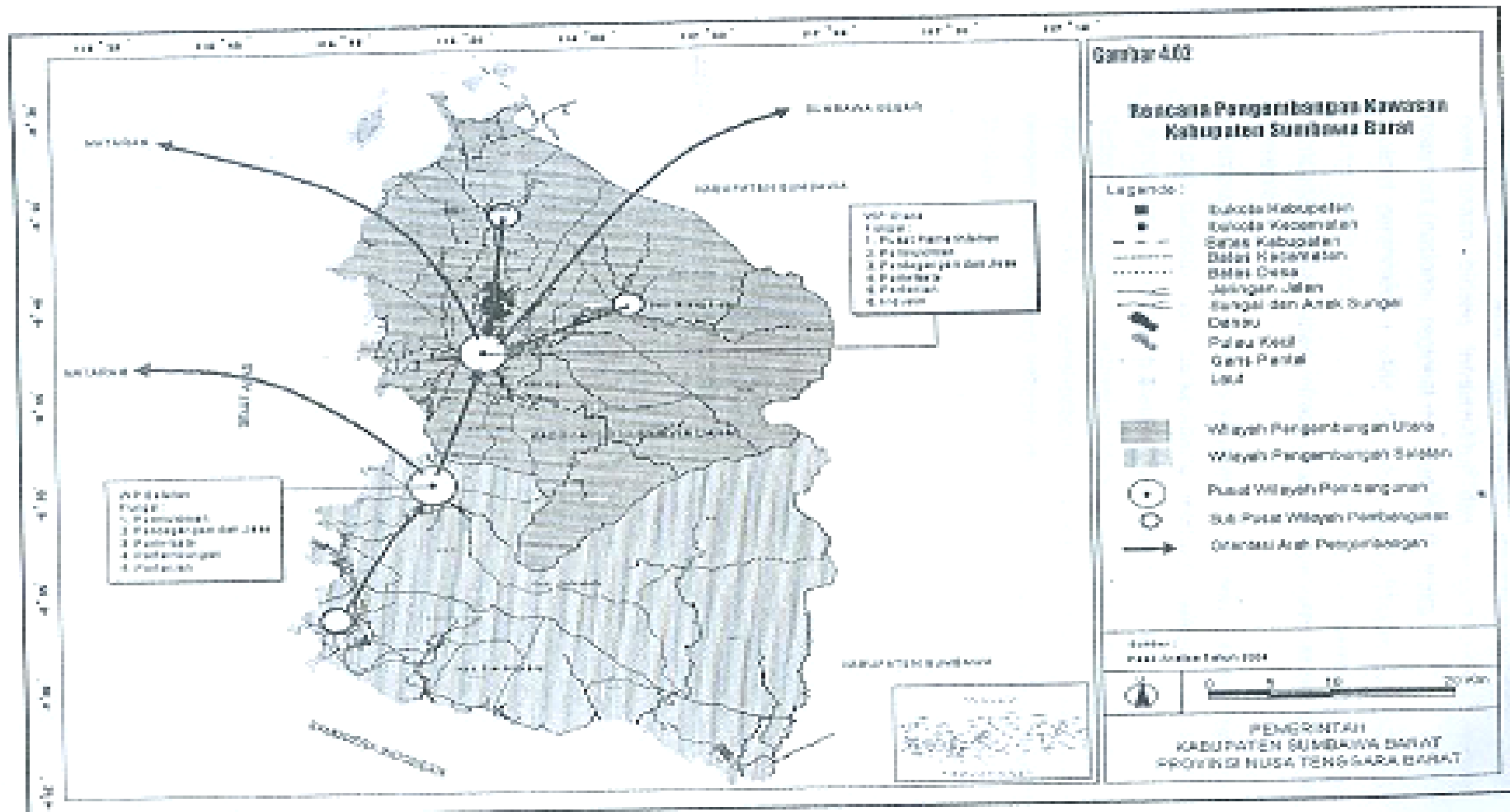
- 2. Bahwa kegiatan pembangunan kawasan di Kabupaten Sumbawa Barat tidak direncanakan pada lokasi:**
  - a. Terkena banjir secara periodik.**
  - b. Kondisi tanahnya labil, mudah longsor atau terjadi penurunan, pergerakan serta gejala alam lain yang dapat diprediksi.**
  - c. Berada pada daerah gunung berapi yang masih aktif atau pada kawasan yang disinyalir ada gas beracun.**

**Berkaitan dengan daerah yang memiliki kondisi rawan bencana di Kabupaten Sumbawa Barat adalah seperti gambar 5.4.**
- 3. Merupakan prioritas bagi pembangunan kawasan sebagai sarana pengembangan kepariwisataan (kesesuaian dengan perencanaan pengembangan kawasan sebagaimana gambar 5.5).**



(Sumber Bappeda Kab. Sumbawa Barat)

**Gambar 5.4**  
**Daerah Rawan Bencana**



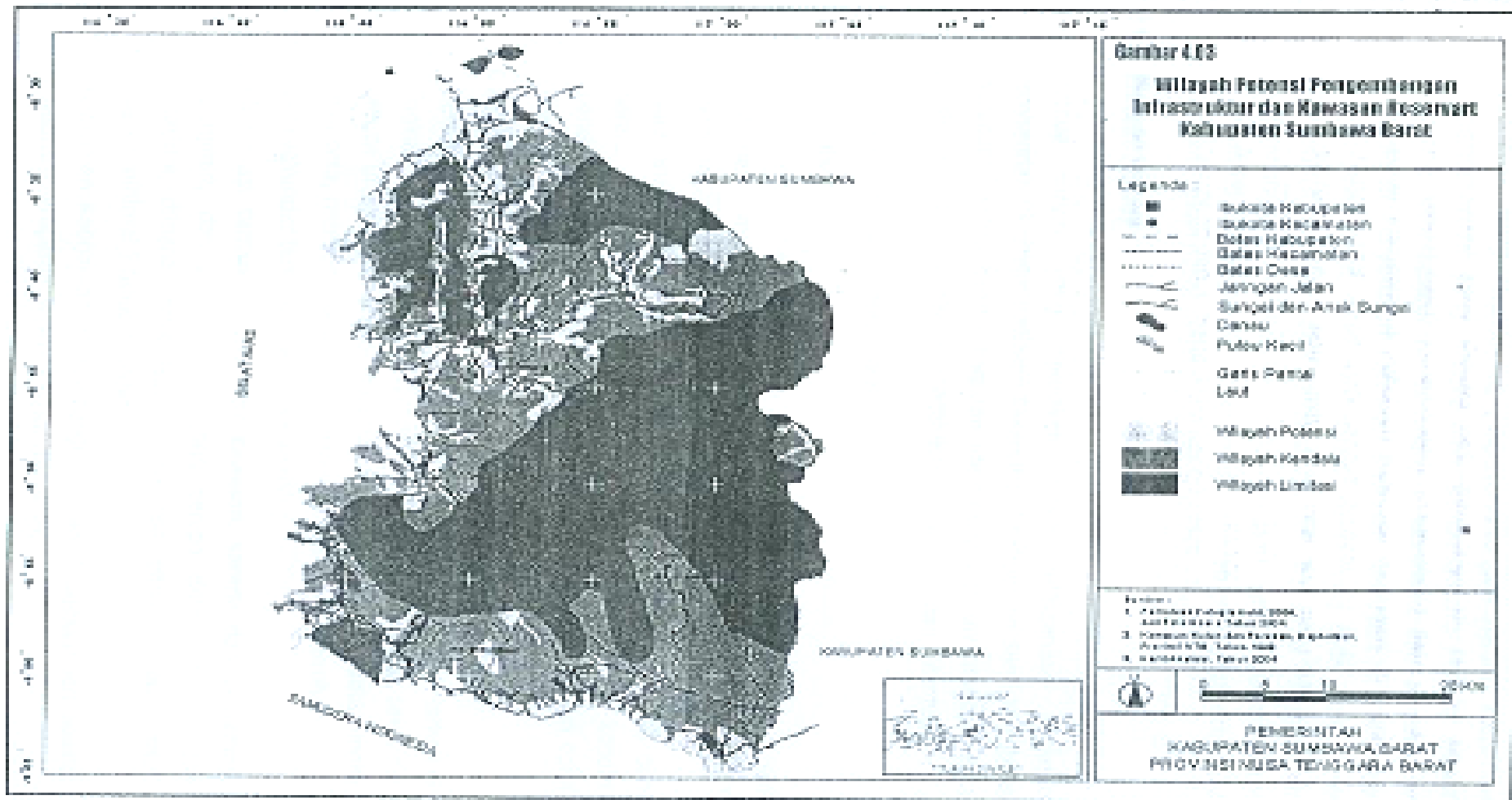
*(Sumber Bappeda Kab. Sumbawa Barat)*

**Gambar 5.5**  
**Rencana Pengembangan Kawasan**

- 4. Sebagai salah satu pertimbangan penetapan lokasi dalam perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan kawasan (nasional, regional maupun lokal), maka:**
- a. Lokasi pembangunan diprioritaskan bagi kawasan yang sudah atau akan dicantumkan sebagai kawasan prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan.**
  - b. Mempunyai lokasi strategis yang memungkinkan kawasan tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi kawasan agrobisnis, agrowisata, agroindustri maupun unit pelayanan lokal.**

**Sedangkan mengenai wilayah-wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki potensi-potensi khusus untuk perencanaan pengembangan infrastruktur dan kawasan seperti gambar berikut.**





*(Sumber Bappeda Kab. Sumbawa Barat)*

**Gambar 5.6**  
**Wilayah Potensi Pembangunan Infrastruktur**  
**Dan Kawasan**

**5. Adanya sikap masyarakat yang terbuka dan mudah menerima pembaharuan yang dibawa oleh pembangunan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pembangunan kawasan di Kabupaten Sumbawa Barat sejak awal sangat bergantung pada peran serta masyarakat secara aktif partisipatif untuk ikut serta dalam proses pembangunan wilayahnya. Pada kawasan yang masyarakatnya memiliki pandangan dan sikap positif terhadap pembangunan, maka diperkirakan dapat mendukung keberhasilan program.**

## **2. Metode Survei**

**Metode survei yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kawasan Danau Lebo merupakan suatu bentuk kegiatan identifikasi dan inventarisasi data pendukung yang digunakan sebagai acuan pada tahapan selanjutnya. Guna mendukung penerapan metode survei, terdapat beberapa teknik survey lapangan yang dilakukan antara lain adalah:**

### **1. Peninjauan Kawasan (*site visit*)**

**Peninjauan kawasan dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman visual secara langsung atas lokasi yang diidentifikasi, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi fisik, sosial dan ekonomi kawasan perencanaan.**

### **2. Pengenalan Kondisi Kawasan**

Pengenalan kondisi kawasan secara *on-side* ini dilakukan dengan pertemuan dengan para *stakeholder* dan tokoh masyarakat, sehingga akan memudahkan perencana dalam menentukan kawasan efektif yang akan diprioritaskan pembangunan bidang infrastrukturnya.

### **3. Dokumentasi Kondisi Kawasan**

Dokumentasi kondisi kawasan dalam bentuk foto, slide dan sketsa akan sangat berguna untuk bahan diskusi dan asistensi.

### **3. Metode Analisis**

Metode ini sangat penting dilakukan karena dengan analisa yang mendalam, maka perencanaan yang akan dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat bahkan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam analisa tersebut, beberapa kajian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Kajian literatur;**
- b. Kajian terhadap kebijakan tata ruang nasional, regional dan lokal (kabupaten);**
- c. Kajian terhadap kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah kawasan pembangunan;**
- d. Kajian terhadap potensi pengembangan wilayah.**

Hasil analisa tersebut di atas akan menentukan:

- a. Penetapan lokasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;**

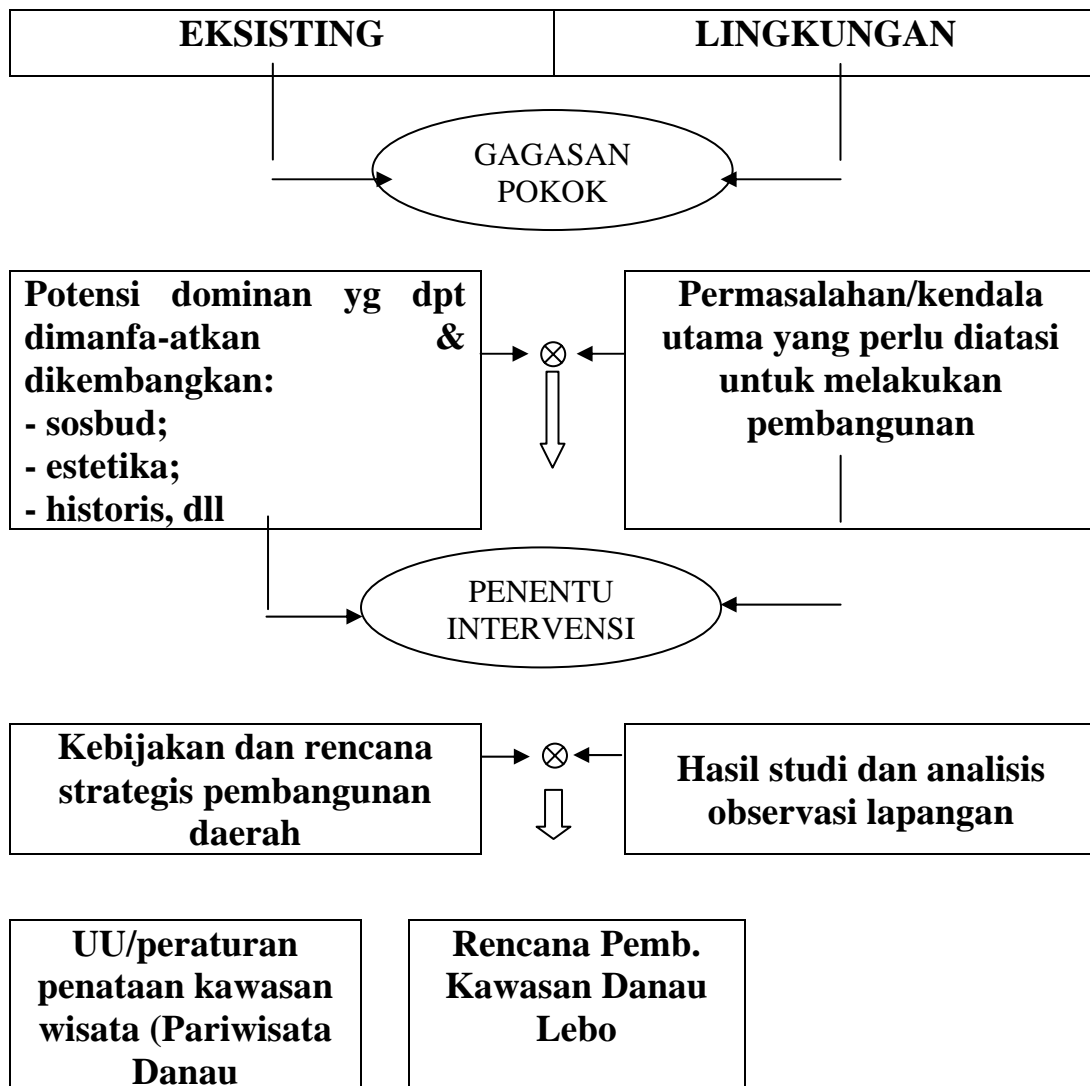
**b. Penentuan kategori perencanaan yang akan ditetapkan dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan kawasan Danau Lebo.**

#### **4. Metode Perencanaan**

**Perencanaan terhadap pembangunan Kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sangat terkait atas aspirasi dan peran serta masyarakat secara aktif dan partisipatif.**

**Pelaksanaan kegiatan tersebut akan menggunakan pendekatan metodologi secara menyeluruh dan komprehensif berdasarkan aspek sosial ekonomi, sosial cultural serta optimalisasi daya dukung fisik lingkungan dan sumber dayanya. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan penyusunan pekerjaan yang nantinya akan membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses pelaksanaan pembangunan di kawasan perencanaan tersebut.**

**Untuk mengidentifikasi dan sebagai acuan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan ketertarikan terhadap pengembangan kawasan wisata, maka penyusunan perencanaan pembangunan kawasan Danau Lebo akan berguna bagi pelaku usaha, pengelola, pengusaha maupun pengguna yang terkait dengan pembangunan pariwisata. Secara umum, pendekatan metodologi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Danau Lebo sebagai berikut:**



**Gambar 5.7 Pendekatan Metodologi  
Pembangunan Kawasan Danau Lebo oleh Konsultan (PT.  
GCP, 2006)**

#### 5.2.4 Tahap Pelaksanaan Oleh Konsultan (PT. Grahasindo Cipta Pratama)

Secara umum kegiatan yang akan dilaksanakan oleh konsultan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dibagi menjadi 3 sifat kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat berurutan (sekuel), bersamaan (parallel) dan terus menerus (kegiatan

pemantauan). Uraian tentang rencana kerja yang berupa kegiatan ini bukan berarti merupakan urutan baku yang akan dilakukan oleh konsultan, tetapi secara fleksibel dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah:

#### **1. Tahapan Persiapan Survai**

Dalam tahap persiapan survai, konsultan akan melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data sekunder melalui serangkaian kegiatan asistensi teknis dan diskusi instansional. Beberapa hal yang akan dikaji selama tahap persiapan survai adalah:

- a. Data dan studi literatur berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan danau sebagai obyek wisata (berupa asumsi dan hipotesa mengenai keadaan kawasan yang direncanakan).
- b. Kerangka studi rencana pelaksanaan kegiatan.
- c. Peta-peta dasar yang memuat batas wilayah pengembangan kota dan perencanaan (skala 1 : 10.000 dan 1 : 5.000).

#### **2. Tahap Survai**

Pelaksanaan kegiatan survai lapangan akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi data primer mengenai:

- a. Kondisi eksisting pemanfaatan lahan.
- b. Karakteristik fisik lingkungan.

- c. Karakter sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar kawasan pembangunan.
- d. Identifikas potensi sumber daya di sekitar kawasan rencana pembangunan.

Setelah kegiatan-kegiatan di atas dilakukan, konsultan akan melakukan pemetaan terhadap:

- a. Peta penggunaan lahan.
- b. Topografi/kemiringan lahan.
- c. Geologi/daya dukung tanah.
- d. Hidrologi.
- e. Kondisi bangunan/lingkungan (kepadatan, jenis penggunaannya dan struktur/kualitas).
- f. Panjang dan lebar jalan menurut fungsinya.
- g. Jenis kondisi perkerasan pada ruas jalan lokasi pembangunan.
- h. Kondisi utilitas sanitasi.
- i. Fasilitas pelayanan, distribusi fungsi dan kapasitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
- j. Jaringan utilitas lainnya.

### **3. Tahap Kompilasi Data**

Berdasarkan pemetaan hasil identifikasi/inventarisasi data sekunder dan primer, akan dilakukan kompilasi data yang dimaksudkan untuk:

- a. Tabulasi serta sistemasi fakta dan informasi.
- b. Tersusunnya informasi mengenai:

- 1) **Aspek penggunaan lahan**
- 2) **Aspek pengembangan wilayah dan batas-batasnya**
- 3) **Aspek pelayanan dan prasarana**
- 4) **Aspek kependudukan**
- 5) **Aspek sumber daya alam (keadaan tanah, air, iklim, vegetasi dan fauna).**
- 6) **Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.**

#### **4. Tahap Analisis Data**

**Merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan dan metode serta teknis analisis perencanaan secara ilmiah, yang meliputi:**

- a. **Analisis keadaan/kondisi dasar**
- b. **Analisis kecenderungan perkembangan**
- c. **Analisis sistem serta kebutuhan ruang**
- d. **Analisis penentuan kawasan dan fungsi**
- e. **Analisis kondisi fasilitas, sarana dan prasarana serta ruang terbuka**
- f. **Analisis unsur utama pembangunan kawasan danau, meliputi:**
  - 1) **Karakteristik kawasan jalur pesisir danau**
  - 2) **Karakteristik topografi**
  - 3) **Karakteristik hidrologi**
  - 4) **Karakteristik kawasan jalur hijau**
  - 5) **Karakteristik kawasan rekreasi**
  - 6) **Karakteristik sosial, budaya dan ekonomi**

## **7) Karakteristik kawasan pemukiman.**

### **5. Tahap Perumusan Perencanaan**

Hasil analisis data selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kawasan Danau Lebo. Kegiatan perencanaan akan dilakukan mulai dari titik awal melingkar sampai membentuk polygon tertutup pada bagian tepi Danau Lebo yang mencakup lebih kurang 10 ha.

Adapun kegiatan perencanaan akan meliputi:

- a. Perencanaan pola pemanfaatan lahan kawasan Danau Lebo taliwang.**
- b. Perencanaan penataan kawasan yang meliputi:**
  - 1) Rencana tapak**
  - 2) Rencana lahan terbuka hijau (*landscaping*)**
  - 3) Rencana sirkulasi dan aksesibilitas**
  - 4) Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)**
  - 5) Rencana komponen pelengkap obyek wisata.**
- c. Rencana strategis pengembangan.**
- d. Indikasi program penataan.**
- e. Rencana desain kawasan yang mencakup:**
  - 1) Rencana tapak/*lay out***
  - 2) Rencana tata hijau (*landscaping*)**
  - 3) Rencana sarana dan prasarana**
  - 4) Rencana tata bangunan dan lingkungan**
  - 5) Rencana jaringan jalan (sirkulasi dan aksesibilitas)**

- 6) Rencana jaringan utilitas
- 7) Rencana komponen obyek wisata
- 8) Rencana teknis pengelolaan dan pemeliharaan
- 9) Rencana indikasi program pengembangan.

#### 5.2.5 Penugasan Tenaga Ahli

Agar pengelolaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan maksud, tujuan, sasaran program serta jadwal pelaksanaan pekerjaan, maka diperlukan adanya suatu sikap professional dari setiap personil yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan berpengalaman dibidangnya masing-masing.

Mengingat bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan kawasan Danau Lebo merupakan pekerjaan yang bersifat komprehensif serta melibatkan beberapa orang tenaga ahli, maka konsultan akan memberikan tugas dan tanggungjawab baik secara individu maupun tim. Secara individu, seorang tenaga ahli akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sedang tugas dan tanggungjawab secara tim diberikan kepada team leader secara keseluruhan.

Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

##### 1. *Team Leader* (Ahli Planologi)

**Tugas dan tanggungjawab:**

- a. Mensupervisi dan mengkoordinasi seluruh tugas tenaga ahli, tenaga asisten ahli dan tenaga pendukung.
- b. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan pola pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- c. Bersama-sama dengan seluruh tenaga ahli bertanggungjawab dalam menyusun konsep pola pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja konsultan.
- d. Bersama-sama dengan seluruh tenaga ahli bertanggungjawab melakukan koordinasi dan pengkajian keterpaduan dengan instansi terkait.
- e. Bersama-sama dengan seluruh tenaga ahli bertanggungjawab dalam menyusun analisa dan rekomendasi hasil pelaksanaan pekerjaan.
- f. Bersama-sama dengan seluruh tenaga ahli bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait.
- g. Bersama-sama dengan seluruh tim melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan wilayah pekerjaan.

## **2. Ahli Planologi**

**Tugas dan tanggungjawab:**

- a. Melakukan inventarisasi dan kajian kondisi eksisting kawasan sekitar Danau Lebo.

- b. Melakukan review dan telaahan data terhadap rencana pembangunan dan pengembangan sistem penataan kawasan.**
- c. Melakukan analisa evaluasi konsistensi, kesesuaian dan kebutuhan sekitar kawasan Danau Lebo.**
- d. Melakukan analisa evaluasi derivative terhadap kegiatan pembangunan sistem penataan kawasan.**
- e. Merumuskan hasil analisa evaluatif dan menyusun rekomendasi pembangunan kawasan sekitar Danau Lebo.**

### **3. Ahli Arsitektur**

**Tugas dan tanggungjawab:**

- a. Melakukan inventarisasi dan kajian kondisi eksisting kawasan sekitar Danau Lebo**
- b. Melakukan analisa evaluasi konsistensi, kesesuaian dan tampilan bangunan sekitar kawasan Danau Lebo.**
- c. Melakukan analisa evaluasi bangunan yang perlu dikonservasi untuk memberikan karakter pada kawasan Danau Lebo.**
- d. Merumuskan hasil analisa evaluasi dan menyusun rekomendasi pembangunan kawasan sekitar Danau Lebo.**

### **4. Ahli Sipil Keairan**

**Tugas dan tanggungjawab:**

- a. Melakukan inventarisasi dan kajian kondisi eksisting perairan kawasan sekitar Danau Lebo.**

- b. Melakukan review dan telaahan data terhadap rencana pembangunan dan pengembangan sistem penataan kawasan.**
- c. Melakukan analisa evaluasi dan menyusun strategi pengolahan perairan terhadap kegiatan pembangunan sistem penataan kawasan.**

#### **5. Ahli Lingkungan**

**Tugas dan tanggungjawab:**

- a. Melakukan inventarisasi dan kajian kondisi eksisting sistem pengelolaan lingkungan serta penanganan pembuangan sampah di sekitar kawasan pembangunan.**
- b. Melakukan analisa evaluasi konsistensi, kesesuaian dan kebutuhan dari segi aspek lingkungan sekitar Danau Lebo.**
- c. Melakukan analisa evaluasi derivative terhadap kegiatan pembangunan kebersihan lingkungan dan sistem penataan kawasan.**
- d. Merumuskan hasil analisa evaluatif dan menyusun rekomendasi program bidang lingkungan pembangunan kawasan sekitar Danau Lebo.**

#### **6. Ahli Geodesi**

**Tugas dan tanggungjawab:**

- a. Melakukan inventarisasi dan kajian kondisi eksisting unsure tanah di sekitar kawasan Danau Lebo.**
- b. Melakukan analisa evaluasi derivative terhadap unsure tanah di sekitar kawasan Danau Lebo.**

- c. **Merumuskan hasil analisa evaluatif dan menyusun rekomendasi kelayakan pemanfaatan tanah kawasan sekitar Danau Lebo.**

**Penugasan tenaga ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di atas dan pembagian tugas pokok dan tanggung jawab yang jelas, hendaknya menjadikan perencanaan terhadap pembangunan kawasan Danau Lebo dapat dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan pembangunan dari berbagai aspek sehingga ke depan pembangunan kawasan ini memberikan manfaat yang diinginkan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.**

#### **5.2.6 Struktur Organisasi Konsultan**

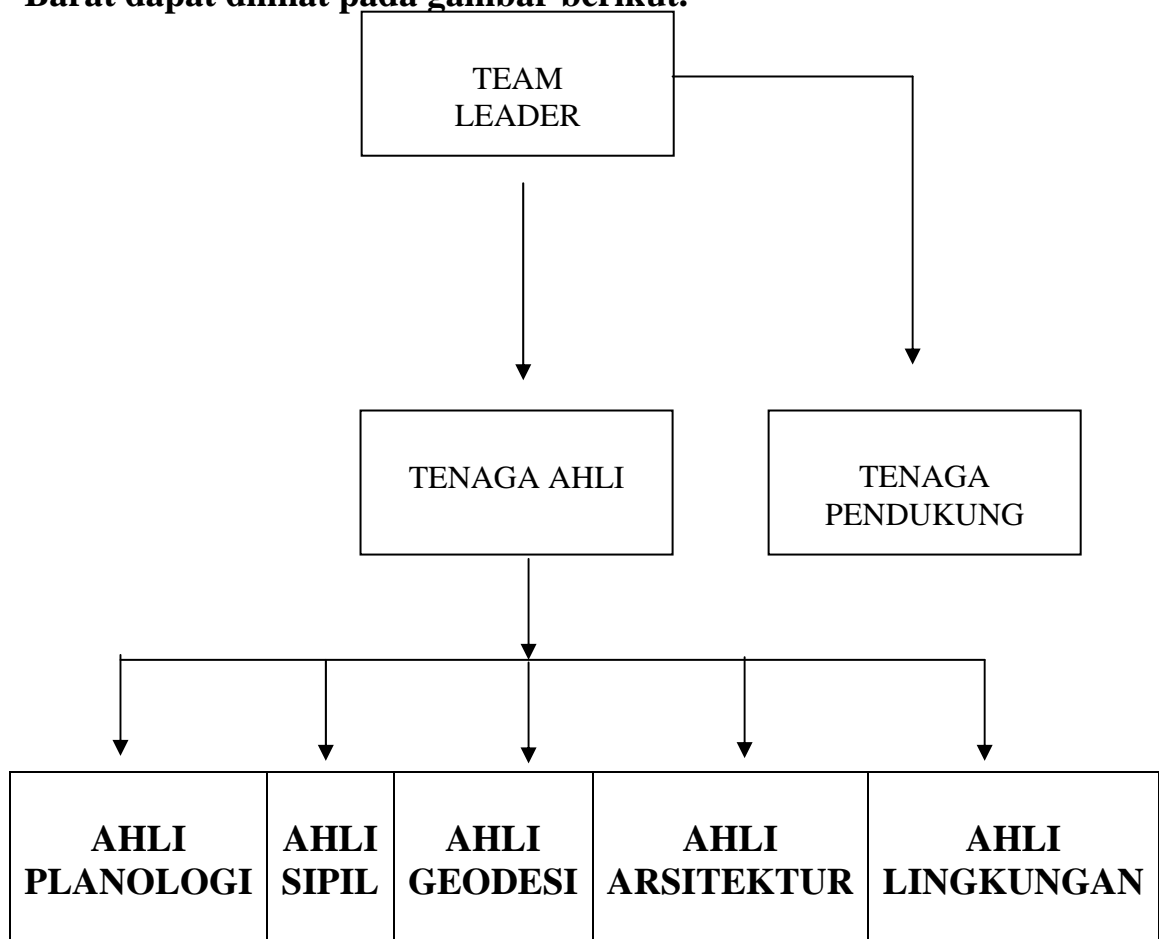
**Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan tidak dapat lepas antara jenis pekerjaan yang akan dilakukan atau menjadi tanggungjawab tim kerja secara keseluruhan dan personil yang akan terlibat dalam pembentukan tim kerja. Keduanya merupakan sesuatu yang mendasar dan harus dilakukan. Cakupan pekerjaan, maksud dan tujuan yang akan dicapai, durasi waktu pelaksanaan pekerjaan, keahlian masing-masing personil dan mekanisme pelaksanaannya harus mampu dirumuskan secara spesifik dalam hal kualitas dan kuantitasnya.**

**Sesuai dengan garis besar penugasan dalam pelaksanaan kegiatan, maka konsultan telah menyiapkan organisasi**

pelaksanaan pekerjaan ke dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu tim tenaga ahli dan tenaga pendukung.

Secara struktural, hubungan kedua kelompok tersebut bersifat komando dan hubungan koordinasi. Hubungan komando terjadi antara *team leader* dengan tim tenaga ahli dan tim tenaga pendukung. Sedangkan hubungan koordinasi terjadi antara tim tenaga ahli dengan tim tenaga pendukung.

Secara rinci, organisasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 5.9**  
**Struktur Organisasi Pelaksanaan Perencanaan**

## **Pembangunan Kawasan Danau Lebo (PT. GCP, 2006)**

### **5.3 Rencana Penataan Kawasan Dan Sarana Serta Prasarana Yang Akan Dibangun**

#### **5.3.1 Rencana Diagram Hubungan Antar Zona**

**Setelah melalui analisa zona, maka ditetapkan zona kawasan yang saling berinteraksi. Dalam penetapan zona ini diantaranya terdapat:**

##### **a. Zona 1**

**Yang berisi kawasan untuk masyarakat sekitar berinteraksi misalnya: jualan ikan dan disediakan tempat berupa kios jual ikan tanpa dipungut biaya sewa kios.**

##### **b. Zona 2**

**Yang berisi area servis pengunjung misalnya: tempat parkir mobil dan motor, pedestrian, plaza dan lapangan olahraga. Hal ini dikarenakan kondisi lahan ini relatif datar.**

##### **c. Zona 3**

**Yang berisi sirkulasi masuk ke fasilitas wisata dan fasilitas penunjang. Lahan disini digali-urug cukup banyak.**

##### **d. Zona 4**

**Yang berisi fasilitas bangunan wisata air sebagai tempat tujuan. Hal ini dikarenakan kondisi lahan yang berbukit dan mempunyai pemandangan yang cukup bagus.**

##### **e. Zona 5**

**Untuk wisata air seperti sepeda dan bus air, juga dikelilingi oleh gazebo ditepiannya.**

### 5.3.2 Rencana Pola dan Tata Bangunan

#### 5.3.2.1 Pola Bangunan

**Pola massa bangunan diarahkan menyebar. Hal ini dikarenakan kondisi lahan yang memanjang sepanjang jalan dan berada ditepi danau. Dan perlu ada gali-urug untuk penyesuaian perletakan bangunan.**

#### 5.3.2.2 Tata Bangunan

**Bangunan dan fasilitas wisata ditempatkan menghadap danau. Hal ini dikarenakan pemandangan danau merupakan potensi yang cukup bagus. Sedangkan fasilitas penunjang tidak mutlak.**

#### 5.3.2.3 Konstruksi Bangunan

**Konstruksi bangunan dibuat dari bahan yang umum dan mudah didapat. Untuk tampilan atap dan lainnya disesuaikan adat atau ciri khas Kabupaten Sumbawa Barat yang harus ditonjolkan.**

### 5.3.3 Jenis Fasilitas Bangunan Yang Direncanakan

#### 1. Restoran dan *Cafe*

**Menyediakan sarana tempat makanan bagi pengunjung dikawasan wisata sambil beristirahat, melihat pemandangan, sehingga memerlukan pemandangan yang cukup bagus.**

#### 2. Panggung Hiburan

Untuk memberikan sarana hiburan bagi pengunjung dikawasan wisata agar dapat menikmati suasana sambil mendapat hiburan juga untuk acara bagi kalender wisata tahunan.

### **3. Kolam Renang**

Disediakan sebagai sarana rekreasi air yang mutlak diperlukan bagi wisatawan yang menikmati suasana alam terbuka sambil berenang.

### **4. Dermaga Pemancingan**

Disediakan bagi wisatawan yang hobi memancing dan sesuai dengan karakter wisata danau sebagai wisata pancing.

### **5. Kios Suvenir**

Sebagai tempat wisata yang representative diperlukan oleh oleh khas yang mencerminkan daerah setempat sehingga perlunya kios-kios untuk sarana tersebut.

### **6. Gazebo/gardu pandang**

Disediakan untuk para pengunjung dan keluarganya menikmati pemandangan yang lebih luas tanpa terganggu pengunjung lain.

### **7. Taman Bermain Anak (*Playground*)**

Disediakan bagi anak-anak untuk taman bermain anak-anak seperti ayunan, luncuran, panjar dan sebagainya.

### **8. Lapangan Olahraga**

**Disediakan untuk sarana olah raga yang murah dan umum, sehingga kesan fasilitas yang disediakan merata.**

#### **9. Pedestrian dan Taman**

**Disediakan sebagai sarana pengunjung yang berjalan kaki dan beristirahat di taman.**

#### **10.Dermaga**

**Disedakan untuk sarana wisata air berkeliling danau bila dimungkinkan memakai bus air dan sebagainya.**

#### **11.Kantor Pengelola**

**Disediakan untuk sarana pengelolaan tempat wisata dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang yang diperlukan.**

#### **12.Pos Jaga**

**Untuk keamanan kawasan dan tempat parkir. Jumlah pos disesuaikan dengan kebutuhan, sekiranya area yang mudah atau rawan gangguan keamanan.**

#### **13.Parkir Mobil dan Sepeda Motor**

**Disediakan untuk parkir mobil dan sepeda motor pengunjung, dengan penempatan yang mudah dijangkau dan aman.**

#### **14.Gapura/*Gate* Pintu Gerbang**

**Ditempatkan pada pintu masuk dan pintu keluar kawasan. Bentuk gapura dibuat dengan ciri khas tradisionil Kabupaten Sumbawa Barat.**

#### **15.Halte Angkutan Umum**

Disediakan bagi para pengunjung yang naik angkutan umum dan turun ditempat pemberhentian disekitar kawasan wisata.

#### 5.3.4 Rencana Sirkulasi Kawasan

Sirkulasi kawasan direncanakan melalui pertimbangan sebagai berikut:

##### a. Pintu Masuk dan Keluar

Penentuan pintu masuk dan keluar direncanakan pada 2 node pada lokasi kawasan, yaitu:

##### 1. Node 1

Pintu masuk pada kawasan ini diarahkan bagi masyarakat sekitar yang sering mengunjungi danau untuk mencari ikan, tanpa membayar tiket masuk. Jadi pembangunan kawasan tersebut juga memfasilitasi kepentingan masyarakat sekitar dengan menyediakan sarana kios jual ikan, pemancingan dan toilet.

##### 2. Node 2

Pintu masuk di dekat *entrance* pintu masuk loket utama kawasan, ditandai dengan gapura masuk. Pintu masuk ini disediakan, memberikan kesempatan pada pengunjung apabila pada node 1 tidak berkesempatan masuk.

##### 3. Node 3

Pintu masuk di dekat *entrance* pintu masuk loket utama kawasan, ditandai dengan gapura masuk. Pintu masuk ini

disediakan, memberikan kesempatan pada pengunjung apabila pada node 1 tidak berkesempatan masuk.

**b. Parkir**

Perletakkan parkir sesuai dengan kondisi lahan yang memanjang sepanjang jalan mengikuti tepi danau. Sarana parkir terbagi menjadi parkir mobil dan sepeda motor. Khusus parkir sepeda motor direncanakan beratap.

**c. Sirkulasi Kendaraan**

Sirkulasi kendaraan terbagi menjadi: sirkulasi mobil; dari pintu masuk menuju parkir direncanakan tidak terlalu jauh, dan mudah dicapai dari pedestrian. Arah masuk keluar disediakan tanda yang cukup jelas. Sirkulasi sepeda motor; sepeda motor yang masuk, langsung diarahkan ketempat parkirnya yang dekat dengan *entrance* masuk didepan loket. Sirkulasi pejalan kaki; sirkulasi pejalan kaki dimulai dari parkir kendaraan ke arah pedestrian lalu ke plaza dan ke pedestrian selanjutnya ke loket pintu masuk kawasan wisata.

**5.3.5 Ruang Terbuka Hijau**

Penempatan pepohonan dan tanaman dari hasil analisa lahan, disesuaikan dengan kondisi *lay out* yang direncanakan. Pepohonan dengan batang yang tinggi seperti pohon kelapa sangat cocok untuk karakter wisata di tepi danau. Sedangkan tanaman perdu lainnya digunakan sebagai taman keindahan juga sebagai pengarah sirkulasi pergerakan dan pemandangan.

### 5.3.6 Rencana Utilitas

#### 1. Pasokan Air Bersih

Bila tidak tersedia jaringan PDAM, penyediaan air bersih dapat memakai air danau yang telah difilterisasi terlebih dahulu dan ditampung di Tandon Bawah (*ground reservoir*). Pembuatan *Sewage Treatment Plan* (STP) mutlak diperlukan. Disamping itu penyediaan Tandon Atas harus ada.

#### 2. Pasokan Listrik

Memakai jaringan PLN yang didukung dengan Genset tersendiri sebagai tenaga cadangan listrik bagi kawasan tersebut. Perkiraan kebutuhan sudah dihitung di analisa utilitas.

#### 3. Sistem Komunikasi

Untuk kawasan tersebut, alat komunikasi yang dipakai adalah *handle talky*, untuk jaringan Telkom disediakan 2 nomor dengan beberapa *extention* sangatlah cukup. Komunikasi pengelola ke luar kawasan melalui kantor pengelola memakai jaringan Telkom. Sedangkan bagi pengunjung dapat disediakan Warung Telekomunikasi (Wartel) dilokasi kawasan.

#### 4. Sistem Drainase

Sistem pembuangan air kotor dan hujan melalui selokan atau gorong-gorong yang diarahkan ke danau. Dengan kemiringan yang sudah diperhitungkan sehingga air langsung mengalir cukup deras. Tidak menggenangi area cukup lama. Melihat kondisi esisting yang sering terjadi banjir dikawasan tersebut, maka perlu diperhitungkan level tanah permukaan bangunan nantinya. Agar tidak banjir dikawasan tersebut.

## **5. Pembuangan Sampah**

**Rencana penempatan bak sampah di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Diusahakan setiap bangunan atau fasilitas wisata disediakan tempat sampah, yang selanjutnya dibuang ke depo sampah yang disediakan khusus untuk kawasan tersebut.**

## **6. Rencana Pemanfaatan Kontur Lahan**

**Dengan kontur yang berbukit-bukit, maka perlu dilakukan gali-urug (*cut n fill*) bagi penempatan bangunan dan fasilitas wisata. Akan tetapi tidak semua kontur dilaksanakan, tergantung dari kondisi lahan tersebut. Hal ini diperlukan karena kontur yang berbukit juga potensi pemandangan yang cukup bagus. Disamping itu pengefisienkan biaya gali-urug yang dilaksanakan.**

### **5.4 Analisis Proses Perencanaan**

#### **5.4.1 Identifikasi Masalah**

**Dalam pembangunan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memfokuskan masalah pada fisik biologis danau, dimana terdapat beberapa permasalahan, antara lain: berkembangnya tumbuhan pengganggu (gulma air dan teratai); terjadinya sedimentasi dan erosi pada tepian danau sehingga terjadi pendangkalan dasar danau; terjadi banjir akibat hal tersebut diatas sehingga air meluap ke jalan raya; pembuangan limbah dan pencemaran kualitas air; penurunan produksi ikan; luasnya lahan yang perlu ditangani.**

Proses perencanaan dari pemerintah hanya melibatkan kalangan birokrasi dan teknisi yang dianggap mempunyai keahlian memberikan solusi dari

permasalahan-permasalahan di atas. Teori perencanaan yang digunakan adalah *sinoptik komprehensif* yang tersentralisasi, tidak fleksibel, rasional ilmiah dan mempunyai tujuan utama yang bersifat ekonomi. Konsep perencanaan yang dihasilkan merupakan kajian-kajian ilmiah dari para teknisi yang didasarkan pada arahan kebijakan dari para birokrat. Selain itu masalah yang diinventarisir belum terpadu dengan tidak munculnya permasalahan dari aspek kepariwisataan, mengingat pembangunan kawasan ini diprioritaskan untuk kegiatan wisata.

### ***Usulan Identifikasi Masalah***

Jika permasalahan yang diidentifikasi hanya sebatas seperti yang tercantum di atas, maka keberlanjutan dari kegiatan masih diragukan. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan dari satu aspek dan dalam identifikasinya tidak melibatkan masyarakat yang lebih tahu dan paham terhadap permasalahan yang ada menyangkut keberadaan Danau Lebo.

Dalam melaksanakan pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata di daerah, terdapat beberapa permasalahan yang belum terakomodir dalam identifikasi tersebut yang justru merupakan masalah yang dominan terjadi dalam pembangunan kawasan dan dihadapi oleh hampir seluruh daerah yang akan dikembangkan, antara lain: eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan karena pola pikir masyarakat yang menilai keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan fisik yang dilaksanakan; perwujudan komitmen yang tidak sejalan antara konsep perencanaan dan implementasi (pembangunan yang berpihak pada lingkungan); prioritas pengelolaan lebih dominan pada lingkungan fisik dengan mengabaikan lingkungan sosial; sistem pemasaran pariwisata yang relevan; pengembangan kawasan Pariwisata seperti Danau Lebo belum dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya, peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata masih rendah serta Apresiasi masyarakat terhadap pariwisata masih rendah.

Selain gambaran permasalahan secara umum di atas, untuk mengetahui secara mendalam permasalahan yang dialami oleh masyarakat, yang harus dilakukan adalah mengajak mereka untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi

masalah yang lebih spesifik yang mereka hadapi dengan mengajak mereka berdialog secara langsung. Keterbatasan mereka dalam mengidentifikasi masalah bisa disiasati dengan menggunakan metode-metode yang aplikatif yang bisa mendorong mereka untuk menemukenali permasalahan mereka sendiri.

#### 5.4.2 Formulasi Tujuan

Tujuan dilakukan pembangunan Kawasan Danau Lebo oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, adalah untuk: merancang *lancape* kawasan dan pemanfaatannya bagi kegiatan kepariwisataan; mengidentifikasi kesesuaian lahan dalam pemanfaatan ruang di kawasan Danau Lebo; identifikasi potensi ekonomi yang dapat menunjang peningkatan kualitas lingkungan kawasan; memotivasi masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pembangunan kawasan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah: peningkatan potensi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan; adanya suatu rancangan pembangunan kawasan yang menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan; sebagai pedoman dan acuan dalam pengambilan keputusan sebagai dasar kebijakan peningkatan potensi kepariwisataan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Tujuan utama dari pembangunan kawasan ini adalah aspek ekonomi semata. Kecenderungan untuk mengejar peningkatan PAD akan berimplikasi pada eksploitasi sumber daya yang melebihi daya dukung dari lingkungan. Masyarakat dimotivasi untuk berperan aktif tanpa adanya proses pembelajaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dari awal perencanaan.

Salah satu *point* dari sasaran yang ingin dicapai disebutkan ”pembangunan kawasan yang menerapkan prinsip berkelanjutan”, akan tetapi dalam formulasi tujuan secara jelas disebutkan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi. Jika prinsip yang ingin dikedepankan adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan, maka aspek ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus disandingkan dengan aspek sosial dan aspek lingkungan.

#### ***Usulan Formulasi Tujuan***

Pembangunan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata seharusnya adalah merupakan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (*ecosystem*). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing masing. Secara umum, formulasi tujuan dari pengembangan kawasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pembangun masyarakat melalui pengembangan kepariwisataan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya; mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pemerataan pertumbuhan; meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah; mendorong pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan dengan mengutamakan daya dukung lingkungan.

**Seperti halnya proses identifikasi masalah, dalam memformulasikan tujuan juga harus tetap mengikutsertakan masyarakat agar dalam proses pembangunan mereka tidak hanya menjadi obyek tetapi menjadi subyek pembangunan sehingga tujuan-tujuan diatas dapat dicapai.**

#### 5.4.3 Analisis Kondisi

Untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kondisi kawasan pembangunan, dilakukan melalui metode survai dengan melakukan peninjauan kawasan dan mendokumentasikannya. Kegiatan survai ini dilakukan terhadap kondisi eksisting lahan, karakteristik fisik lingkungan, karakter sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta potensi sumber daya alam. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis terhadap kondisi disertai dengan kajian terhadap literatur-literatur kebijakan potensi pengembangan. Dari hasil analisis ini ditetapkan lokasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kategori perencanaan yang akan ditetapkan.

Pola pikir yang mendominasi dalam proses analisis kondisi ini adalah pola pikir (paradigma) teknis, dimana modelnya didasarkan pada asumsi bahwa keputusan yang "baik" diasosiasikan dengan informasi yang obyektif, ilmiah, bebas nilai dan bersifat kuantitatif (Hadi, 2005). Pada tataran ini, analisis yang dilakukan mengabaikan mobilitas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dimana bila dikaitkan dengan paradigma pembangunan masyarakat, justru titik beratnya ditempatkan pada kebutuhan, sikap, kepercayaan dan nilai dari masyarakat yang secara potensial akan terkena dampak.

Jika pemerintah ingin mendapatkan model yang ideal, kombinasi dari dua pendekatan di atas bisa dipergunakan. Pendekatan teknis nampak lebih cocok diterapkan pada tahap awal, sedangkan pembangunan masyarakat lebih tepat digunakan dalam proses analisa dan evaluasi. Studi ilmiah dan obyektif dapat menyajikan informasi sebagai basis penyusunan input. Sedangkan informasi dari berbagai perspektif dan masyarakat umum dapat membantu dalam memberikan kontribusi untuk analisa dan evaluasi terhadap dampak (Hadi, 2005). Singkatnya, hasil dari kegiatan survai bisa dilanjutkan dengan *interview* dan pertemuan publik (*hearing*), informasi dikumpulkan untuk membuat proyeksi baik dengan atau tanpa pembangunan. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan membantu untuk mengidentifikasi potensi keuntungan (*benefits*) dan ongkos (*cost*) yang dilahirkan oleh rencana pembangunan pariwisata.

#### **5.4.4 Alternatif Kebijakan**

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di Kawasan Danau Lebo, pemerintah mempunyai beberapa alternatif kebijakan untuk pengelolaan kawasan tersebut. Beberapa alternatif tersebut, antara lain: prioritas pengembangan kawasan Danau Lebo sebagai pusat budidaya perikanan; pembuatan waduk untuk irigasi secara permanen; pengembangan sebagai kawasan wisata utama yang didukung oleh kawasan-kawasan wisata yang telah ada.

Dalam penentuan alternatif kebijakan ini, seperti halnya pada tahap indentifikasi masalah dan perumusan tujuan, tidak ada pelibatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan yang lain di luar birokrasi. Padahal sebenarnya

peran penting dari pemangku kepentingan diperlukan, khususnya bagi masyarakat sekitar danau, alternatif-alternatif kebijakan yang dipertimbangkan untuk dilaksanakan akan menentukan juga kehidupan mereka di masa mendatang. Di sini peran dari para ahli sangat dominan karena mereka dianggap memiliki kemampuan memberikan estimasi tentang dampak yang akan terjadi dan memiliki kemampuan menerapkan metodologi yang baik.

### ***Usulan Alternatif Kebijakan***

Alternatif kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan alternatif yang paling *implementible* apabila melihat fungsi dan pemanfaatan kawasan Danau Lebo saat ini. Tetapi agar tidak mengganggu irigasi bagi sawah-sawah di sekitar danau, bagian utara danau agar diberikan talud untuk mencegah rembesan air ke sawah masyarakat. Dan untuk irigasi bagi sawah-sawah tersebut bisa dibuat sistem irigasi terpadu yang menyatu dengan sawah-sawah di bagian timur danau yang memanfaatkan irigasi dari Bendungan irigasi Kalimantanong II.

### **5.4.5 Pilihan Kebijakan**

Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memilih kebijakan untuk mengembangkan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata dimana didalamnya juga termasuk budidaya perikanan sebagai salah satu obyek wisata. Keputusan ini diambil didasarkan atas pertimbangan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, walaupun untuk itu ada pihak-pihak yang dirugikan dari keputusan tersebut. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan proses pengambilan keputusan yang rasional, dimana keputusan yang diambil memberi perhatian utama pada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambil keputusan.

Salah satu pihak yang kurang mendapatkan manfaat dari keputusan ini tentunya adalah masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari

danau ini. Pembangunan sarana dan prasarana jelas akan memperkecil ruang akses mereka dalam mencari ikan. Sistem gali urug yang akan pakai untuk pembangunan kawasan akan menyebabkan sedimentasi dari tanah-tanah material untuk mengurug yang terbawa atau terkikis oleh air. Kawasan di bagian Utara danau yang memiliki ketinggian hampir sejajar dengan permukaan air danau berpotensi untuk terendam akibat gali urug tersebut, disebabkan sifat air yang akan mencari tempat terendah untuk mengalir karena terdorong dan tertutupnya bagian selatan danau oleh material untuk mengurug.

#### ***Usulan Pilihan Kebijakan***

Pilihan kebijakan untuk pengelolaan kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan Danau Lebo perlu dilakukan secara terpadu dan melibatkan semua pihak. Dalam tahap ini bila perlu dilakukan lokakarya dan dihadiri oleh pemangku kepentingan untuk membahas draft kebijakan sebelum diputuskan menjadi suatu kebijakan. Pengambilan keputusan untuk pemilihan kebijakan menggunakan *mixed scanning* yang menawarkan kompromi antara keputusan rasional dan inkrementalisme. Maksud kompromi disini adalah bahwa keputusan tentang kebijakan mempunyai dampak jangka panjang dan juga keputusan-keputusan dengan ruang lingkup terbatas.

### **5.5 Prakiraan Dampak Sosial Pembangunan Kawasan Danau Lebo Sebagai Kawasan Wisata**

#### **5.5.1 Tahap Prakonstruksi**

##### ***Pembebasan Lahan***

**Masalah klasik yang muncul pada tahap prakonstruksi dalam setiap kegiatan pembangunan adalah masalah pembebasan lahan lokasi pembangunan. Masyarakat yang memiliki tanah di sekitar kawasan pembangunan, sampai saat ini sebagian besar tidak memiliki sertifikat tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Sebagian lagi bahkan mengaku mereka**

membangun tempat tinggal di pinggiran danau secara ilegal dengan memanfaatkan sedimentasi/akresi yang terjadi di danau. Oleh karena itu kapanpun mereka disuruh pindah mereka sudah siap walaupun mereka belum tau akan pindah kemana.

Namun dari aspek kemanusiaan muncul pertanyaan apakah pemerintah akan tega mengusir mereka dari tempat yang sudah mereka tinggali selama sekian tahun tanpa ada kompensasi tempat untuk mereka tinggal? Karena dibelakang mereka juga terdapat keluarga mereka yang membutuhkan tempat tinggal dan juga nafkah.

Selain itu kegiatan pemindahan penduduk berpotensi menimbulkan penurunan pendapatan sebagai dampak lanjutan dari hilangnya mata pencaharian penduduk. Menurut Hadi (2005), masyarakat yang telah mapan biasanya memiliki ikatan sosial (*sense of community*) yang tinggi. Ikatan itu menjadi lem perekat bagi warga masyarakat untuk tetap menyatu. Hijrah ke tempat lain akan berarti pudarnya kekerabatan. Implikasi sosial yang mengikutinya sangat rumit; tidak saja menyangkut perubahan mata pencaharian tetapi juga terkoyaknya ikatan sosial dan berubahnya irama kehidupan keseharian.

#### *Paradok Peningkatan Kesejahteraan*

Di Desa Serangin muncul kelompok penjual batu gunung yang dipecahkan (cadas) yang menurut mereka nantinya akan disediakan untuk pembangunan sarana maupun prasarana di

Danau Lebo. Batu gunung tersebut mereka ambil dengan mengeksploitasi bukit-bukit kecil di sekitar wilayah Labu Balat.

Untuk jangka pendek mungkin pendapatan masyarakat setempat akan bertambah. Namun jika dilihat dari perspektif jangka panjang degradasi lingkungan terutama bukit-bukit tempat batuan tersebut diambil akan sulit dikembalikan ke kondisi semula walaupun dilakukan dengan dukungan teknologi yang ada.

#### 5.5.2 Tahap Konstruksi

Pada tahap ini biasanya akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi juga kerap muncul masalah-masalah sosial seperti perilaku dari pekerja proyek yang berasal dari luar daerah yang membawa pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan norma yang berlaku pada masyarakat setempat.

Selain itu potensi terjadinya kecemburuan dari masyarakat lokal yang tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan proyek tersebut (tidak mendapatkan pekerjaan). Keadaan ini bisa memicu konflik dengan para pekerja pendatang. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kebisingan maupun polusi yang diakibatkan oleh kegiatan proyek seperti suara kendaraan pengangkut material maupun partikel-partikel debu yang berterbangan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan tersebut (Hadi, 2001).

### 5.5.3 Tahap Operasional

#### 5.5.3.1 Dampak Sosial Ekonomi

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan pendapatan daerah, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, dan sebagainya.

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi seperti Bali, yang sudah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di dunia tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan tidak tersedianya sumber-sumber daya alam seperti migas, hasil hutan, ataupun industri manufaktur yang berskala besar, maka pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunan.

Antara dan Parining dalam Pitaya dan Gayatri (2005) mengemukakan bahwa pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor, melalui apa yang disebut *open-loop effect* dan *induced-effect* (di samping istilah yang sudah umum dikenal seperti *trickle-down effect* dan *multiplier effect*). Peran pariwisata juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja, walaupun tidak ada angka pasti untuk sektor pariwisata dalam catatan statistik. Tetapi, meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, restoran dan perhotelan secara jelas

menggambarkan peranan sektor yang terkait dengan kepariwisataan.

Di samping berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua penelitian juga menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif), seperti semakin memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, munculnya neo-kolonialisme dan neo-imperialisme, dan sebagainya. Banyak peneliti menyebutkan bahwa pariwisata telah menjadi wahana eksploitasi dari negara-negara maju (negara asal wisatawan) terhadap negara-negara berkembang (daerah tujuan wisata). Berbagai fasilitas wisatawan yang ada di daerah tujuan wisata sebagian besar adalah fasilitas yang diimpor dari negara asal wisatawan. Muatan lokal dari kegiatan pariwisata sangat kecil, karena segala kebutuhan wisatawan maupun aktivitas pendukungnya didatangkan dari berbagai negara maju. Akibat kecilnya muatan lokal, maka kebocoran ekonomi berupa mengalirnya manfaat ekonomi dari negara berkembang ke negara maju menjadi begitu besar, terutama pada fasilitas-fasilitas yang didominasi modal asing.

#### *Perubahan Mata Pencaharian*

Kegiatan pembangunan Danau Lebo merupakan kegiatan berskala besar, dimana setiap tahapan kegiatannya akan menimbulkan dampak terhadap struktur kependudukan khususnya mata pencaharian penduduk. Kegiatan pembebasan lahan akan menimbulkan perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi kegiatan pembangunan danau, hal ini akan menimbulkan dampak lanjutan

terhadap hilangnya lahan garapan penduduk baik petani pemilik maupun buruh tani. Kondisi tersebut diperkirakan menimbulkan dampak berupa hilangnya mata pencaharian baik bersifat permanen maupun sementara.

### ***Kesempatan Kerja dan Berusaha***

Tahapan kegiatan pembangunan Danau Lebo yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesempatan kerja dan berusaha adalah tahap konstruksi dan tahap operasi. Tahap konstruksi pada kegiatan mobilisasi tenaga kerja membutuhkan sejumlah tenaga kerja baik tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus maupun *unskilled*. Peluang kerja ini dapat diisi oleh penduduk yang tinggal di sekitar kegiatan danau maupun di Kabupaten Sumbawa Barat terutama yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan selama kegiatan. Pada tahap operasi sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya Pariwisata, dan perikanan akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja baik sebagai tenaga kerja operator, staf maupun tenaga kerja harian. Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merekrut penduduk yang berada di sekitar lokasi kegiatan dan secara umum di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain peluang kerja, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menumbuhkan aktifitas usaha masyarakat baik formal maupun informal.

### **5.5.3.2 Dampak Sosial Budaya**

Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat sangat sulit diukur dan umumnya dipandang oleh masyarakat setempat hanya memberikan dampak negatif. Dampak positif sosial budaya dari aktifitas pariwisata adalah terjadinya pemahaman dan saling pengertian antar budaya (*inter-cultural understanding*) antara pengunjung wisata (*touris*) dan masyarakat setempat, dimana *touris* mengenal dan menghargai kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat dan sebaliknya masyarakat setempat juga dapat memahami dan menghargai latar belakang sosial budaya turis . Dampak negatif yang dapat muncul apabila kehidupan sosial budaya masyarakat setempat rentan terhadap intrusi sosial budaya luar adalah erosi atau hilangnya kehidupan sosial budaya

masyarakat setempat yang berusaha meniru budaya *touris*. *Touris* kadang dipandang oleh generasi muda di masyarakat setempat sebagai orang yang lebih kaya dan lebih baik secara sosial dengan gaya hidup yang menyenangkan sehingga mereka berusaha meniru gaya hidup mereka tanpa menyadari bahwa para pengunjung wisata bekerja keras selama setahun penuh atau lebih dan menyimpan uangnya sehingga mampu membiayai liburan dan kunjungannya.

Turis juga dilihat sebagai sumber uang "*instant*" (*easy cash, easy money*) yang menyebabkan orang berusaha mengambil keuntungan dari turis, misalnya lewat penipuan, perampokan bahkan melalui layanan sex. Kadangkala penyedia pariwisata juga secara sadar memanfaatkan uang instant turis melalui investasi judi dan sex karena para turis dinilai secara salah bahwa mereka berkunjung atau berlibur hanya untuk menghamburkan uang mereka (sambil mencoba keberuntungannya) dan untuk menyenangkan atau memenuhi kebutuhan sex mereka. Memang disadari ada juga sejumlah turis dengan tujuan-tujuan tertentu seperti itu. Dampak negatif sosial budaya dari pariwisata seperti ini dapat menimbulkan degradasi nilai budaya dan religius, konflik sosial budaya di masyarakat setempat, dan timbulnya penyakit sosial dan penyakit menular (misalnya AIDS dan PMS) di masyarakat setempat.

Dengan demikian dampak sosial budaya pariwisata, walaupun sulit diukur, dapat dilihat melalui tingkat kejahatan (*crime rate*), erosi sosial budaya setempat, konflik diantara masyarakat, penyakit menular, dan tingkat frustrasi di masyarakat akibat pertentangan atau konflik sosial budaya. Dampak pariwisata terhadap peninggalan budaya (*cultural heritage*) dan tradisi juga penting untuk diperhatikan. Pengembangan dan promosi budaya daerah seperti musik garompong, gong genang, sakeco, ratib dan peninggalan budaya lainnya seperti sarakal, hadrah dapat dimanfaatkan dan dijaga keberlanjutannya di masyarakat. Selain itu identifikasi dan penguatan tradisi budaya dan peninggalan setempat akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat akan budaya dan sejarah unik masyarakat setempat. Tradisi budaya dan sejarah masyarakat setempat merupakan aset penting pengembangan pariwisata karena

banyak turis tertarik untuk memahami dan mempelajari sejarah dan keunikan budaya masyarakat setempat.

Lebih lanjut dari kajian beberapa literature, dampak negatif pariwisata terhadap suatu kawasan dari aspek budaya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1  
Dampak Negatif Pariwisata

<b>Komponen Lingkungan</b>	<b>Fenomena Dampak Negatif</b>	<b>Kegiatan pariwisata yang menimbulkan dampak negatif</b>
Nilai dan kepercayaan	Adopsi nilai-nilai dan kepercayaan yang tidak sesuai	Interaksi intensif dengan penduduk setempat Gaya hidup hedonis
	Tidak mengindahkan nilai-nilai adat	Tidak menghormati adapt setempat Tidak memahami adat setempat
Moral	Pelacuran	Promosi tak resmi negative Wisatawan yang suka melacur
	Mabuk	Adopsi kebiasaan minum wisatawan yang buruk Mudahnya memperoleh minuman Beralkohol
Perilaku	"Kebarat-baratan"	Mengacaubalaukan modernisasi dengan perilaku orang Barat Gaya hidup Barat yang menarik
	Mengabaikan perilaku Indonesia	Perilaku orang asing yang menarik Perilaku wisatawan yang "bebas berbuat apa saja"
Seni dan kerajinan	Kerusakan bentuk seni adat	Komersialisasi seni Bentuk seni adat asli tidak menarik bagi wisatawan
	Kerusakan dan hilangnya benda budaya	Tindakan buruk wisatawan Benda budaya tidak dilindungi dengan baik Akses tak terkendali ke benda budaya Tidak adanya perawatan
Hukum dan keterlibatan	Meningkatnya pelanggaran hukum	Wisatawan menarik penjahat Narkotika dan obat bius lainnya Wisatawan sebagai kurir gang/kelompok penjahat Tidak memahami sistem legal Indonesia
Sejarah	Salah menafsirkan sejarah nasional	Fakta sejarah tidak cermat Fakta ssejarah diabaikan

### ***Perubahan Pola Pemilikan dan Penguasaan SDA***

Kegiatan pembebasan lahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap hilangnya hak kepemilikan atas lahan masyarakat. Perubahan tersebut diperkirakan menimbulkan dampak terhadap penurunan ekonomi rumah tangga, khususnya tingkat pendapatan penduduk. Kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap perubahan pola kepemilikan dan penguasaan SDA adalah pemindahan penduduk, pariwisata dan kegiatan perikanan.

### ***Konflik Sosial***

Kegiatan pembebasan lahan yang berlarut-larut dan ketidakjelasan kepastian kegiatan pembangunan waduk berpotensi menimbulkan konflik sosial baik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal terjadi akibat ketidaksepahaman antara tujuan yang ingin dicapai masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat. Konflik horisontal terjadi karena terjadinya sikap pro dan kontra di masyarakat terhadap rencana kegiatan.

Kegiatan mobilisasi tenaga kerja diperkirakan dapat menimbulkan gangguan terhadap interaksi sosial di masyarakat berupa :

#### ***1 Terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat.***

Prakiraan timbulnya kecemburuan sosial apabila dalam rekrutmen tenaga kerja pihak proyek Waduk Jatigede lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar diluar dari ketentuan yang telah diberlakukan, khususnya untuk tenaga kerja *unskilled*.

#### ***2 Terjadinya interaksi sosial antara pendatang dengan penduduk lokal.***

Proses interaksi yang terjadi diperkirakan negatif karena tenaga kerja pendatang harus melakukan proses adaptasi dengan tenaga kerja lokal dan

penduduk setempat. Pada tahap proses adaptasi ini diperkirakan terjadi perselisihan antara pendatang dengan tenaga kerja lokal dan penduduk setempat.

Perselisihan dengan tenaga kerja lokal akan terjadi karena adanya konflik dalam bidang pekerjaan, dimana penduduk lokal diberi pekerjaan untuk kategori tenaga kerja kasar sedangkan tenaga kerja pendatang diberi pekerjaan untuk kategori tenaga kerja ahli

### ***Perubahan Pola Hidup/Kebiasaan***

Kegiatan pembangunan Danau Lebo berpotensi menimbulkan dampak terhadap pola hidup/kebiasaan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan dari sejak tahap pra konstruksi sampai tahap operasi. Perubahan pola hidup/kebiasaan tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungan di sekitarnya. Kegiatan pemindahan penduduk diperkirakan menimbulkan dampak terhadap pola kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan aktifitas usaha dan relasi sosial. Lokasi baru membutuhkan proses adaptasi dalam pola tanam terutama guna menghadapi perubahan kondisi lahan dari lahan basah ke lahan kering atau tadah hujan. Lingkungan baru membutuhkan proses adaptasi penduduk asal sekitar danau yang pindah dengan nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di tempat baru.

## **5.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Danau Lebo**

Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus di dalam lingkungan (Atkinson dalam Ginting, 2006). Chaplin dalam Ginting (2006) memandang persepsi sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indra.

Proses perseptual ini dimulai dengan perhatian, yaitu merupakan proses pengamatan selektif. Didalamnya mencakup pemahaman dan mengenali atau mengetahui objek-objek serta kejadian-kejadian (Chaplin dalam Ginting, 2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Baltus dalam Ginting (2006) adalah :

1. Kemampuan dan keterbatasan fisik dari alat indera dapat mempengaruhi persepsi untuk sementara waktu ataupun permanen.
2. Kondisi lingkungan.
3. Pengalaman masa lalu. Bagaimana cara individu untuk menginterpretasikan atau bereaksi terhadap suatu stimulus tergantung dari pengalaman masa lalunya.
4. Kebutuhan dan keinginan. Ketika seorang individu membutuhkan atau menginginkan sesuatu maka ia akan terus berfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkannya tersebut.
5. Kepercayaan, prasangka dan nilai. Individu akan lebih memperhatikan dan menerima orang lain yang memiliki kepercayaan dan nilai yang sama dengannya. Sedangkan prasangka dapat menimbulkan bias dalam mempersepsi sesuatu.

Sedangkan menurut Chaplin dalam Ginting (1999) persepsi secara umum bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor-faktor motivasional. Maka, arti suatu objek atau satu kejadian objektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun faktor-faktor organisme. Dengan alasan sedemikian, persepsi mengenai dunia oleh pribadi-pribadi yang berbeda juga akan berbeda karena setiap individu menanggapinya berkenaan dengan aspek-aspek situasi tadi yang mengandung arti khusus sekali bagi dirinya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai persepsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif dan afektif individu untuk melakukan pemilihan, pengaturan, dan pemahaman serta penginterpretasian rangsang-rangsang indrawi menjadi suatu gambar obyek tertentu secara utuh.

Pengelolaan lingkungan sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pelestarian lingkungan secara edukatif ialah menegakan keadilan sosial, mengembangkan demokrasi politik dan kebebasan budaya. Tanpa keadilan sosial (*social justice*) niscaya pengelolaan lingkungan sosial dapat memberdayakan

mereka sebagai mitra, melainkan hanya akan menciptakan museum hidup yang layak menjadi tontonan. Hak-hak mereka untuk mengembangkan usaha, mengolah sumber daya dan mengelola lingkungannya secara aktif harus dipulihkan. Hak-hak masyarakat atas tempat berlindung, sumber makanan, tempat mendidik anak-anak, sarana integratif maupun arena aktualisasi diri harus dihormati. Karena itu tegakan kembali kedaulatan rakyat (*political democracy*) agar mereka dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program pembangunan yang menyangkut kepentingan mereka secara langsung atau tidak langsung.

Apa yang tidak kalah pentingnya ialah memberikan kebebasan budaya (*cultural freedom*) untuk merangsang kreativitas ke arah pembaharuan dalam menanggapi tantangan pembangunan. Berikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan dengan mengacu pada kebudayaan mereka sebagai pedoman dalam beradaptasi terhadap lingkungannya secara aktif.

Berkaitan dengan pengembangan Kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ini, secara umum persepsi masyarakat terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Kelompok yang setuju;
2. Kelompok yang tidak peduli; dan
3. Kelompok yang menolak.

Kelompok yang setuju adalah mereka yang menganggap bahwa segala yang direncanakan dan akan dilakukan oleh pemerintah adalah yang terbaik untuk kemajuan mereka. Kelompok ini sebagian besar adalah merupakan orang-orang awam yang berpendidikan rendah secara formal. Mereka menganggap apa yang mereka perlukan hanyalah tercukupinya kebutuhan dasar secara berkesinambungan. Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuatu yang baik bagi mereka. Dan walaupun pembangunan tersebut memberikan dampak negatif bagi mereka, mereka tidak punya kekuasaan untuk menolak hal tersebut.

*”Kami ini orang kecil yang tidak tau apa-apa. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membangun danau pasti sudah dipikirkan baik buruknya. Yang kami inginkan hanyalah agar kami tetap diijinkan untuk mencari ikan. Saat ini kami memiliki anggota kurang lebih 2.050 orang yang memiliki Kartu Biru dan sekitar 170 orang hidupnya sangat tergantung kepada Lebo. Kalau pemerintah tidak mengizinkan kami untuk mencari ikan lagi di Lebo kami harapkan pemerintah sudah mempunyai jalan keluar yang lain bagi kami”.*

Demikian harapan dari Patahullah ketua kelompok nelayan Lala Jinis yang berada di Desa Rempe.

Sementara itu Hj. Rasyid mengatakan bahwa beliau mempunyai tanah di kawasan Lebo. Kalau pemerintah akan membebaskan tanahnya beliau berharap agar harganya sesuai dengan harga tanah saat ini. Tetapi beliau juga mengakui bahwa tidak mempunyai sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Yang beliau punya hanyalah SPPT yang menurut beliau adalah bukti kepemilikannya atas tanah tersebut.

Beberapa masyarakat di Desa Meraran percaya bahwa walaupun kawasan Lebo akan dibangun, mereka tetap akan diberi akses untuk mencari ikan seperti yang mereka lakukan sampai saat ini. Hal ini didasarkan pada pernyataan-pernyataan bapak bupati pada acara-acara pertemuan dengan masyarakat yang secara eksplisit menyebutkan bahwa masyarakat tetap akan diberi kesempatan untuk memanfaatkan keberadaan danau seperti yang selama ini mereka lakukan tetapi dengan beberapa aturan agar keberadaan danau tetap lestari dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun menurut mereka dalam pemanfaatan terhadap danau ini oleh masyarakat tidak perlu diatur secara formal karena sumber daya yang ada di danau (ikan, *tonyong*, dan lain-lain) tidak akan habis. Sebagian besar nara sumber juga menyatakan akan membiarkan apabila orang dari daerah lain turut mengambil sumberdaya hayati dari hutan di sekitar kampung mereka. Sebagian besar masyarakat juga tidak menganggap perlu untuk membuat aturan dalam pengambilan sumberdaya hayati danau. Namun, semua nara sumber yang memiliki tanah ladang/kebun menyatakan akan menanam diladang atau kebun mereka apabila pemerintah menyediakan bibit tanaman pohon yang berguna.

Di samping orang-orang awam, mereka yang setuju juga terdiri dari orang-orang yang berpendidikan cukup tinggi walaupun jumlahnya relatif kecil. Mereka beranggapan bahwa apa yang pemerintah akan lakukan adalah hal yang terbaik bagi masyarakatnya dan telah direncanakan dengan baik.

Kelompok kedua adalah yang beranggapan bahwa dibangun atau tidaknya Danau Lebo tidak menjadi persoalan bagi mereka. Mereka bersyukur bila pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih kepada mereka. Kalaupun tidak, toh mereka tidak pernah menggantungkan hidupnya dari keberadaan tempat ini. Kelompok yang tidak peduli ini mayoritas berasal dari Desa Mura yang *notabane* mereka selama ini sangat jarang sekali memanfaatkan keberadaan Danau Lebo. Menurut Arrahman pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah tidak akan memberikan manfaat maupun perubahan yang signifikan terhadap pendapatan maupun pola hidup yang selama ini dia jalani. Demikian juga pendapat dari Safruddin yang hampir senada dengan Arrahman. Beliau bahkan lebih memilih agar dana pembangunan untuk Danau Lebo bisa dialihkan untuk pembangunan prasarana yang lain yang lebih dibutuhkan oleh warga seperti perbaikan fasilitas umum yang sudah banyak yang rusak. Akan tetapi kalau Danau Lebo tetap dibangun, dia menginginkan agar bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan danau atau memanfaatkannya dapat dilakukan seperti selama ini dilakukan.

Dari kutipan beberapa pendapat diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan pada sumber daya yang ada sangat mempengaruhi persepsi masyarakat.

Kelompok ketiga adalah mereka yang memiliki pengalaman buruk terhadap hasil-hasil pembangunan. Menurut kelompok ini, pengalaman telah mengajarkan kepada mereka bahwa apa yang pemerintah akan lakukan dengan membangun Kawasan Danau Lebo ini adalah upaya pemerintah untuk mendapatkan penghasilan dengan menguras dan mengeksploitasi kekayaan yang seharusnya dapat mereka manfaatkan seperti pendahulu-pendahulu mereka. Pembangunan ini dikhawatirkan akan membatasi akses mereka dalam

memanfaatkan danau yang menyebabkan mata pencarian mereka menjadi hilang dimana keadaan ini akan menambah kesengsaraan mereka.

Ketidak setujuan ini juga datang dari masyarakat yang saat ini tinggal di sekitar danau yang akan menjadi lokasi pembangunan. Mereka tinggal disini secara illegal sehingga dengan adanya pembangunan ini secara otomatis mereka harus meninggalkan lokasi tersebut karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menuntut apapun dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tempat tersebut saat ini oleh mereka.

Selain itu masyarakat Desa Sampir sebagian besar kurang setuju dengan rencana pembangunan tersebut. Mereka menginginkan Danau Lebo tidak perlu dibangun tetapi cukup dibersihkan saja dari eceng gondok maupun teratai sehingga terlihat bersih dan memberikan kenyamanan dalam mencari ikan. Namun apabila pemerintah tetap melakukan pembangunan terhadap Danau Lebo mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut mereka, walaupun mereka tetap diberikan kesempatan untuk mencari ikan, dengan adanya pembangunan yang dilakukan maka ruang mereka untuk mencari ikan akan menjadi sempit dan kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di tempat itu sedikit banyak akan mengganggu keberadaan ikan-ikan yang mereka cari.

Mengantisipasi hal tersebut, masyarakat Desa Sampir telah mengembangkan sistem perikanan kerambah yang mereka usahakan disepanjang aliran sungai yang melalui wilayah mereka. Usaha ini hanya mereka jalankan pada musim kemarau disaat air sungai jernih dan debit air tidak terlalu besar. Sementara pada musim hujan kerambah-kerambah tersebut diangkat dari sungai dan disimpan dimana selanjutnya akan digunakan pada musim kemarau berikutnya.

Sementara itu dari aspek institusi pengelola pembangunan terdapat perbedaan pendapat mengenai *leading sector* pengelolaan. Dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006, anggaran pembangunan sudah dianggarkan pada Pos Dinas Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi. Di tengah jalan proyek ini ditunda dan anggarannya lantas dialihkan untuk proyek pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten. Kemudian dalam

APBD Tahun 2007, anggaran pembangunan Danau Lebo dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Pertamanan.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. H. Abdul Razak, kebijakan ini berlawanan dengan prinsip manajemen modern dan tidak sesuai dengan aturan baru. Menurutnya pihak Disparhubtel punya kemampuan mengelola anggaran perencanaan Danau Lebo tadi. Pihaknya juga lebih berhak dibanding Dinas PU dan Pertamanan.

Dinas PU dan Pertamanan sendiri mengatakan bahwa pengalihan tersebut lebih karena secara teknis instansi ini lebih berwenang dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Namun setelah itu pengelolaannya akan diserahkan ke Dinas Parhubtel sesuai tupoksi instansi masing-masing.

Terlepas dari siapa yang berwenang mengelola pembangunan Danau Lebo, Sekretaris Kecamatan Taliwang Irawan, S.Sos berharap agar dengan dibangunnya Danau Lebo ini fungsi Danau Lebo sebagai sumber mata pencarian dan daerah tangkapan air tetap bisa dipertahankan. Dalam beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kabupaten, memang terlihat adanya keinginan kuat untuk tetap mempertahankan fungsi-fungsi di atas, namun menurut beliau dalam implementasinya nanti tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan dari konsep yang direncanakan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata persepsi masyarakat tidak selamanya sejalan dengan partisipasi. Persepsi yang baik tidak menjamin terjadinya partisipasi positif, malah dapat sebaliknya negatif. Banyak faktor, terutama kepentingan untuk memperoleh keuntungan pribadi sesaat, mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk berbuat baik. Beginilah gambaran masyarakat Desa Meraran dan Rempe khususnya dalam memanfaatkan sumberdaya hayati yang terdapat pada kawasan danau.

Mungkin sebuah kondisi yang agak jauh dari harapan ketika kita mengusung 'kearifan lokal' sebagai hal yang selalu positif. Banyak peneliti yang keliru dalam menetapkan parameter untuk menilai adanya kearifan lokal di masyarakat. Mereka sering menetapkan bahwa suatu masyarakat lokal itu arif

hanya dari adanya istilah-istilah tertentu dalam bahasa lokal, misalnya ada istilah yang berarti hutan keramat, semak belukar, padang rumput, bekas ladang, pohon, perdu, anakan pohon, musim buah, musim burung kawin, musim mencari madu dan banyak lagi yang lainnya, tanpa menganalisis secara mendalam apa makna dari istilah tersebut. Semua masyarakat yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi memiliki istilah-istilah tertentu untuk menyatakan benda-benda yang ada di lingkungannya. Adanya istilah-istilah yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal mereka bukan jaminan masyarakat tersebut arif dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Hasil penelitian ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan hanya sekedar istilah dalam berbahasa, persepsi yang baik sekalipun tidak menjamin adanya partisipasi positif, dengan kata lain tidak menjamin adanya kearifan lokal.

## 5.6 Analisis Rencana Pembangunan Kawasan Danau Lebo

### 5.6.1 Analisis Kebijakan Pembangunan Danau Lebo

**Integrasi vertikal (*multilevel*) dan horizontal (lintas sektoral dan lintas kawasan) dalam pembangunan Danau Lebo, merupakan suatu kewajiban jika pembangunan pariwisata tidak hanya dimaksudkan sebagai mesin efektif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, akan tetapi juga sebagai instrumen yang handal bagi distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan serta humanisasi kehidupan masyarakat. Integrasi yang demikian itu juga sangat diperlukan untuk mengeliminasi munculnya berbagai problematika pembangunan pariwisata, seperti: kenaikan harga yang tidak terkendali, perubahan sikap dan perilaku masyarakat, tekanan terhadap masyarakat (kepadatan penduduk, kebisingan), hilangnya sumberdaya, akses, hak-hak *privacy*, prostitusi dan erosi budaya lokal, merosotnya**

estetika lingkungan, hilangnya kontrol atas masa depan masyarakat serta berbagai problematika khusus seperti kekerasan terhadap wisatawan, kesemrawutan lalu lintas, polusi, sampah berserakan, buruh musiman dan sejenisnya.

Perencanaan terpadu dalam pembangunan Danau Lebo sebagai kawasan wisata memerlukan adanya peningkatan kemitraan antar instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang saling terkait. Peningkatan kemitraan tersebut dimaksudkan untuk saling menunjang dan kemitraan antar pemerintah daerah serta swasta dengan masyarakat setempat untuk menumbuhkembangkan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan penunjang kepariwisataan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Agar dapat mengakomodasikan integrasi vertikal dan horizontal sebagai upaya pengembangan kawasan pariwisata, pembangunan kawasan Danau Lebo mengacu pada paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut menghendaki ketaatan pada prinsip-prinsip perencanaan sebagai berikut:

1. Prinsip pengembangan pariwisata yang berpijak pada aspek kelestarian dan berorientasi ke depan, berpola lintas sektoral.
2. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal.
3. Prinsip pengelolaan asset geografis dan sumber daya alam yang tidak merusak.

4. **Kesesuaian antara kegiatan pengembangan pariwisata dengan skala, kondisi, dan karakter suatu kawasan yang akan dikembangkan.**
5. **Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup, dan masyarakat lokal yang bermuara pada pengembangan apresiasi yang lebih peka pada wawasan budaya, lingkungan hidup, dan jati diri bangsa dan nilai-nilai agama.**
6. **Antisipasi yang tepat dan monitoring terhadap proses perubahan yang terjadi akibat program pariwisata dan berorientasi untuk memperkuat potensi lokal dan kemampuan masyarakat setempat.**

Mengingat bahwa kegiatan kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang bersifat multidimensi (fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya dan hankam) dan juga melibatkan penawaran jenis produk dan wisatawan yang sangat beragam (wisata alam, wisata lingkungan, wisata budaya, dan beragamnya wisata minat khusus), maka dalam pembangunan kawasan Danau Lebo Kecamatan Taliwang tetap memperhatikan perspektif perencanaan dan pengelolaan yang bersifat untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pelaksanaan pembangunan kawasan Danau Lebo juga harus melibatkan seluruh masyarakat secara mendalam (dalam konteks kehidupan keseharian yang bersifat histories, sosiologi dan agama). Mengingat hal tersebut, maka pembangunan

**kawasan Danau Lebo menggunakan pendekatan kepariwisataan harus memiliki karakter sebagai berikut:**

- 1. Berkelanjutan (tidak merusak lingkungan, secara ekologis dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan dampak negatif pariwisata berskala besar yang minimal).**
- 2. Terdiri atas pembangunan atraksi-atraksi dan amenities yang berskala kecil, berwajah manusiawi dan dapat diorganisasi oleh masyarakat pada hirarki yang lebih rendah (skala daerah maupun lokal).**
- 3. Memiliki dampak distribusi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakat setempat yang kuat.**

Dari beberapa point penting di atas secara makro beberapa kebijakan yang perlu mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah bagaimana agar pembangunan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata dapat memberi jaminan keberhasilan pengembangan pariwisata daerah dengan menciptakan lingkungan yang memenuhi harapan dan kebutuhan wisatawan, menawarkan lingkungan yang memberikan pengalaman baru, tanggap terhadap tuntutan wisatawan.

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut di atas, titik berat rencana pengelolaan pariwisata mencakup perumusan kepentingan berbagai pihak terkait dalam suatu konsep kemitraan, merumuskan prinsip-prinsip manajemen yang ramah lingkungan (fisik dan budaya) untuk pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan kawasan wisata, merumuskan sistem pengawasan dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, pengelolaan, dan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam menunjang sistem pengawasan di atas, merumuskan sistem pengelolaan komponen pariwisata yang ada di kawasan, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan pengunjung, dimana dalam

setiap kegiatan tersebut diatas agar tetap mengikutsertakan semua pemangku kepentingan.

#### 5.6.2 Analisis Metode Penentuan Kegiatan, Metode Survai, Metode Analisis Dan Metode Perencanaan

**Dalam penentuan kegiatan terutama lokasi kegiatan akan dilaksanakan jangan hanya terpusat pada satu titik. Sebisa mungkin kegiatan dibuat dalam zona-zona yang tersebar agar pertumbuhan penduduk dapat berjalan secara berimbang di semua pusat-pusat kegiatan. Nichols dan Moseley dalam Hadi (2006) secara ekstim menemukan bahwa dengan adanya pemusata pertumbuhan yang terjadi bukan *trickle down* tetapi *trickle up*, karena justru tenaga kerja yang berkualitas dan investasi mengalir dari daerah belakang ke pusat pertumbuhan. Daerah pusat juga menyedot daya dukung lingkungan.**

**Dalam banyak kasus, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan wisata dapat memarjinalkan penduduk lokal, merusak budaya lokal dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dari metode-metode tentang rencana kerja Danau Lebo penyertaan penduduk lokal dalam setiap tahapan kegiatan tidak terlihat. Demikian pula metode analisis seharusnya yang menjadi prioritas utama dalam analisis adalah kajian terhadap kebijakan pelestarian dan pemeliharaan sumber daya alam yang sangat penting bagi pengembangan pariwisata daerah, apalagi Danau Lebo merupakan kawasan konservasi yang pemanfaatannya perlu dilakukan berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan.**

Dari metodologi perencanaan yang digambarkan sangat terlihat prinsip perencanaan yang *top-down*. Pada kondisi pemerintah menginginkan efektifitas implementasi suatu kebijakan, perencanaan model *top-down* bisa dilaksanakan. Apabila yang diinginkan adalah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, maka model perencanaan seperti ini perlu dikaji kembali. Hadi (2001) memperkenalkan teori perencanaan transkatif/pembelajaran sosial. Menurut Hadi, teori ini untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dan apa yang harus kita lakukan. Perencanaan, melalui eksperimen sosial, mencoba untuk merubah perilaku sosial. Hal ini dicapai dengan menterjemahkan pengetahuan ke dalam dunia praktis, dan teori diperkaya dari pelajaran-pelajaran di lapangan.

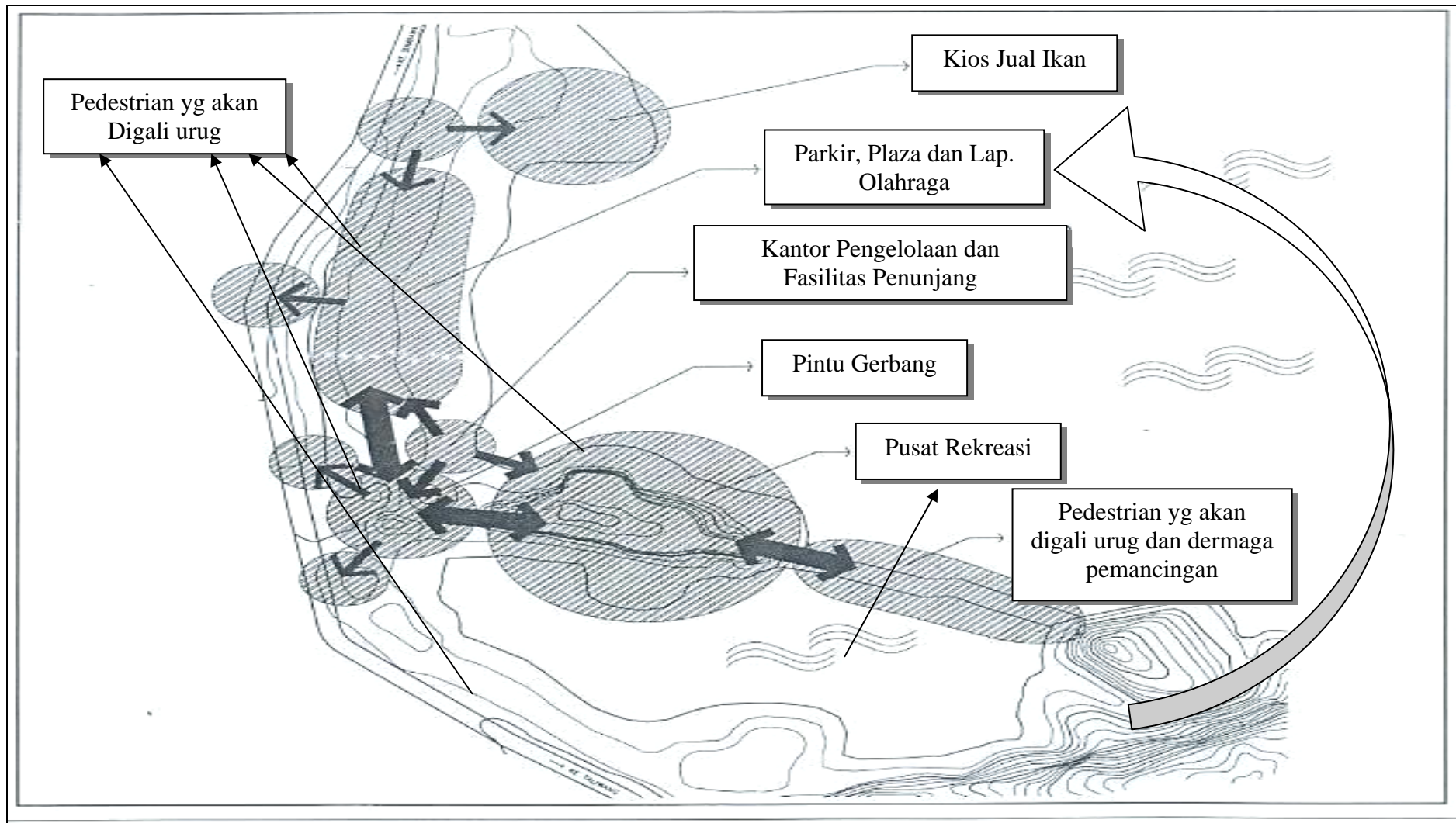
Permasalahan yang muncul dari penentuan kegiatan dalam perencanaan terhadap kawasan Danau Lebo yaitu pengembangan kegiatan pariwisata masih fokus hanya pada pengembangan aspek fisik saja. Saat ini dalam pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti dengan mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh kawasan tersebut, apakah upacara adat yang dimiliki atau kegiatan unik yang ada contohnya permainan masyarakat "*badempa*" di Desa Mantar.

### 5.6.3 Analisis Hubungan Antar Zona

**Pemanfaatan zona 2 sebagai tempat parkir, plaza dan lapangan olah raga yang notabane merupakan areal yang tandus akan mengakibatkan tingkat kebisingan yang tinggi. Untuk meminimalisir kebisingan tersebut bisa dilakukan penanaman pohon disekitar areal tersebut. Selain untuk mengurangi**

kebisingan penanaman pohon ini bisa memberikan efek sejuk. Sementara untuk zona 3 akan dilakukan gali urug. Jika hal ini dilakukan akan berdampak pada ekosistem danau yang bisa menyebabkan suksesi. Dalam pembangunan zona ini bisa dilakukan dengan pembuatan sirkulasi masuk ke fasilitas dengan menggunakan bahan kayu sehingga tidak perlu gali urug tetapi tinggi kayu penyanggah bisa disesuaikan dengan kedalaman air. Bangunan tempat pedestrian ini bisa dibuat seperti dermaga. Dengan kata lain, sedapat mungkin dalam pembangunan ini pemerintah daerah tetap mempertahankan kontur yang ada dan dalam pengembangannya bukan kontur yang disesuaikan dengan rencana tetapi rencana yang dibuat mengikuti kontur lahan.

Dalam penyusunan hubungan antar zona ini pada intinya adalah perhatian terhadap pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penatan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengertian pembangunan yang menguntungkan semua pemangku kepentingan. Selain itu informasi yang valid perlu disampaikan kepada masyarakat agar mereka dapat menjadi bagian penentu kebijakan yang diambil dalam kaitannya mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan yang dilaksanakan.



**Gambar 5.7**  
**Hubungan Antar Zona**  
 (Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006, Data Diolah)



#### 5.6.4 Analisis Potensi Dan Permasalahan Kawasan Danau Lebo Sebagai Kawasan Wisata

Kondisi lingkungan di kawasan Danau Lebo dalam perspektif pembangunan kawasan danau ini sebagai kawasan wisata dapat dilihat dalam analisis SWOT sederhana di bawah ini:

##### 1. **Strength (Kekuatan)**

- a. Potensi sumber daya alam Danau Lebo
- b. Potensi budaya lokal masyarakat sekitar danau
- c. Lokasi Sumbawa Barat yang berada antara Lombok dan P. Komodo
- d. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan

##### 2. **Weakness (Kelemahan)**

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku wisata dan pemerintah terhadap ekowisata
- b. Lemahnya kemampuan SDM masyarakat sekitar danau
- c. Belum terkoordinasinya kegiatan instansi pemerintahan dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat lokal
- d. Belum adanya kerangka acuan pengembangan dan pedoman pelaksana pembangunan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan.
- e. Kurangnya sarana prasarana

##### 3. **Opportunities (Peluang)**

- a. Pengembangan Kawasan Wisata pendukung Danau Lebo seperti Poto Batu dan Labuan Balat
- b. Kesadaran wisatawan terhadap pelestarian lingkungan
- c. Masyarakat yang partisipatif
- d. Arah pengembangan wisata dunia yang berorientasi pada pelestarian lingkungan
- e. Dukungan pelaku wisata

##### 4. **Threat (Ancaman)**

- a. Pembangunan yang tak terkontrol sehingga merusak lingkungan
- b. Kerentanan masyarakat terhadap pengaruh pengelolaan sumber daya alam yang menjanjikan nilai ekonomi

- c. Sulitnya pemasaran produk
- d. *Booming* gulma air.

Berdasarkan potensi dan permasalahan Kawasan Wisata Danau Lebo, maka dapat dikembangkan strategi pengembangan yang dapat menghasilkan beberapa kemungkinan alternatif strategi, yaitu dengan memetakan komponen-komponen Kekuatan dan Kelemahan kepada faktor Peluang dan Tantangan, sehingga hasil pemetaan tersebut adalah Strategi S-O, untuk menangkap peluang dengan kekuatan yang ada (paling optimis), Strategi S-T, menghadapi tantangan dengan mengandalkan kekuatan, Strategi W-O, memanfaatkan peluang dengan segala keterbatasan, dan Strategi W-T, menghadapi tantangan dengan keterbatasan yang ada. Strategi ini juga disebut sebagai strategi yang paling pesimistis dan sangat lemah pengaruhnya bagi pengembangan daerah.

### **1. Strategi S-O**

- a. Mempertahankan dan mengembangkan kawasan wisata pendukung dan memaksimalkan potensi sumber daya alam kawasan Danau Lebo.
- b. Mengembangkan pariwisata dengan memantapkan obyek-obyek wisata yang sudah ada dan penyediaan fasilitas serta utilitas pendukung. Sehingga pariwisata dapat menjadi sektor yang berperan dalam pengembangan ekonomi daerah.
- c. Meningkatkan pola hidup yang sadar lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat dengan konsolidasikan unsur lokal yang telah ada dalam perumusan dan implementasi kebijakan penataan ruang, mekanisme pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Wisata Danau Lebo.
- d. Pengembangan ekowisata.

### **2. Strategi O-W**

- a. Melibatkan unsur masyarakat lokal dalam proses penataan ruang kawasan.
- b. Menetapkan kawasan dengan kondisi fisik tertentu sebagai kawasan lindung dan pembatasan intensitas kegiatan budidaya di daerah penetrasi, serta pelarangan pengembangan intensitas kegiatan budidaya pada kawasan berfungsi lindung.

- c. Menetapkan zonasi pemanfaatan danau.

### **3. Strategi S-T**

- a. Merumuskan kebijakan yang mengatur kegiatan budidaya (terutama pariwisata, pertanian, perikanan) yang berlangsung di daerah sempadan danau dengan memperhatikan kondisi *catchment area* Danau Lebo, serta menjaga keasrian alami danau.
- b. Memantapkan aksesibilitas (untuk memperkuat kemampuan kawasan dalam menerima beban aliran dari luar)
- c. Mengantisipasi *booming* gulma air dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- d. Melibatkan masyarakat lokal dalam mengendalikan kegiatan budidaya yang berada di kawasan sempadan danau, tubuh air maupun *catchment area*.

### **4. Strategi T-W**

- a. Mengoptimalkan penggunaan lahan di wilayah yang dapat dibudidayakan sehingga terjaga keberlanjutannya.
- b. Menjaga kawasan berfungsi lindung yang mulai terpenetrasi oleh kegiatan budidaya (terutama di timur kawas danau, yang intensitas kegiatan budidayanya relatif lebih rendah daripada daerah di sebelah barat danau) agar perkembangannya dapat lebih terkendali.

## **5.7 Usulan Pengelolaan Lingkungan**

### **5.7.1 Pengelolaan Sampah**

Agar pengelolaan sampah berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap kegiatan pengelolaan sampah harus mengikuti filosofi pengelolaan sampah. Filosofi pengelolaan sampah adalah bahwa semakin sedikit dan semakin dekat sampah dikelola dari sumbernya, maka pengelolaannya akan menjadi lebih mudah dan baik, serta lingkungan yang terkena dampak juga semakin sedikit.

Tahapan Pengelolaan sampah yang dapat dilakukan di kawasan wisata alam adalah:

**a. Pencegahan dan Pengurangan Sampah dari Sumbernya**

Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan pemilahan atau pemisahan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap kawasan yang sering dikunjungi wisatawan.

**b. Pemanfaatan Kembali**

Kegiatan pemanfaatan sampah kembali, terdiri atas:

1. Pemanfaatan sampah organik, seperti composting (pengomposan). Sampah yang mudah membusuk dapat diubah menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan untuk melestarikan fungsi kawasan wisata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan melakukan kegiatan composting sampah organik yang komposisinya mencapai 70%, dapat direduksi hingga mencapai 25%.
2. Pemanfaatan sampah anorganik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan kembali secara langsung, misalnya pembuatan kerajinan yang berbahan baku dari barang bekas, atau kertas daur ulang. Sedangkan pemanfaatan kembali secara tidak langsung, misalnya menjual barang bekas seperti kertas, plastik, kaleng, koran bekas, botol, gelas dan botol air minum dalam kemasan.

**c. Tempat Pembuangan Sampah Akhir**

Sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomis baik dari kegiatan composting maupun pemanfaatan sampah anorganik, jumlahnya mencapai  $\pm 10\%$ , harus dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Di Indonesia, pengelolaan TPA menjadi tanggung jawab masing-masing Pemda. Dengan pengelolaan sampah yang baik, sisa sampah akhir yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi hanya sebesar  $\pm 10\%$ . Kegiatan ini tentu saja akan menurunkan biaya pengangkutan sampah bagi pengelola kawasan wisata alam, mengurangi luasan kebutuhan tempat untuk lokasi TPS, serta memperkecil permasalahan sampah yang saat ini dihadapi oleh banyak pemerintah daerah.

Pengelolaan sampah yang dilakukan di kawasan wisata alam, akan memberikan banyak manfaat, diantaranya adalah:

- a. Menjaga keindahan, kebersihan dan estetika lingkungan kawasan sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung;
- b. Tidak memerlukan TPS yang luas, sehingga pengelola wisata dapat mengoptimalkan penggunaan pemanfaatan kawasan;
- c. Mengurangi biaya angkut sampah ke TPS;
- d. Mengurangi beban Pemda dalam mengelola sampah.

### **5.7.2 Pengurangan Ketergantungan Air Untuk Konsumsi dari Danau**

Saat ini masyarakat di sekitar danau banyak yang memanfaatkan air danau untuk pertanian maupun untuk MCK dengan cara mengambil air dari danau dengan menggunakan mesin pompa yang kemudian dialirkan melalui pipa ke tempat-tempat yang diinginkan. Jika hal ini terus dibiarkan, debit air danau akan berkurang terutama pada musim kemarau. Hal ini juga akan berpengaruh pada aktivitas kegiatan wisata yang memanfaatkan air danau.

Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan pembuatan sumur resapan di rumah-rumah warga. Yang disebut sebagai sumur resapan adalah sumur gali yang berfungsi untuk menampung, meresapkan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di permukaan tanah, bangunan, juga atap rumah. Dengan adanya sumur resapan, air hujan bisa lebih efektif terserap ke dalam tanah. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggali kembali cara tradisional dahulu yang kerap dilakukan masyarakat di pedesaan untuk melestarikan air adalah dengan membuat lubang-lubang di sekitar tanaman atau pepohonan. Sejumlah negara menaruh perhatian besar terhadap konservasi air. Di Singapura, air tetesan pendingin udara (AC) pun tidak dibiarkan sia-sia, melainkan ditampung lalu dimanfaatkan. Sedangkan bangunan-bangunan bertingkat di Jepang sudah sejak lama membangun sumur-sumur resapan untuk melindungi konstruksi tiang pancang besi bajanya dari pengaruh air asin akibat intrusi air laut. Di Jakarta, gedung pusat Indosat, misalnya, sejak awal tahun 1990

telah memiliki pengolahan air limbah gedung yang cukup baik sehingga hasil olahannya dapat dimanfaatkan ([www.bppt.go.id](http://www.bppt.go.id))

Sebenarnya, dengan membuat sumur resapan, Masyarakat seperti menabung air tanah. Sejumlah kawasan di Jakarta saat ini warganya terpaksa membeli air bersih untuk sekadar minum, mandi, dan cuci-mencuci karena air tanah di tempat tinggal mereka sudah tidak layak pakai, bahkan kering. Selain itu, manfaat sumur resapan ialah dapat menambah atau meninggikan permukaan air tanah dangkal (*water table*), menambah potensi air tanah, mengurangi genangan banjir, mengurangi amblesan tanah, serta mengurangi beban pencemaran air tanah.

### **5.7.3 Pembangunan Yang Ramah Lingkungan**

Kekhawatiran warga di sekitar danau maupun masyarakat peduli lingkungan terhadap pembangunan kawasan danau lebo adalah jika dilakukan pengurukan. Maka, sejak awal dalam setiap sosialisasi warga pun ramai-ramai menolak kegiatan pengurukan danau apabila hal itu akan dilakukan. Menurut mereka, persoalan danau bukan hanya banjir, tetapi juga persediaan sumber air, keindahan alam, dan warisan untuk anak cucu. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesadaran lingkungan warga yang menggembirakan. Pemerintah daerah seharusnya memberikan tanggapan dengan tindakan nyata yang positif. Lalu, apa yang dapat dilakukan?

Danau berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendali banjir (nilai ekologis), wisata olahraga air, seperti perahu dayung, kano, memancing (nilai ekonomi), habitat satwa liar (nilai edukatif), dan tentu saja menambah keindahan kota (nilai estetis).

Kota Singapura, Melbourne, Sydney, London, Tokyo, atau New York telah lama mengembangkan danau sebagai salah satu tujuan ekowisata alami dan ramah lingkungan di pusat-pusat kota. Pengelola Kota Singapura melalui National Parks (NParks) dan Urban Redevelopment Authority (URA) memiliki Singapore Green and Blue Plan 2010 yang memandu penataan RTH, termasuk pengembangan danau-danau. Melbourne Waterway 2050 yang mengatur

perlindungan, pengembangan, dan pengelolaan sumber-sumber daya air, termasuk di dalamnya konservasi danau. Bahkan, Pemerintah Australia mewajibkan pengembang perumahan berskala besar untuk mempertahankan danau atau membuat danau-danau baru di pusat perumahan sebagai penyuplai kebutuhan air bersih dan wahana rekreasi warga

Belajar dari model pengelolaan dari beberapa negara di atas bisa diterapkan suatu konsep pengelolaan yang mendukung pembangunan kawasan Danau Lebo. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi model-model pengelolaan tersebut yang tentunya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang relevan dengan kondisi kawasan serta sosial budaya masyarakat setempat. Kerangka berpikir pembangunan kawasan wisata harus berubah menjadi bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa mengubah dan merusak alam. Perumusan kerangka pengembangan pariwisata berwawasan pemeliharaan lingkungan adalah hal mendesak yang perlu direalisasikan.

#### **5.7.4 Pemanfaatan Ruang Kawasan**

Hal yang perlu menjadi titik berat pengalokasi ruang adalah keberadaan Danau Lebo. Dalam pengembangannya, seluruh komponen ruang daratan yang direncanakan sebaiknya berorientasi pada danau, sehingga danau menjadi centre point perkembangan di Kawasan disekitarnya secara keseluruhan. Penerapan konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian komponen-komponen ruang yang saling terkait dalam kerangka pengembangan kegiatan wisata di Kawasan Danau Lebo. Komponen-komponen ruang yang akan dialokasikan meliputi:

##### ***Kawasan pusat pelayanan utama kawasan***

Merupakan kawasan di sekitar danau, yang pengembangannya diarahkan sebagai pusat pelayanan informasi Kawasan Danau Lebo, yang sekaligus berfungsi sebagai orietasi pengembangan wisata daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian, pengembangan kawasan pintu gerbang akan lebih dititikberatkan pada penataan bangunan dan lingkungan sebagai vocal point

memasuki Kawasan Danau Lebo. Komponen ruang/kegiatan yang dapat dialokasikan pada kawasan ini antara lain:

- gedung pusat informasi,
- ruang terbuka hijau,
- fasilitas parkir (kendaraan bermotor maupun sepeda),
- akses untuk pergantian moda angkutan
- perdagangan dan jasa
- perkantoran pelayanan public dan kanagarian
- terminal
- akomodasi wisata

#### ***Kawasan konservasi dan akomodasi wisata pertanian***

Merupakan areal-areal persawahan yang tersebar saat ini di Kawasan sekitar danau. Pengembangannya diarahkan untuk mewujudkan areal persawahan sebagai objek wisata agro. Pada kawasan ini nantinya dapat dikembangkan pula atraksi wisata berupa kegiatan bertani (menanam benih, menyemai, memanen, dan lain-lain) dan kehidupan keseharian masyarakat tani. Untuk memfasilitasi pengunjung menikmati “atraksi” wisata tersebut, akan dikembangkan beberapa komponen ruang di kawasan ini, seperti:

- bentang alam persawahan
- restoran dan rest area dengan bahan yang ramah lingkungan
- pos-pos informasi
- akses masuk dari jalan utama
- parkir

#### ***Zona Konservasi Perkebunan dan Akomodasi Wisata Perikanan***

Merupakan areal keramba/jala apung yang saat ini tersebar di sepanjang pinggir danau atau di sekitar lahan persawahan. Pengembangannya diarahkan pada penciptaan kegiatan ternak ikan sebagai atraksi wisata, misalnya penanaman benih ikan, panen ikan, memberi ikan, dan lain-lain. Pada kawasan ini juga

nantinya dapat dimungkinkan untuk dikembangkan kegiatan pemancingan. Komponen ruang yang dialokasikan antara lain:

- Restoran
- Jalan setapak menyusuri danau
- Dermaga perahu
- Pemancingan

### ***Kawasan Non Terbangun***

Terdiri dari kawasan pertanian, perkebunan, dan kawasan hutan. Kawasan ini diarahkan sebagai kawasan ruang terbuka (open space), untuk menjaga view ke danau. Pada beberapa lahan pertanian dan perkebunan memungkinkan untuk dijadikan sebagai cadangan lahan pengembangan permukiman kawasan perkotaan.

Sementara, kawasan hutan/bukit terdiri atas agroforestry dan dikembangkan pula sebagai salah satu lokasi objek/kegiatan wisata, seperti hiking atau lintas alam, jogging, dan lain-lain. Termasuk ke dalam pengembangan kawasan ini adalah pemanfaatan atraksi-atraksi unik, seperti flora, fauna, dan sebagainya

Pengalokasian komponen-komponen ruang itu nantinya memerlukan pertimbangan awal kesesuaian arahan makro yang telah dirumuskan sebelumnya dengan kondisi eksisting penggunaan lahan secara lebih mendalam dan rinci. Kesesuaian ini akan menjadi dasar bagi perumusan arahan detail selanjutnya, sehingga arahan makro dapat lebih implementatif.

### **5.7.5 Penanganan Sedimentasi**

Hal yang urgen untuk mendapatkan prioritas penanganan untuk saat ini adalah penanganan sedimentasi yang terjadi di danau lebo. Menurut penelitian yang dilakukan ada 935 nelayan ikan darat Danau Lebo Taliwang terancam kehilangan mata pencaharian. Alasannya, karena telah terjadi sediment (pendangkalan) lebo dan belum ada upaya penanganan yang pasti. Akibatnya, penghasilan nelayan ikan darat ini turun drastic dari semula rata-rata

per hari lebih dari Rp100 ribu, kini hanya mendapatkan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.

Salah seorang nelayan ikan darat dari Desa Meraran, Abu Syam mengungkapkan, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil Danau Lebo Taliwang ini kini mengeluh akibat sulitnya menangkap ikan akibat telah terjadi sediment maupun penumpukan pohon-pohon liar.

*“Sekarang kami susah mendapat ikan. Bukan ikannya yang tidak ada, melainkan ikan-ikan itu berada di dasar dan tertutup oleh beberapa lapisan, baik lumpur maupun tanaman liar”.*

Rencana Pemerintah KSB untuk membangun lokasi pariwisata seluas areal 10 hektare dengan anggaran total Rp3,5 miliar, bukannya tidak disambut baik masyarakat nelayan ikan darat. Namun perlu juga dipikirkan bagaimana kehidupan mereka nantinya, karena mustahil bisa masuk ke lingkungan pariwisata dengan modal SDM pas-pasan.

Bagaimana dengan adanya bantuan ikan karamba seperti yang sudah ada, Abu Syam menegaskan, bukannya menampik bantuan, tetapi bantuan ikan karamba seperti yang sudah ada, hanya bisa dinikmati sedikit orang. Apalagi sekarang ini rata-rata ikan mati di karamba mencapai 20 ekor sebagai indikasi keasaman air terlalu tinggi. Ketua Kesatuan Nelayan Konfersi Lebo, Rodianto mengatakan, pemerintah harus sesegara mungkin mengatasi masalah keluhan nelayan ikan darat di Lebo Taliwang. Bulan Mei ini, adalah waktu tepat jika mengupayakan menanggulangi masalah tanaman liar.

*“Masyarakat nelayan ikan darat memberi garansi jika pekerjaan membersihkan Lebo Taliwang diberikan kepada mereka, hanya dalam waktu satu bulan permasalahan bisa diatasi, tapi itu harus dilakukan bulan Mei ini karena waktunya memang tepat,”* kata Rodianto.

Bagaimana jika pembersihan lebo dilakukan setelah bulan Mei? Berdasarkan pengalaman dari para nelayan itu sendiri yang mengetahui kondisi sebenarnya, jika pembersihan dilakukan di atas bulan Mei akan menjadi pekerjaan sia-sia. Hal itu pernah terjadi pada beberapa tahun silam

dan nyatanya tanaman liar tetap ada. Selain yang menggarap proyek pembersihan bukan kalangan nelayan ikan darat, tata cara pembersihan diindikasikan asal-asalan.

Salah seorang Tokoh Masyarakat Seteluk. H. Zulkifli Daud mengungkapkan, *master plan* Lebo Taliwang memang perlu dilakukan kajian ulang. Sehingga dia minta kepada Bupati KSB untuk men-*status quo*-kan anggaran untuk Danau Lebo Taliwang sebesar Rp3,2 miliar hingga ada kejelasan yang pasti

## 5.8 Usulan Konsep Pengelolaan Lingkungan Sosial

**Strategi yang dipilih untuk menyusun rencana proyek khususnya dalam sektor pariwisata harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat sejelas mungkin. Partisipasi masyarakat setempat sejak awal perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, pelaksanaan proyek, pengelolaan dan pembagian hasilnya merupakan hal yang mutlak sehingga harus ditegaskan dalam draf rencana. Partisipasi harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi salah satu penentu tahap-tahap proyek, namun sekaligus juga membelajarkan mereka untuk memiliki tanggung jawab maupun komitmen dan hasil maupun resiko yang mungkin dicapai melalui proyek. Oleh sebab itu bisa dimaklumi mengapa perencanaan partisipatif dalam setiap proyek selalu memakan waktu lama dan biaya yang besar.**

**Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat maka perlu diciptakan suasana kondusif yakni situasi yang menggerakkan masyarakat untuk menaruh perhatian dan kepedulian pada**

kegiatan yang dilaksanakan dan kesediaan untuk bekerja sama secara aktif dan berlanjut

Berikut ini beberapa konsep pengelolaan lingkungan social yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Danau Lebo Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada beberapa tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi pelaksanaan.

#### 5.8.1 Prinsip Perencanaan

Bercermin dari Melirik Kegagalan Wisata di Sumatera Barat (Fince Herry, 2006), terlihat bahwa pengelolaan yang dilakukan di Sumatera Barat tidak mengakar pada tatanan masyarakat (*public service*), akan tetapi masih berorientasi pada pasar (*marked demand*) serta rendahnya tingkat kepercayaan dan kekuatan jaringan (*Social capital*) pada level pemerintahan. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan introspeksi sekaligus menjadikan bahan evaluasi untuk merancang pengembangan kawasan Danau Lebo. Citra pemerintah yang sarat dengan KKN telah berdampak pada kegagalan pengelolaan program pengembangan kawasan di Sumatera Barat. Oleh karenanya pengembangan kawasan Danau Lebo haruslah di bangun atas kekuatan rasa saling kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat yang selama ini cenderung di abaikan (*ceterus paribus*). Bahkan sudah sepantasnya

menempatkan masyarakat pada level sosial dan ekonomi bukan sebatas makna subjek dari pembangunan kawasan.

Prinsip perencanaan harus selalu berusaha menyertakan anggota-anggota dari berbagai kelompok; sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar Danau Lebo dan masyarakat lain yang kemungkinan akan terkena dampak secara tidak langsung; kesediaan untuk belajar; tidak adanya titik temu antara rencana dari pemerintah dengan harapan dari penduduk merupakan pertanda buruk, karena ini tidak *match*.

Selama ini, berlandaskan pada paradigma lama yang bersifat *top - down* dan sentralistik, kegiatan perencanaan program pengelolaan lingkungan sosial ditentukan oleh pihak luar dari masyarakat sosial tempat program pengelolaan lingkungan sosial dilaksanakan.

Berkembangnya asumsi-asumsi seperti tersebut di atas bisa disebabkan karena beberapa pemahaman diantaranya adalah bahwa warga masyarakat bersangkutan dianggap tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan perencanaan; kondisi lingkungan hidup sosial suatu masyarakat ditentukan oleh pihak luar masyarakat bersangkutan; adanya asumsi bahwa adat istiadat atau tradisinya atau kearifan lokalnya justru menghambat kelola lingkungan hidup sosial yang diharapkan, terutama oleh pihak luar dalam hal ini pemerintah. Warga masyarakat tersebut seringkali dianggap bodoh yang tidak mampu dan mengerti merencanakan pengelolaan lingkungan hidupnya, oleh sebab itu harus diberdayakan dalam

**pengertian dipintarkan untuk mampu merencanakan dan melaksanakan kelola lingkungan sosialnya.**

**Persoalannya kemudian, apakah memang demikian adanya, bahwa apabila perencanaan dan juga pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial dilakukan melulu oleh pihak luar, warga suatu masyarakat akan mampu dan memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya dalam pengelolaan lingkungan sosialnya, sehingga mereka akan mampu pula untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Jawabannya tidaklah demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa berbagai konflik sosial yang menjurus pada disintegrasi sosial makin memperbesar dan merusak demikian hebat, justru ketika berbagai usaha pengelolaan lingkungan sosial diambil alih oleh negara, dan tradisi pengelolaan lingkungan sosial yang arif yang dimiliki masyarakat dihancurkan.**

**Oleh sebab itu, prinsip perencanaan pengelolaan lingkungan sosial haruslah lebih mengutamakan pelibatan warga masyarakat secara penuh, atau dengan kata lain pengembangan dan perencanaan pengelolaan lingkungan sosial harus menggunakan pendekatan partisipatif, dan warga masyarakat sebagai inti dalam pendekatan tersebut (*management with the people*).**

**Hadi (2005) menegaskan bahwa keikutsertaan publik membawa pengaruh positif. Mereka akan bisa memahami keputusan akhir yang akan diambil. Tujuan pelibatan mereka adalah mengeliminir kemungkinan terjadinya dampak negatif.**

Jika pelibatan warga masyarakat dalam seluruh proses mulai perencanaan sampai evaluasi pengelolaan lingkungan sosial dilaksanakan secara penuh, maka program itu menjadi lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat dan rasa kepemilikan terhadap program tersebut akan dirasakan secara utuh oleh masyarakat bersangkutan. Di samping itu, keterampilan yang mereka miliki sebagai *lokal genius* atau *lokal knowledge* tidak akan hilang bahkan terakomodasi dan dapat menjadi pengetahuan yang dapat dimiliki oleh sekalian masyarakat diluar komunitas bersangkutan. Hal ini menjadi penting, karena selama ini pengelolaan lingkungan sosial justru menghancurkan atau menisbikan pengetahuan semacam ini dan digantikan dengan pengetahuan dari luar komunitas, yang justru tidak ramah terhadap lingkungan hidup mereka, khususnya lingkungan sosial. Selain itu dengan melibatkan mereka, maka usaha memberdayakan dan penguatan institusi dan keterampilan merencanakan dan mengelola lingkungan sosial atau dengan kata lain menguatkan dan pengembangan wawasan warga masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan idiom dan wacana yang mereka pahami.

Untuk melaksanakan kegiatan perencanaan seperti yang dimaksud di atas, maka metode dan teknik yang tepat adalah metode partisipatif. Banyak nama yang diberikan pada metode ini antara lain *Participatory Rural Appraisal (PRA)* atau *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, namun apapun namanya prinsipnya adalah melakukan pengkajian komunitas sosial secara partisipatif

sebagai upaya untuk menemu-kenali berbagai kebutuhan, aspirasi dan keadaan di masyarakat tersebut, dan sekaligus pula dapat membuat perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan sosial.

Pengkajian komunitas sosial secara partisipatif adalah kegiatan penelitian tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat bersangkutan dengan didampingi atau difasilitasi oleh para petugas lembaga pengembang program (Berbuat Bersama Berperan Setara, Driya Media dalam Purba, 2002). Aspek-aspek yang menjadi objek penelitian atau kajian tergantung pada kebutuhan yang disepakati antara pengembang program dan warga masyarakat. Adapun tujuannya adalah agar masyarakat atau kajian tergantung pada kebutuhan yang disepakati antara pengembang proyek dan masyarakat mampu memahami keadaannya sendiri dan lingkungan sosialnya, sehingga terselenggara proses masyarakat menjadi peneliti sekaligus pengkaji bagi pengembangan kegiatan pengelolaan lingkungannya secara mandiri. Proses ini diharapkan menjadi proses pembelajaran untuk menguatkan kemampuan analisis masyarakat tersebut.

Adapun hasil penelitian atau pengkajian meliputi sejumlah informasi berkenaan dengan keadaan atau kondisi berbagai aspek kehidupan di masyarakat di sekitar Danau Lebo; informasi mengenai masalah dan kebutuhan yang diungkapkan oleh warga masyarakat sendiri; serta sejumlah potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengembangan kegiatan

masyarakat dalam menunjang pengembangan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata.

Berdasarkan pada kegiatan tersebut di atas, maka bagi masyarakat sekitar kawasan pengembangan kegiatan ini sebenarnya merupakan bagian dari proses belajar dan proses penyadaran mengenai kehidupan mereka sendiri dan lingkungan hidup yang mereka hadapi. Kegiatan semacam ini akan menimbulkan semacam perenungan untuk mencari jalan keluar dari keadaan yang dianggap mengganggu.

Selain itu bagi orang luar, khususnya pemrakarsa proyek, kegiatan ini sebagai proses penyadaran dalam memahami keadaan kehidupan sosial suatu masyarakat, serta memahami cara pandang dan nilai-nilai budaya masyarakat sekitar danau, yang secara langsung mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata. Selain itu dengan melakukan kegiatan bersama ini penerapan program akan mudah memperoleh dukungan dari masyarakat bersangkutan, dan keputusan untuk melaksanakan program sudah merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Untuk perencanaan terhadap pembangunan Kawasan Danau Lebo, hendaklah tetap membiarkan beberapa kawasan perbukitan untuk tempat perburuan masyarakat setempat seperti yang berlangsung saat ini, mengkhususkan beberapa tempat untuk kegiatan pemancingan warga dan mengagendakan

pelaksanaan pentas budaya di lokasi tersebut untuk kegiatan pariwisata.

#### 5.8.2 Prosedur Perencanaan

Apabila kegiatan kegiatan-kegiatan di atas telah dilakukan, maka selanjutnya adalah prosedur yang praktis (sederhana, jelas dan wajar). Artinya, bentuk rencana itu benar-banar dapat dilaksanakan oleh masyarakat sekitar danau dengan dukungan dan fasilitas lembaga pendamping dan lembaga mitra yang mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat ataupun pemerintah (*stakeholders*).

Adapun langkah-langkah serta prosedur yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan berlandaskan pada hasil diskusi yang melibatkan masyarakat, akan didapat berbagai permasalahan di sekitar kehidupan social masyarakat sekitar kawasan pengembangan dan masyarakat lainnya yang secara tidak langsung akan terkena dampak dari pembangunan kawasan Danau Lebo ini, dan bersama-sama masyarakat tersebut, masalah-masalah tersebut ditampilkan secara keseluruhan, serta di *listing*, kemudian dikaji ulang serta disepakati apakah masalah-masalah yang ditampilkan tersebut merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Masalah-masalah tersebut dapat dikurangi atau bahkan ditambah, tergantung kesepakatan yang disepakati bersama.

Jika warga masyarakat telah menyepakati masalah-masalah tersebut, maka masalah-masalah tadi dikelompokkan

dengan tujuan untuk menyederhanakan tampilan seluruh permasalahan masyarakat tersebut. Selain itu pengelompokkan dapat digunakan untuk mendiskusikan dan menyepakati perencanaan pembedangan pengelolaan lingkungan social masyarakat tersebut. Hal lain untuk mempermudah bidang atau aspek apa saja dalam kehidupan komunitas bersangkutan yang paling banyak masalahnya. Berlandaskan pada hal terakhir ini dapat ditentukan prioritas masalah yang harus direncanakan secara lebih seksama dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sekitar danau dan masyarakat lain yang secara tidak langsung mendapatkan dampak dari pembangunan kawasan Danau Lebo ini. Ini dilakukan dengan masyarakat secara keseluruhan tanpa perwakilan. Karena dengan sistem perwakilan ini dikhawatirkan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari semua lapisan masyarakat tidak terakomodasi.

Apabila kegiatan penentuan masalah telah selesai, kegiatan selanjutnya adalah kajian hubungan sebab akibat masalah dengan tujuan untuk memahami masalah-masalah yang mana menjadi penyebab dari masalah lain. Dari kegiatan ini akan diketahui akar masalah yang harus diselesaikan. Berlandaskan pada kegiatan ini, masyarakat akan mampu melihat permasalahan yang mereka hadapi secara menyeluruh. Selain itu masyarakat tersebut akan mampu menilai bahwa masalah tersebut sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dipisah-pisah sehingga perlu dipecahkan bersama.

Jika kegiatan tersebut telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengurutan prioritas masalah yang paling penting dipecahkan, sekaligus menentukan langkah-langkah kegiatannya. Untuk mempermudah skala prioritas, perlu dilakukan kesepakatan untuk menentukan kriteria skala prioritas tersebut. Menurut Kantor Menteri Lingkungan Hidup (2002), belajar dari pengalaman LSM di Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi NTT, kriteria tersebut adalah: kriteria kemendesakan, kriteria masalah utama (akar masalah), kriteria kepentingan umum, kriteria ketersediaan sumber daya, kriteria menambah pendapatan, dan kriteria lainnya termasuk kriteria kebijakan dan kriteria tabu-tabu atau *pemali-pemali*.

### 5.8.3 Implementasi

Apabila hal-hal tersebut di atas telah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama oleh semua pihak, khususnya oleh warga masyarakat yang akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam implementasi rencana tersebut, terkait dengan pengelolaan Danau Lebo, harus dapat melibatkan semua pihak yang ada dalam kawasan pembangunan terutama mereka yang selama ini memanfaatkan danau secara intensif, tanpa memandang perbedaan lapisan sosial, jenis kelamin dan kelompok usia. Kalaupun ada perbedaan, maka ini semua merupakan kesepakatan dalam perencanaan. Seringkali dalam

pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial pada masa lalu, hanya sebagian kecil dari komunitas yang terlibat, sedangkan yang lainnya hanya menonton karena dianggap tidak layak terlibat, yang terjadi antara lain karena kedudukan sosialnya yang rendah. Hal ini harus dihindari, justru mereka yang tadinya tidak terlibat yang perlu diprioritaskan. Yang tidak boleh dilupakan dalam pengelolaan Danau Lebo ini adalah prinsip keberlanjutan (*sustainable*). Hal ini menjadi penting karena kegiatan pengelolaan lingkungan social bukanlah kegiatan proyek pembangunan, yang berhenti sesuai dengan target pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu kegiatan pengelolaan lingkungan sosial pembangunan Danau Lebo sebagai kawasan wisata ini harus dilakukan, dimonitor dan dievaluasi secara terus-menerus, dan diperbaiki baik kualitas maupun kuantitas kegiatannya, sehingga program akan makin sempurna.

Pelaksanaan pembangunan kawasan Danau Lebo ini bukanlah untuk menunjukkan keahlian seseorang atau sekelompok orang, melainkan kerja bersama, dan setiap pihak yang terlibat saling memberi, dan saling belajar dari kegiatan bersama tersebut, seringkali dalam pelaksanaannya ada perbedaan-perbedaan pendapat dan teknik namun perbedaan tersebut harus ditanggapi sebagai pengkayaan kegiatan tersebut, yang penting adalah bagaimana menyikapi dan menyepakati perbedaan tersebut secara arif dan bijaksana. Haru dipahami bahwa pembangunan kawasan ini bukanlah milik segolongan orang atau kepentingan pihak tertentu saja, tetapi merupakan

kepentingan bersama dan merupakan hasil keputusan bersama, yang hasilnya akan diraskan manfaatnya oleh semua *stakeholders*, oleh karena itu unsur-unsur partisipatif perlu dikedepankan dan diutamakan.

Dalam pembangunan kawasan Danau Lebo ini, dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan sosial masyarakat, orang luar harus menyadari bahwa mereka hanya berperan sebagai fasilitator dan bukannya guru, penyuluh atau instruktur serta pelaksana kegiatan tersebut. Seharusnya semua pelaksanaan kegiatan diputuskan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Pihak luar sebagai fasilitator, hanya memberikan berbagai alternatif pilihan, dan juga menjelaskan pihak-pihak mana saja yang dapat membantu berbagai persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya juga seringkali ditemui berbagai kesalahan yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan, namun kesalahan semacam itu tidak perlu ditanggapi sebagai kegagalan keseluruhan program kegiatan, dan yang harus dilakukan bahwa kesalahan tersebut adalah pengalaman berharga yang perlu diperlajari, agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Dalam tahap pelaksanaan rencana ini, untuk tahap awal pembersihan danau terhadap tanaman eceng gondok tidak perlu dilakukan dengan penggunaan teknologi yang menggunakan peralatan modern yang berat. Kegiatan ini bisa memanfaatkan jasa masyarakat sekitar secara tradisional, sehingga mereka

merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan tersebut sejak awal, yang pada akhirnya akan tumbuh perasaan memiliki dalam diri mereka.

Selain itu dalam pengelolaan Danau Lebo dari struktur organisasi pengelolaan terlihat adanya dominasi birokrasi dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tanpa adanya keterlibatan unsur masyarakat. Padahal jika berpijak pada prinsip pariwisata berkelanjutan yang menuntut adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif, akan lebih bijaksana apabila pengelolaan diserahkan kepada masyarakat baik dalam bentuk koperasi maupun kelompok-kelompok usaha yang mereka bentuk dimana hal ini akan lebih menjamin keberlanjutan kegiatan wisata dan lingkungan Danau Lebo karena secara moral mereka akan ikut bertanggung jawab mengingat ketergantungan mereka terhadap keberadaan kawasan tersebut.

#### **5.8.4 Pengendalian**

Setiap kelompok masyarakat dengan berbagai lingkungan fisik, sosial dan budaya yang majemuk di Indonesia ini pasti memiliki kearifan-kearifan lokal yang seringkali tidak dikenali, atau tidak disadari oleh pemerintah daerah. Kearifan lokal tersebut bisa terdapat terutama di wilayah pedesaan termasuk pada masyarakat di sekitar Danau Lebo ini. Dalam pendekatan pembangunan yang sentralistik, dalam formulasi kebijakannya, apalagi dalam pelaksanaannya pemerintah seringkali

mengabaikan kearifan-kearifan lokal masyarakat. Fenomena lokal sering dianggap sebagai kasus saja, meskipun hal tersebut merupakan suatu hal yang menjadi sangat serius.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pola pengendalian atas lingkungan sosial ini tidaklah hanya berbentuk pembatasan untuk mencegah dan memberi sanksi atas suatu kekeliruan dan kesalahan. Pola pengendalian merupakan instrumen dengan berbagai bentuk dan teknik.

Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pengendalian terhadap pembangunan terhadap kawasan Danau Lebo diantaranya adalah dengan sejumlah peraturan yang mewajibkan dan melarang dengan sanksi-sanksinya yang disesuaikan dengan adat masyarakat setempat. Cara yang lain adalah dengan cara mengadakan perlengkapan aturan yang protektif agar suatu ancaman dalam lingkungan sosial tersebut tidak terjadi. Cara lainnya adalah dengan menyerahkan pada masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Samawa ada istilah yang disebut dengan "*ila*" atau malu. Mereka yang melakukan pengrusakan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat itu sendiri atau minimal dari keluarga si perusak karena merasa malu dengan tindakan yang ia lakukan.

#### 5.8.5 Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaannya dengan memperkecil dampak negatif yang

**mungkin ditimbulkan. Di lain pihak, pemantauan dimaksudkan juga untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal guna menghadapi tantangan pembangunan yang menguntungkan.**

**Dalam pembangunan Danau Lebo, pengawasan perlu dilakukan sejak tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca pembangunan. Pengawasan tersebut harus melibatkan *stakeholder* yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:**

- 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pengelola operasional yang lebih mengetahui secara komprehensif model-model strategis pembangunan tersebut;**
- 2. Pihak swasta/investor yang berpotensi sebagai sumber/sumber informasi yang efektif dan efisien dalam alokasi investasi di sektor-sektor strategis serta sebagai pelaksana pembangunan daerah;**
- 3. Masyarakat sebagai sasaran dan pemanfaat pembangunan yang dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada bagi peningkatan kesejahteraan serta mampu menilai secara obyektif kinerja pembangunan;**
- 4. Perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang mengkaji berbagai proses pembangunan secara ilmiah serta mampu menemukan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang bersangkutan, beritui solusi pemecahannya;**
- 5. Lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pengawasan yang efektif.**

#### 5.8.6 Evaluasi

**Evaluasi dilakukan untuk mengkaji terhadap program pembangunan dengan focus perhatian terhadap hasil dan dampaknya. Berkenaan dengan dampak social, maka program pembangunan akan dikaji lebih pada sejauh mana pembangunan kawasan Danau Lebo tersebut mendatangkan manfaat bagi sasaran pembangunan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan, baik secara positif maupun negatif. Pelaksanaan evaluasi antara lain melibatkan para *stakeholder* sebagaimana dalam kegiatan pemantauan.**

**Pelaksanaan evaluasi terhadap pembangunan Danau Lebo sebagai kawasan wisata yang berkenaan dengan eksistensi dan kelestarian lingkungan sosialnya haruslah mengkaji dan bahkan mengukur hasilnya pada tingkat pemahaman dan perasaan masyarakat sasaran. Dengan demikian, kajian-kajian yang bersifat kualitatif yang berupaya memahami persepsi dan perasaan masyarakat menjadi penting. Dan dalam hal keserasian lingkungan sosial adalah suatu hal yang masyarakat setempat paling mengetahuinya.**

### 5.9 Usulan Kegiatan Wisata Di Kawasan Danau Lebo

Melihat potensi Danau Lebo, tipe pariwisata yang tepat untuk dikembangkan adalah ekowisata (*ecotourism*). Ekowisata merupakan wisata yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan sebagai sumber daya pariwisata. Ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Disini kegiatan wisata yang bertanggung

jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata.

### 5.9.1 Agrowisata

Dengan posisi geografis serta kondisi alam, hayati, dan budaya yang beragam, kawasan Danau Lebo memiliki potensi besar untuk mengembangkan agrowisata. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus melestarikan sumber daya lahan yang ada.

Dengan kondisi tanah dan iklim yang beragam, peluang untuk mengembangkan berbagai komoditas pertanian pun semakin besar dengan menerapkan sistem pengelolaan lahan yang sesuai. Hal ini tercermin pada berbagai teknologi pertanian lokal yang berkembang di masyarakat dengan menyesuaikannya dengan topologi lahan. Keunikan-keunikan tersebut merupakan aset yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung/berwisata ke kawasan Danau Lebo. Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, kita bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya.

Pengembangan agrowisata sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi ekologis lahan akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian sumber daya lahan dan pendapatan petani serta masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini secara tidak langsung akan meningkatkan persepsi positif petani serta masyarakat sekitarnya akan arti pentingnya pelestarian sumber daya lahan pertanian. Pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan, karena usaha

ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata adalah melestarikan sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani/masyarakat sekitar lokasi wisata.

### ***Melestarikan Sumber Daya Alam***

Agrowisata pada prinsipnya merupakan kegiatan industri yang mengharapkan kedatangan konsumen secara langsung ditempat wisata yang diselenggarakan. Aset yang penting untuk menarik kunjungan wisatawan adalah keaslian, keunikan, kenyamanan, dan keindahan alam. Oleh sebab itu, faktor kualitas lingkungan menjadi modal penting yang harus disediakan, terutama pada wilayah - wilayah yang dimanfaatkan untuk dijelajahi para wisatawan. Menyadari pentingnya nilai kualitas lingkungan tersebut, masyarakat/petani setempat perlu diajak untuk selalu menjaga keaslian, kenyamanan, dan kelestarian lingkungannya.

Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (*eco-tourism*), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alamnya serta sebagai sarana pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan dasar alamnya, yang meliputi kultur atau sejarah yang menarik, keunikan sumber daya biofisik alamnya, konservasi sumber daya alam ataupun kultur budaya masyarakat.
2. Nilai pendidikan, yaitu interpretasi yang baik untuk program pendidikan dari areal, termasuk lingkungan alamnya dan upaya konservasinya.
3. Partisipasi masyarakat dan pemanfaatannya. Masyarakat hendaknya melindungi/menjaga fasilitas atraksi yang digemari wisatawan, serta dapat berpartisipasi sebagai pemandu serta penyedia akomodasi dan makanan.
4. Dorongan meningkatkan upaya konservasi. Wisata ekologi bisaanya tanggap dan berperan aktif dalam upaya melindungi area, seperti mengidentifikasi

burung dan satwa liar, memperbaiki lingkungan, serta memberikan penghargaan/falitas kepada pihak yang membantu melindungi lingkungan.

### ***Mengkonversi Teknologi Lokal***

Keunikan teknologi lokal yang merupakan hasil seleksi alam merupakan aset atraksi agrowisata yang patut dibanggakan. Bahkan teknologi lokal ini dapat dikemas dan ditawarkan untuk dijual kepada pihak lain. Dengan demikian, teknologi lokal yang merupakan *indigenous knowledge* itu dapat dilestarikan.

Teknologi lokal seperti Talun Kebun atau Pekarangan yang telah berkembang di masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan salah satu contoh yang bisa ditawarkan untuk agrowisata. Teknologi lokal ini telah terbukti cukup mampu mengendalikan kesuburan tanah melalui pendauran hara secara vertikal. Selain dapat mengefisienkan pemanfaatan hara, teknologi ini juga dapat memanfaatkan energi matahari dan bahan organik *in danau* dengan baik sesuai dengan tingkat kebutuhan. Dengan demikian, melalui agrowisata kita dapat memahami teknologi lokal kita sendiri, sehingga ketergantungan pada teknologi asing dapat dikurangi.

### ***Meningkatkan Pendapatan Petani dan Masyarakat Sekitar***

Selain memberikan nilai kenyamanan, keindahan ataupun pengetahuan, atraksi wisata juga dapat mendatangkan pendapatan bagi petani serta masyarakat di sekitarnya. Wisatawan yang berkunjung akan menjadi konsumen produk pertanian yang dihasilkan, sehingga pemasaran hasil menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan adanya kesadaran petani akan arti pentingnya kelestarian sumber daya, maka kelanggengan produksi menjadi lebih terjaga yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani. Bagi masyarakat sekitar, dengan banyaknya kunjungan wisatawan, mereka dapat memperoleh kesempatan berusaha dengan menyediakan jasa dan menjual produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Atraksi wisata pertanian juga dapat menarik pihak lain untuk belajar atau magang dalam pelaksanaan kegiatan budi daya ataupun atraksi-atraksi lainnya,

sehingga dapat menambah pendapatan petani, sekaligus sebagai wahana alih teknologi kepada pihak lain. Hal seperti ini telah dilakukan oleh petani di Desa Cinagara, Sukabumi dengan "Karya Nyata Training Centre". Pada kegiatan magang ini, seluruh petani dilibatkan secara langsung, baik petani ikan, padi sawah, hortikultura, peternakan, maupun perkebunan.

### ***Atraksi-Atraksi yang Ditawarkan***

Pengembangan agrowisata dapat diarahkan dalam bentuk ruangan tertutup (seperti museum), ruangan terbuka (taman atau lansekap), atau kombinasi antara keduanya. Tampilan agrowisata ruangan tertutup dapat berupa koleksi alat-alat pertanian yang khas dan bernilai sejarah atau naskah dan visualisasi sejarah penggunaan lahan maupun proses pengolahan hasil pertanian. Agrowisata ruangan terbuka dapat berupa penataan lahan yang khas dan sesuai dengan kapabilitas dan tipologi lahan untuk mendukung suatu sistem usahatani yang efektif dan berkelanjutan. Komponen utama pengembangan agrowisata ruangan terbuka dapat berupa flora dan fauna yang dibudidayakan maupun liar, teknologi budi daya dan pascapanen komoditas pertanian yang khas dan bernilai sejarah, atraksi budaya pertanian setempat, dan pemandangan alam berlatar belakang pertanian dengan kenyamanan yang dapat dirasakan. Agrowisata ruangan terbuka dapat dilakukan dalam dua versi/pola, yaitu alami dan buatan.

### ***Agrowisata Ruang Terbuka Alami***

Objek agrowisata ruangan terbuka alami ini berada pada areal di mana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat petani setempat sesuai dengan kehidupan keseharian mereka. Masyarakat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan tanpa ada pengaturan dari pihak lain. Untuk memberikan tambahan kenikmatan kepada wisatawan, atraksi-atraksi spesifik yang dilakukan oleh masyarakat dapat lebih ditonjolkan, namun tetap menjaga nilai estetika alaminya. Sementara fasilitas pendukung untuk pengamanan wisatawan tetap disediakan sejauh tidak bertentangan dengan kultur dan estetika asli yang ada, seperti sarana transportasi, tempat berteduh, sanitasi,

dan keamanan dari binatang buas. Contoh agrowisata terbuka alami adalah kawasan Suku Baduy di Pandeglang dan Suku Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat; Suku Tengger di Jawa Timur; Bali dengan teknologi subaknya; dan Papua dengan berbagai pola atraksi pengelolaan lahan untuk budi daya umbi-umbian.

### ***Agrowisata Ruang Terbuka Buatan***

Kawasan agrowisata ruang terbuka buatan ini dapat didesain pada kawasan-kawasan yang spesifik, namun belum dikuasai atau disentuh oleh masyarakat adat. Tata ruang peruntukan lahan diatur sesuai dengan daya dukungnya dan komoditas pertanian yang dikembangkan memiliki nilai jual untuk wisatawan. Demikian pula teknologi yang diterapkan diambil dari budaya masyarakat lokal yang ada, diramu sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan produk atraksi agrowisata yang menarik. Fasilitas pendukung untuk akomodasi wisatawan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Kegiatan wisata ini dapat dikelola oleh suatu badan usaha, sedang pelaksana atraksi parsialnya tetap dilakukan oleh petani lokal yang memiliki teknologi yang diterapkan.

Teknologi budi daya pertanian tradisional sebagai perwujudan keserasian hasil seleksi alam yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dapat menjadi paket atraksi wisata yang potensial untuk dipasarkan. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani yang memiliki lahan sempit serta adanya gejala penggunaan lahan yang melebihi daya dukungnya, maka adanya alternatif pemanfaatan lahan yang berorientasi kepada kepentingan wisata sangat baik untuk dilakukan.

### **5.9.2 Jelajah Desa**

**Di sekitar Danau Lebo terdapat beberapa desa tradisional yang masih bisa dipertahankan keberadaannya. Dengan keunikan yang ada, desa-desa ini memiliki potensi sebagai daya tarik**

wisata. Pengelolaan paket wisata yang dikemas dalam bentuk pengelolaan yang baik dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga masyarakat itu sendiri tanpa harus mengeksploitasi keberadaan mereka secara berlebihan. Salah satu paket yang bisa ditawarkan adalah jelajah desa baik dengan kendaraan umum modern maupun dengan menggunakan kendaraan tradisional yang tentunya memiliki keunikan tersendiri seperti cidomo. Dengan kendaraan ini para wisatawan bisa diajak berkeliling untuk melihat beberapa desa sambil menikmati keindahan alam yang masih asri. Dengan keberadaan wisata model ini secara tidak langsung masyarakat akan ikut menjaga keberadaan lingkungan agar tetap lestari karena keberlanjutan dari usaha mereka juga tergantung dari kelestarian lingkungan tersebut. Kerusakan lingkungan juga berarti berkurangnya pendapatan mereka karena hilangnya daya tarik yang selama ini mereka andalkan.

### 5.9.3 *Tracking* dan Wisata Buru

Disepanjang kawasan sebelah Timur Danau Lebo terdapat bukit yang memanjang yang masih asli dan dipenuhi oleh hewan-hewan buruan seperti babi dan rusa. Keberadaan bukit ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan *tracking* sambil menikmati keindahan danau dari atas bukit serta menikmati *sun rise*. Di tempat ini bisa dibangun sarana penunjang kegiatan pariwisata seperti pos informasi maupun saran lainnya. Dalam kegiatan ini masyarakat lokal bisa diberdayakan untuk menjadi bagian dari

**pengelolaan kegiatan baik sebagai *guide* maupun penyedia perlengkapan *tracking*. Dengan demikian pemerintah tidak terlalu memprioritaskan lagi pada upaya pelestarian lingkungan/hutan karena disini masyarakat akan menjadi bagian dari upaya tersebut dan keberlanjutan lingkungan tersebut bahkan akan lebih terjamin.**

#### 5.9.4 *Homestay*

Pengelolaan *homestay* merupakan konsep rumah inap (pondok wisata) untuk para wisatawan yang ramah lingkungan. Rumah inap ini harus didesain dengan arsitektur menyerap berbagai unsur dari rumah-rumah tradisional masyarakat, khususnya masyarakat Samawa. Bahan-bahan yang dipergunakan pembangunan rumah inap hendaknya lebih banyak mempergunakan dari alam yang tidak dimanfaatkan lagi, seperti konstruksi bangunan penyanggah atau tiang bangunan rumah menggunakan bahan-bahan kayu yang berasal dari pohon kepala yang sudah tua dan tidak produktif. Sementara atapnya diambil dari daun ijuk atau daun rumbia.

Belakangan ini, di beberapa daerah seperti Candirejo di Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dari angka kunjungan yang datang ke *homestay* boleh dikatakan masih sangat baik. Ini dilihat dari persentase kunjungan setiap harinya. Untuk meningkatkan dan mempromosikan objek wisata yang ada di kawasan Danau Lebo, pihak pemerintah daerah hendaknya menjalin hubungan dengan beberapa agen wisata dan biro travel. Persoalannya sekarang, bagaimana caranya kita membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, pemerintah dan beberapa elemen yang berhubungan dengan objek wisata di kawasan Danau Lebo.

Dengan konsep ini, meski masih ada wisatawan yang datang ke tempat objek wisata menginap di hotel, secara perlahan-lahan mulai diarahkan dengan menimbulkan kepekaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya dari etnis dan ras yang berbeda. Jadi selain wisatawan yang berkunjung menikmati keindahan alam

juga melakukan wisata lintas budaya yang dapat menciptakan hubungan yang lebih terbuka, lebih toleran antara para wisatawan dengan masyarakat lokal.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat yang didukung oleh investor diharapkan dapat melakukan perbaikan rumah penduduk untuk dikembangkan sebagai rumah inap para wisatawan (*homestay*) dengan memenuhi unsur kesehatan yang standar. Misalnya rumah penduduk yang tidak ada lubang ventilasinya, dibuatkan lubang ventilasinya agar sirkulasi udara dan cahaya matahari berkalannya lancar. Begitu juga dengan WC rumah penduduk yang rusak dan tidak memenuhi kriteria kesehatan, diganti. Kamar tidur juga ditenahi agar tampak asri dan membuat tamu nyaman. Rumah-rumah penduduk yang direnovasi juga jangan sampai merubah bentuk aslinya. Dengan tinggal di *homestay-homestay* yang dikelola masyarakat, diharapkan para wisatawan bisa mempelajari budaya masyarakat lokal selama tinggal di sana. Memahami bagaimana cara makan dan apa yang dimakan, dan bagaimana cara membuat dan menyiapkan makanannya.

Program ini langsung memberikan keuntungan kepada pemilik rumah yang dijadikan rumahnya sebagai *homestay*. Pertama rumah mereka menjadi lebih sehat dan memiliki nilai ekonomis bagi para wisatawan dan kedua para pemilik *homestay* memperoleh peningkatan pendapatan. Semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun investor untuk merenovasi rumah untuk dijadikan *homestay* dapat dibayar oleh pemilik secara angsuran dari uang sewa wisatawan yang menginap.

#### **5.9.5 Budidaya Ikan Di Danau**

Persoalan sampah menjadi masalah besar di tempat objek wisata. Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Dibeberapa kawasan danau yang dikembangkan untuk destinasi wisata juga menghadapi problem sampah yang diakibatkan oleh perilaku wisatawan maupun para pedagang serta pengelola wisata yang tidak menyadari arti pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan. Umumnya para wisatawan dan masyarakat pariwisata di sana membuang sampah padat maupun limbah cair ke danau, termasuk ke sungai yang menjadi input dari air danau

Dalam mengatasi sampah di aliran sungai maupun di danau itu sendiri dapat dilakukan dengan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pemeliharaan ikan seperti yang dilakukan pada aliran irigasi sungai Bahorok, PPLH menaburkan ribuan bibit ikan mas di atas aliran sungai Bahorok. Penduduk yang tinggal di sepanjang aliran sungai irigasi Bahorok sekitar 1 kilometer tersebut menjadi kelompok memelihara ikan mas. dan berhak mendapatkan ikan mas bila sudah besar. Dengan melibatkan penduduk secara langsung merangsang untuk menjaga kebersihan aliran sungai irigasi Bahorok dari sampah an organik. Untuk kesinambungan ketersediaan bibit ikan mas, kelompok harus mengganti bibit ikan mas yang baru setelah panen.

Kegiatan ini bukan saja menguntungkan masyarakat, namun juga para wisatawan yang berkunjung ke Danau Lebo dapat menyaksikan atraksi wisata baru yang dikelola masyarakat yaitu menyaksikan ikan-ikan mas berenang liar di atas aliran sungai irigasi yang jernih. Bila pada waktu panen wisatawan juga dapat menyaksikan bagaimana masyarakat beramai-ramai melakukan panen ikan mas di sepanjang aliran sungai dan di Danau Lebo itu sendiri.

#### 5.9.6 Kesenian Tradisional/Pariwisata Budaya

**Para pelancong memiliki kesempatan untuk menikmati berbagai kesenian tradisional di desa-desa sekitar Danau Lebo yang bisa dikembangkan sebagai desa wisata. Tiap-tiap kesenian memiliki karakteristiknya masing-masing. Aktifitas menikmati kesenian tradisional di tengah-tengah komunitas penduduk desa akan memberikan nuansa tersendiri bagi para pelancong. Pengemasan bentuk pertunjukan dalam bentuk yang baik akan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan secara tidak langsung akan menjadi ajang promosi budaya bagi daerah ini melalui para wisatawan tersebut.**

Banyak kesenian tradisional yang bisa diangkat sebagai suatu wisata budaya. Kesenian-kesenian tersebut seperti musik orkestra samawa yang dikenal dengan gong genang. Juga musik-musik daerah dapat diupayakan pengembangannya untuk mendukung wisata budaya ini seperti ratib (pembacaan barzanji), begenang, sakeco (cerita), langko (pantun daerah samawa sering juga disebut lawas), saketa, gandang, bagesong dan sebagainya.

Selain yang tersebut di atas, sejumlah permainan rakyat tradisional masyarakat samawa yang menjadi ciri dari masyarakatnya dapat menjadi daya tarik sendiri seperti *karaci*, *berempuk*, *gentao* (pencak silat), *main jaran*, *badempa*, *basakepuk* (permainan air yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi) dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan seperti tersebut diatas dapat digolongkan sebagai pariwisata budaya. Pariwisata budaya melibatkan masyarakat lokal secara luas dan lebih intensif, karena "kebudayaan" yang menjadi daya tarik utama pariwisata melekat pada masyarakat itu sendiri. Interaksi yang intensif ini selanjutnya bisa memunculkan kesadaran akan identitas diri.

Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah dan juga masyarakat itu sendiri dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan adanya pembangunan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata seoptimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan keberadaan lingkungan yang bisa dilakukan dengan cara pemanfaatan

yang bijaksana dan penghormatan terhadap kearifan dari masyarakat lokal serta pelibatan mereka dalam pengelolaan sehingga pengembangan kawasan Danau Lebo sebagai kawasan wisata bisa memberikan manfaat bagi semua *stakeholders* secara berkelanjutan.

## BAB VI PENUTUP

**Pada bab ini merupakan bab akhir dari tesis yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembangunan kawasan wisata Danau Lebo.**

### 6.1 Kesimpulan

Terkait dengan pengelolaan kawasan wisata Danau Lebo, dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dari pemerintah hanya melibatkan kalangan birokrasi dan teknisi yang dianggap mempunyai keahlian memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan pembangunan. Teori perencanaan yang digunakan adalah *sinoptik komprehensif* yang tersentralisasi, tidak fleksibel, rasional ilmiah dan mempunyai tujuan utama yang bersifat ekonomi. Konsep perencanaan yang dihasilkan merupakan kajian-kajian ilmiah dari para teknisi yang didasarkan pada arahan kebijakan dari para birokrat. Selain itu masalah yang diinventarisir belum terpadu dengan tidak munculnya permasalahan dari aspek kepariwisataan, mengingat pembangunan kawasan ini diprioritaskan untuk kegiatan wisata. Dari aspek manfaat, selain memberikan dampak yang positif, pembangunan kawasan wisata Danau Lebo juga berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif yang perlu diantisipasi, antara lain dengan adanya pembangunan ini dikhawatirkan hilangnya mata pencaharian

sebagian masyarakat yang selama ini memanfaatkan keberadaan Danau Lebo sebagai sumber mata pencaharian serta ancaman genangan air bagi persawahan yang berada di bagian utara danau akibat gali-urug danau di bagian selatan. Selain itu kegiatan masyarakat di Desa Serangin yang melakukan penambangan batu cadas untuk persediaan material pembangunan sarana dan prasarana wisata di kawasan Danau Lebo dengan cara mengambil dari bukit-bukit sekitar kawasan danau dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan suksesi terhadap ekosistem baik flora maupun fauna yang ada di bukit yang ditambang tersebut. Dampak lain adalah permasalahan sampah yang bisa menumpuk di sekitar danau akibat aktifitas yang dilakukan apabila tidak ada manajemen pengelolaan yang baik.

2. Secara umum persepsi masyarakat terhadap pembangunan kawasan danau terbagi dalam 3 kelompok, yaitu: kelompok yang setuju terdiri dari masyarakat yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuatu yang baik yang sudah melalui kajian dan perencanaan yang mendalam; kelompok yang tidak setuju yang didominasi oleh masyarakat yang memiliki pengalaman buruk terhadap pembangunan pada masa lalu; dan kelompok yang tidak peduli yang mayoritas adalah masyarakat yang selama ini tidak melakukan akses terhadap kawasan danau baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat ketergantungan pada sumber daya yang ada sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata persepsi masyarakat tidak selamanya sejalan dengan partisipasi. Persepsi yang baik tidak menjamin terjadinya partisipasi positif, malah dapat sebaliknya negatif. Banyak faktor, terutama kepentingan untuk memperoleh keuntungan pribadi sesaat, mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk berbuat baik. Beginilah gambaran masyarakat Desa Meraran dan Rempe khususnya dalam memanfaatkan sumberdaya hayati yang terdapat pada kawasan danau.
3. Pengelolaan lingkungan yang relevan dengan kawasan wisata Danau Lebo adalah pengelolaan yang partisipatif dimana masyarakat disertakan dalam setiap tahapan kegiatan sehingga ada rasa memiliki yang bisa menjadi jaminan

keberlanjutan pembangunan. Dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan sampai dengan menyelenggarakan kegiatan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan kegiatan pariwisata, harus dilakukan secara koordinatif dan terpadu antar semua pihak yang terkait sehingga terwujud keterpaduan lintas sektor dan menghindari terjadinya konflik antar sektor. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor tersier dimana preferensi wisatawan sangat ditentukan oleh tingkat kenyamanan, maka dukungan sarana dan prasarana, dan kerjasama untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi obyek wisata mutlak dibutuhkan.

## **6.2 Saran**

1. Dalam pengelolaan lingkungan suatu kawasan pemerintah jangan hanya memfokuskan upaya pada aspek fisik saja, namun yang lebih penting adalah pengelolaan lingkungan sosial yang perlu mendapatkan perhatian dalam skala prioritas. Komitmen implementasi kebijakan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Khusus kepada masyarakat diperlukan proses pembelajaran yang terus menerus guna meningkatkan kemampuan agar dalam pembangunan dapat menjadi subyek yang berperan aktif dalam semua kegiatan.
3. Ketergantungan masyarakat selama ini terhadap air danau perlu dikurangi agar debit air danau tidak berkurang. Manajemen pengolahan sampah perlu dipersiapkan dengan baik agar keberadaan sampah tidak mengganggu aktifitas di kawasan Danau Lebo.
4. Perlunya kajian menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur dan fasilitas yang akan dibangun terutama melalui AMDAL, RKL/RPL dan Kajian daya dukung (KDD), sehingga berbagai kegiatan dan penjadwalannya secara rinci akan sangat tergantung dari hasil tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agenda 21 Sektoral; Agenda Pariwisata Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan, Lampiran C Piagam Pariwisata Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.

Ardawidjaja, Roby, 2007, Menilik Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, Artikel, [www.dieny.wordpress.com](http://www.dieny.wordpress.com)

Dokumen Pembangunan Kawasan Danau Taliwang, 2006, PT. Grahasindo Cipta Pratama, Surabaya.

Damanik, Janianton & Helmut F. Weber, 2006, Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi, PUSPAR UGM & Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Ginting, Eka DJ, 2006, Hubungan Persepsi Terhadap Program Pengembangan Karir Dengan Kompetisi Kerja, Artikel, <http://library.usu.ac.id>

Hadi, Sudharto P, 2001, Manusia dan Lingkungan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2005, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Program Magister Ilmu Lingkungan, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2005, Aspek Sosial Amdal Sejarah, Teori dan Metode, Gajah Mada *University Press*, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gajah Mada *University Press*, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, Resolusi Konflik Lingkungan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Herry, Fince, 2006, Kegagalan Wisata Di Sumara Barat, Arikel, [www.geocities.com](http://www.geocities.com)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan Era Otonomi Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup.

Kecamatan Seteluk Dalam Angka, 2005, Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa dengan Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat.

Kecamatan Taliwang Dalam Angka, 2005, Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa dengan Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat.

Kantor Menteri Lingkungan Hidup, 2002, Pengelolaan Lingkungan Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kumurur, Veronica A, 2002, Aspek Strategis Pengelolaan Danau Tondano Secara Terpadu, Artikel, [www.geocities.com](http://www.geocities.com).

Lumintang, Onnie M, 1996, Dampak Industri Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura (1962 - 1994), Tesis, Universitas Indonesia Jakarta.

Masyarakat : Struktur Sosial, Artikel, [www.geocities.com](http://www.geocities.com).

Nawawi, H. Hadari, 1983, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Notohadikusumo, KPH, T, 2005, Implikasi Etika Dalam Kebijakan Pembangunan Kawasan, Artikel, Forum Perencanaan Pembangunan.

Noferi, Indra, Dampak Sosial Ekonomi dari Pencemaran Danau Maninjau (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam), Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Raba, Manggaukang, 2003, Fakta-Fakta Tentang Samawa, KASA Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar.

Setiawan, B, 2005, Kumpulan Materi Kursus Dasar Pengelolaan Lingkungan Terpadu; Konsep Instrumen dan Strategi Pengelolaan Lingkungan, Bapedalda Kab. Natuna dan PSLH – UGM.

Siagian, Oscar, (2006), *Quo Vadis* Pengelolaan Danau Toba, Artikel, [www.geocities.com](http://www.geocities.com)

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1995, Metodologi Penelitian Survey, LP3ES, Yogyakarta.

Soemarwoto, Otto, 2003, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soemantoro, R. M Gatot P, 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika Jakarta.

Sukadijo, RG, 1997, Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai *System Lingkage*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wibisono, Darmawan, 2003, Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



**Danau Lebo yang tertutup gulma  
dan eceng gondok**  
*(Sumber Dokumentasi Penelitian; 8 April 2007)*





**Kegiatan masyarakat  
Di sekitar Danau Lebo  
(Sumber Dokumentasi Penelitian; 8 April 2007)**

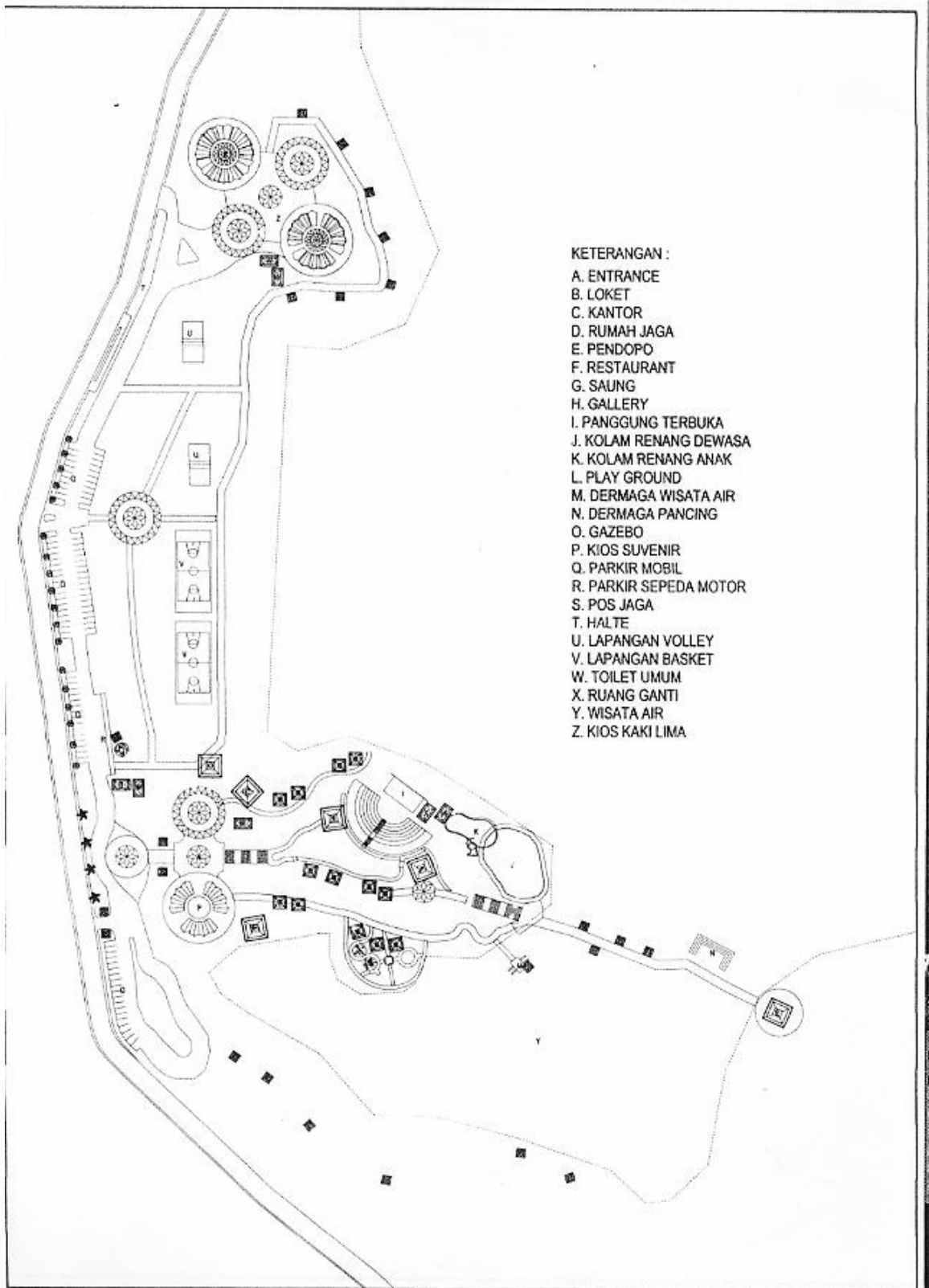


**Beberapa Peralatan Yang Digunakan Masyarakat  
Untuk Menangkap Ikan  
(Sumber Dokumentasi Penelitian; 11 April 2007)**

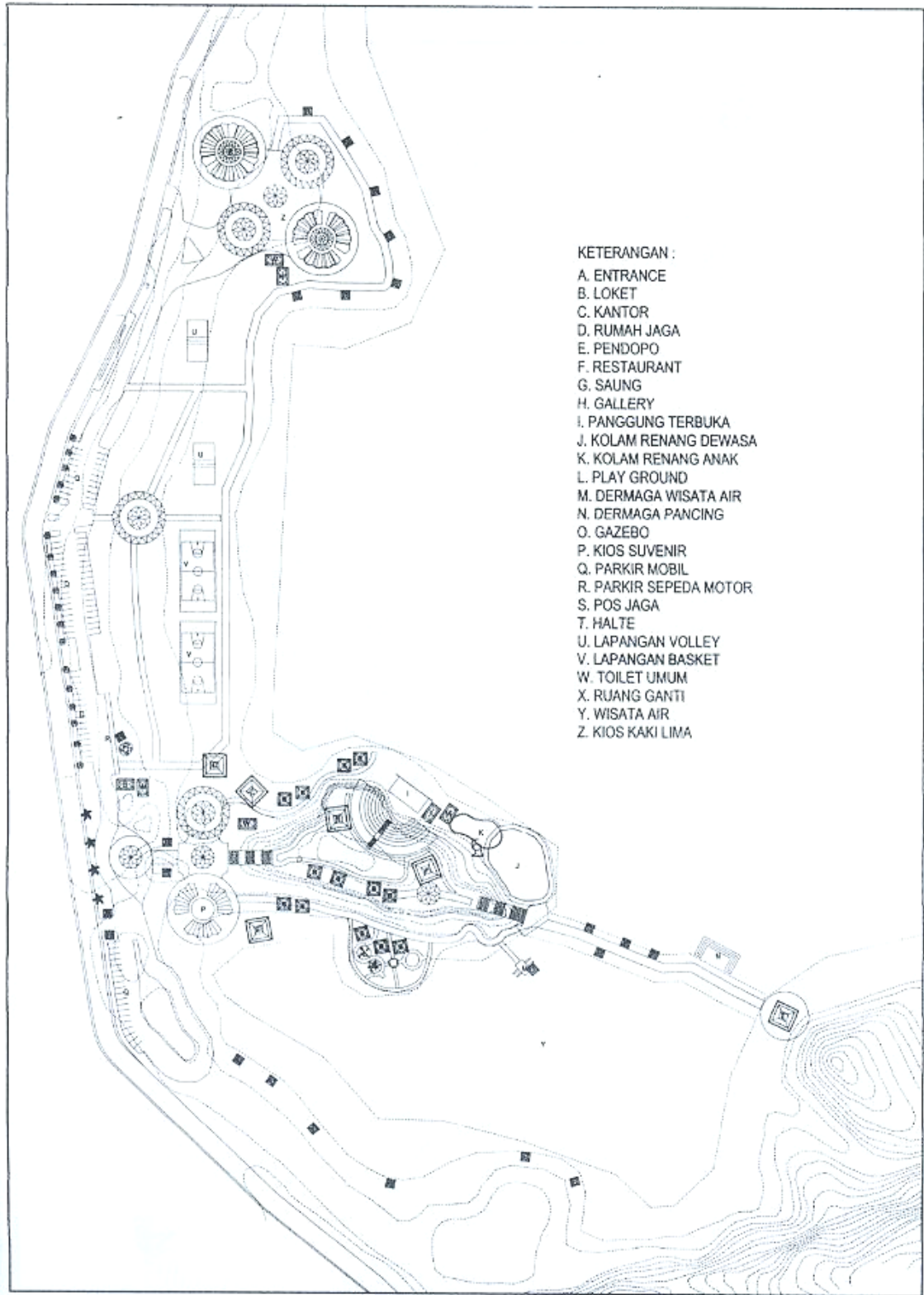


Wawancara Dengan Masyarakat  
Dan Kalangan Birokrasi  
*(Sumber Dokumentasi Penelitian; 9, 10 dan 11 April 2007)*

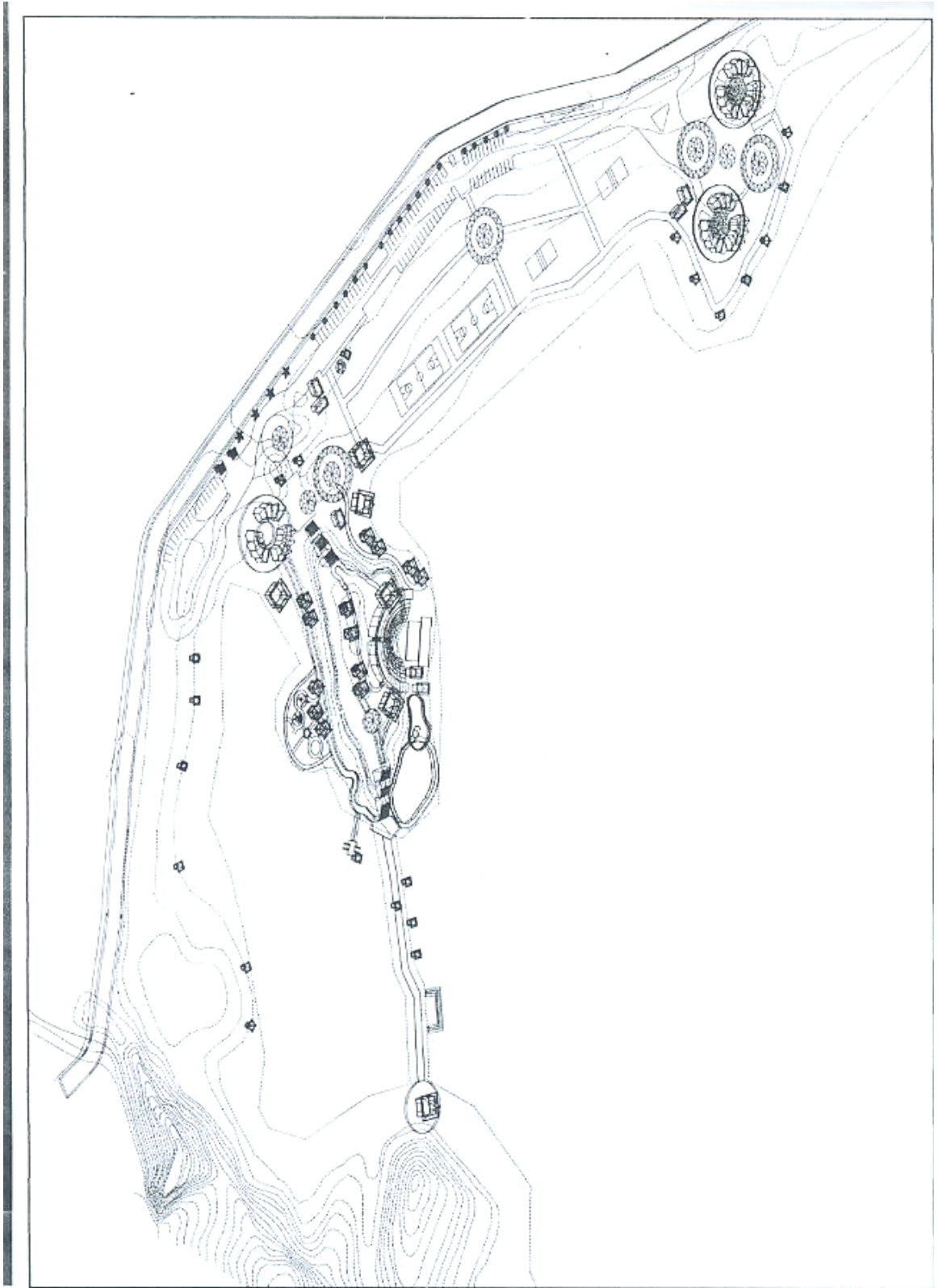




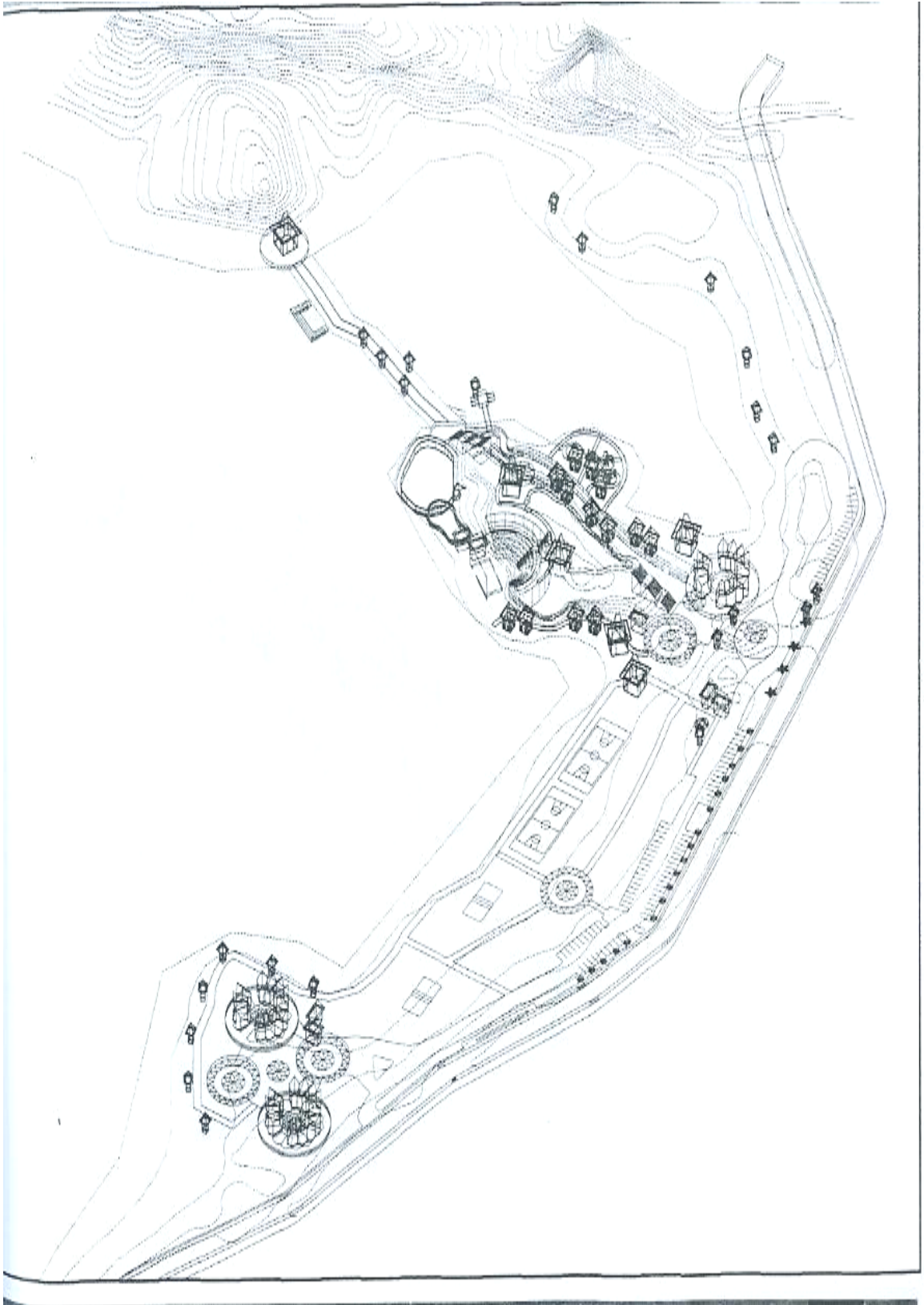
(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)



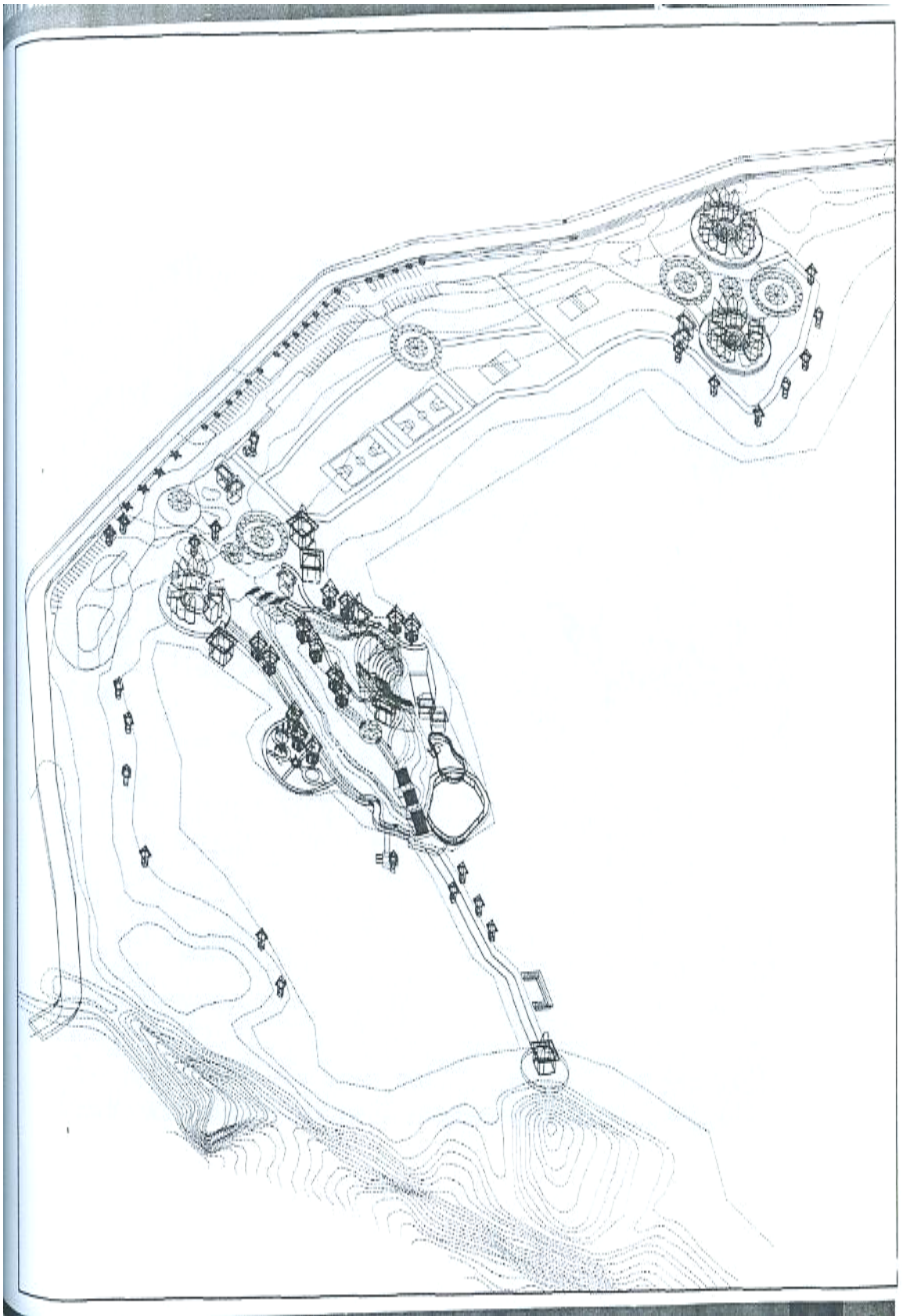
(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)



(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)



(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)



**(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)**



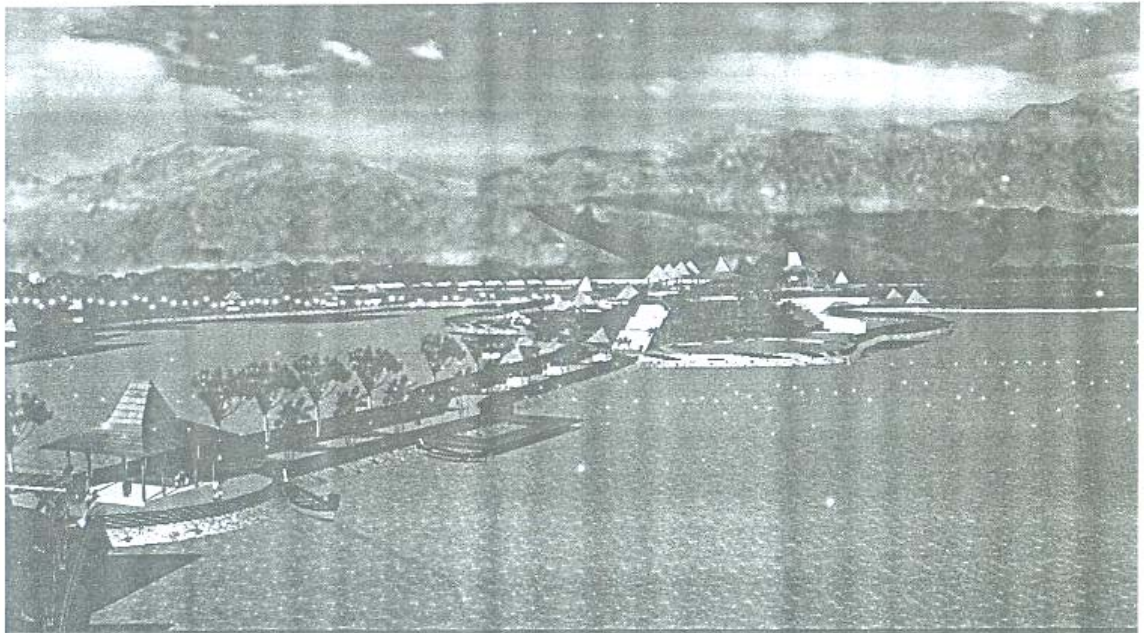
**Animasi pemandangan dari bukit seberang kelokasi kawasan**

**(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)**



**Animasi pemandangan playground anak-anak untuk kawasan wisata**

**(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)**



Animasi pemandangan dari bukit seberang melihat dermaga pemancingan

(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)



Tampak draft konsep entrance dari jalan masuk menuju kawasan wisata

(Sumber PT. Grahasindo Cipta Pratama, 2006)

